

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LKjIP ini merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perhubungan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya. Laporan ini disusun berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**. Selain itu, sistematika pelaporan ini berpedoman pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target kinerja tahun ini. Kiranya LKjIP ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan serta menjadi katalisator bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, dan produktif di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, 20 Januari 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur,



RAHANSYAH, S.H., M.A.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197504061999021001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Perencanaan Strategis	11
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	24
1.3 Isu Strategis	28
1.4.1 Strategi dan Kebijakan	29
1.4.2 Hambatan dan Tantangan	30
1.4 Landasan Hukum	33
1.5 Maksud dan Tujuan	35
1.6.1 Maksud	35
1.6.2 Tujuan	35
1.6 Sistem Penyajian	36
BAB II	38
PERENCANAAN KINERJA	38
2.1 Rencana Strategis	38
2.2 Visi , Misi , Tujuan dan Sasaran Serta Program	39
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	46
2.4 Perjanjian Kinerja	47
BAB III	50
AKUNTABILITAS KINERJA	50
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	50
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	51



A.	Capaian Indikator Sasaran Ke-1	52
B.	Capaian Indikator Sasaran Ke-2	58
C.	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian	87
D.	Tingkat Kemajuan Capaian Realisasi dan Capaian Terhadap Sasaran Strategis (Renstra 2021-2026)	89
E.	Perbandingan Capaian Indikator Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Standar Nasional Yang Ditetapkan	92
F.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Terhadap Capaian Indikator Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan	94
G.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja	100
3.3	Realisasi Anggaran	102
3.4	Tindak Lanjut dan Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025	112
BAB IV		116
PENUTUP		116
4.1	Kesimpulan	116
4.2	Saran dan Rekomendasi	117
LAMPIRAN		118

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahunan	46
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025	48
Tabel 2. 3 Program dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025	49
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran 1	52
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pemasangan Rambu – Rambu / Fasilitas.....	52
Tabel 3. 3 Rincian Realisasi Pemasangan Rambu Dinas Perhubungan Tahun 2025	54
Tabel 3. 4 Rincian Realisasi Pemasangan Tiang PJU Dinas Perhubungan Tahun 2025	54
Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Darat	56
Tabel 3. 6 Rincian Laka Lantas di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025	57
Tabel 3. 7 Tujuan dan Sasaran 2	58
Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum.	60
Tabel 3. 9 Jumlah izin trayek angkutan umum tahun 2025	63
Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Indikator Rasio Izin Trayek	64
Tabel 3. 11 Laporan Hasil Uji KIR UPTD PKB Tahun 2025	67
Tabel 3. 12 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Uji KIR Angkutan Umum / Kendaraan Wajib Uji	69
Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	70
Tabel 3. 14 Rincian Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	71
Tabel 3. 15 Target dan Realisasi Indikator.....	75
Tabel 3. 16 Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum/Kendaraan Wajib Uji.....	79
Tabel 3. 17 Target dan Realisasi Indikator Rasio Panjang Jalan Jumlah Kendaraan	81
Tabel 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum.....	82
Tabel 3. 19 Rincian Data Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum	83
Tabel 3. 20 Rincian Jumlah Penumpang Pesawat Udara Melalui Bandara H. Asan Sampit Tahun 2025	84
Tabel 3. 21 Rincian Jumlah Penumpang Melalui Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	85
Tabel 3. 22 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja	87



Tabel 3. 23 Tingkat Kemajuan Capaian Realisasi Dan Capaian Terhadap Sasaran Strategis (Renstra 2021-2026)	90
Tabel 3. 24	99
Tabel 3. 25 Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Kerja Dinas Perhubungan ..	101
Tabel 3. 26 Realisasi Penyerapan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025	103
Tabel 3. 27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur	25
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai ASN Dinas Perhubungan Tahun 2025	26
Gambar 1. 3 Kualifikasi ASN Dinas Perhubungan Tahun 2025	27
Gambar 1. 4 Sistematika Penyajian LKJIP Dinas Perhubungan Tahun 2025	37
Gambar 3. 1 Predikat Perjanjian Kerja Organisasi	50
Gambar 3. 2 Laporan Jumlah Perlengkapan Jalan Bidang Sarana dan Prasarana.....	53
Gambar 3. 3 Rambu Larangan Putar Balik Simpang Tiga Jalan Ahmad Yani – Jalan Seribu Dahan	55
Gambar 3. 4 Tiang PJU yang baru terpasang di sepanjang Jl. Pemuda Tahun 2025	55
Gambar 3. 5 Pelayanan UPTD Terminal Patih Rumbih Sampit	59
Gambar 3. 6 Laporan Realisasi Angkutan Penumpang Umum Tahun 2025	60
Gambar 3. 7 Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Jumlah Trayek Angkutan Umum Dalam Kabupaten Kotawaringin Timur	62
Gambar 3. 8 Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Penetapan Jumlah Trayek Angkutan Penyeberangan Dan Angkutan Sungai Dan Danau Yang Berdomisili Dalam Kabupaten Kotawaringin Timur	62
Gambar 3. 9 Pelaksanaan Uji KIR oleh UPTD PKB	66
Gambar 3. 10 Ruang Tunggu Pelayanan Uji KIR UPTD PKB	66
Gambar 3. 11 Pelabuhan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur	73
Gambar 3. 12 Laporan Realisasi Angkutan Penumpang Umum Tahun 2025	74
Gambar 3. 13 Laporan Realisasi IKU Jumlah Uji KIR Kendaraan Wajib Uji	77
Gambar 3. 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor	78
Gambar 3. 15 Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Tengah	80
Gambar 3. 16 Data panjang jalan kabupaten/kota	80
Gambar 3. 17 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/541/Huk-DPU/2014 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan di Desa/Kelurahan/Kecamatan	81
Gambar 3. 18 Tampilan Data Statistik Jumlah Penumpang Bulan Januari 2025	83
Gambar 3. 19 Laporan Kepadatan Lalu Lintas Angkutan Barang dan Penumpang	85

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas pokok serta fungsi organisasi sepanjang tahun anggaran berjalan. Tujuan utama pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun penyusunan laporan ini didasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Di dalam dokumen ini, termuat analisis mendalam mengenai capaian indikator kinerja utama, evaluasi realisasi anggaran, hingga identifikasi hambatan operasional serta solusi perbaikan bagi kinerja organisasi di masa depan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan berpedoman pada visi Bupati Kotawaringin Timur periode 2021-2026, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera"**. Visi tersebut diwujudkan melalui misi kelima Bupati yang menjadi acuan utama dalam pembuatan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan, yakni **"Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan"**. Melalui misi ini, Dinas Perhubungan berkomitmen meningkatkan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan, pengelolaan simpul transportasi yang memadai, serta pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, secara umum Dinas Perhubungan mencapai kategori Sangat Tinggi. Beberapa capaian yang sangat memuaskan terlihat pada indikator persentase kepemilikan KIR yang melampaui target hingga 132% serta rasio izin trayek yang mencapai 100%. Namun, tantangan masih ditemukan pada upaya penurunan angka kecelakaan yang baru tercapai 47,4% serta realisasi fisik uji KIR sebesar 51% akibat kendala teknis pada peralatan uji. Keberhasilan kinerja ini didukung oleh pengelolaan anggaran yang akuntabel, di mana dari total pagu sebesar Rp35.804.610.435, Dinas Perhubungan mampu merealisasikannya sebesar Rp32.549.747.064 atau setara dengan penyerapan 90,91%.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menunjukkan performa yang solid dalam mendukung visi dan misi daerah melalui penyerapan anggaran yang efisien dan capaian target yang optimal pada mayoritas indikator.



Meskipun terdapat beberapa catatan evaluasi pada aspek keselamatan dan pengujian fisik kendaraan, organisasi telah menyiapkan langkah strategis berupa digitalisasi layanan dan pemutakhiran alat uji teknis. Komitmen berkelanjutan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan transportasi dan infrastruktur demi mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Timur.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan wilayah strategis di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah mencapai 16.496 km². Secara administratif, wilayah ini terdiri dari 17 Kecamatan dan 185 Kelurahan/Desa, dengan jumlah penduduk yang terus berkembang mencapai 414.463 jiwa. Melalui visi Bupati Kotawaringin Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”, Sebagai pintu gerbang ekonomi daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur memegang peranan krusial dalam mendukung mobilitas dan konektivitas dan mendukung visi tersebut.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan saat ini dituntut untuk bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Publik, sebagai *stakeholder* utama, semakin kritis dan sadar akan hak-haknya terhadap kualitas layanan pemerintah. Hal ini mengharuskan setiap organisasi publik, termasuk Dinas Perhubungan, untuk mengubah paradigma pertanggungjawaban dari sekadar penyerapan anggaran menjadi pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) yang nyata, transparan, dan akuntabel. Penerapan prinsip *Good Governance* di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

6. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result-oriented management*). Melalui SAKIP, Dinas Perhubungan berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam upaya mencapai visi sebagai penyedia layanan transportasi yang handal, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dihadapkan pada berbagai aspek strategis. Sebagai daerah dengan luas wilayah yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, peran sektor perhubungan sangat vital dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pergerakan masyarakat. Peningkatan konektivitas antar-kecamatan serta integrasi moda transportasi darat, sungai, dan udara menjadi agenda strategis guna mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Namun, dalam pelaksanaannya, organisasi masih menghadapi beberapa **permasalahan utama** (*strategic issues*) yang memerlukan penanganan serius, antara lain:

1. **Optimalisasi Sarana dan Prasarana:** Masih terdapat keterbatasan infrastruktur pendukung transportasi, baik fasilitas perlengkapan jalan maupun sarana prasarana perhubungan lainnya yang belum sepenuhnya memadai untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
2. **Kualitas Pelayanan Publik:** Adanya tantangan dalam digitalisasi layanan perhubungan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.
3. **Kesadaran Keselamatan Transportasi:** Masih rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan dan penyedia jasa transportasi terhadap regulasi keselamatan, yang berdampak pada risiko kecelakaan lalu lintas.
4. **Keterbatasan Penguatan Kompetensi Internal:** Belum optimalnya distribusi kompetensi pada setiap bidang menyebabkan beban kerja cenderung terpusat hanya pada beberapa individu saja. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif dan efisien, sehingga diperlukan penguatan kapasitas

yang lebih merata agar setiap aparaturnya di seluruh bidang mampu berkontribusi secara profesional dan mandiri dalam menghadapi tantangan teknologi transportasi terkini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2025. Laporan ini menggambarkan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja. LKIP ini diharapkan menjadi umpan balik (*feedback*) yang objektif untuk perbaikan kualitas kinerja dan peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur di masa mendatang.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Perencanaan Strategis

Dinas Perhubungan mempunyai Tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin timur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- d. Pelaksanaan Pengembangan sumber daya manusia transportasi;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin timur Nomor 21 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati kotawaringin timur nomor 23 tahun 2022 tentang susunan Organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari :

1 KEPALA DINAS

Kepala Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan, asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- d. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya Manusia transportasi;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian, penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran dinas;
- b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan/perbekalan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga dinas;
- d. Penyusunan Anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pembinaan pegawai dan tenaga fungsional;
- f. Pembinaan kegiatan KORPRI Unit Dinas;
- g. Penyelenggara urusan organisasi tata laksana dan analisis jabatan;
- h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat; dan
- i. Pengawasan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.

1 SUB BAGIAN UMUM DAN PELAPORAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok: Menangani urusan tata usaha rumah tangga pengelolaan, kepegawaian, pengelolaan aset dan perlengkapan SKPD, humas keprotokolan dan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana serta penyusunan pelaporan SKPD.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat;
- b. Pengelolaan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset kantor;
- d. Pelaksanaan humas dan keprotokolan;
- e. Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- f. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- g. Penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai;
- h. Penyelenggaraan disiplin pegawai;
- i. Penyiapan bahan pembinaan PNS;

- j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- k. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- l. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- m. Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

2 SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan/anggaran, perencanaan program dan kegiatan SKPD. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
- b. Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;
- c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
- e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja;
- g. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
- h. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

3 BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- b. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- c. Penyiapan perumusan dan kebijakan di bidang pengembangan jaringan sarana prasarana transportasi, simpul transportasi, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, serta konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
- d. Pembangunan, Pengadaan, dan pemeliharaan APJ;
- e. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standarisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat Daerah;
- f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana transportasi;

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rencana kerja bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan bulanan, triwulan dan tahunan;
- b. Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis jaringan bidang sarana prasarana transportasi;
- c. Melaksanakan tugas dan koordinasi serta kebijakan yang bersifat umum dibidang transportasi;
- d. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi terkait;
- e. Memotivasi dan melakukan penilaian prestasi kerja para kepala seksi dan staf agar kinerja makin meningkat;

- f. Menyusun langkah pengadaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan;
- g. Melaksanakan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan APJ serta fasilitas umum dan fasilitas khusus;
- h. Menetapkan serta rancang bangun terminal tipe C pengadaan pemasangan serta penyiapan rambu lalu lintas, alat pengendali lalu lintas jalan;
- i. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan kerja yang di pimpinnya secara terus menerus baik secara preventif maupun refrensif agar tujuan pengelolaan transportasi darat dan udara dapat tercapai secara efektif secara evisien;
- j. Menyampaikan laporan kepada kepala dinas mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan;dan
- k. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai dengan petunjuk kepala dinas.

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan membawahi :

A. SEKSI SARANA DAN PRASARANA SUNGAI ,DANAU DAN PENYEBERANGAN

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di bidang sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. Penyusunan program kegiatan sarana prasarana sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan sarana angkutan sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan, sungai, danau dan penyeberangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan sungai, danau dan penyeberangan;

- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana dan simpul pelabuhan sungai danau, dan penyeberangan;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa serta pengembangan jaringan dan simpul prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan;
- f. Penyusunan langkah kegiatan sarana prasarana sungai, danau dan penyeberangan;
- g. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu sungai;
- h. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

B. SEKSI SARANA DAN PRASARANA PELAYARAN, UDARA DAN PERKERETAAPIAN

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayaran, Udara dan Perkeretaapian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pelayaran, udara dan perkeretaapian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Sarana Prasarana Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul lokal;
- b. Penyusunan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pengumpan lokal, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan perawatan dan perbaikan kapal;
- c. Penyiapan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- d. Persiapan penyusunan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- e. Pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- f. Penerbitan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Penyiapan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- h. Penerbitan izin pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

- i. Penyusunan penerbitan izin usaha perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- j. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP;
- k. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataanPenerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopte;
- l. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataanpenetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota;
- m. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penatausahaan, pembangunan dan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- n. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerahkabupaten/kota;
- o. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataanpenetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta apikabupaten/kota
- p. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataanoperasi saranaperkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerahkabupaten/kota.
- q. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota penerbitanizinpengadaanatau pembangunan perkeretaapian khusus izin operasi,dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerahkabupaten/kota.

4 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang meliputi pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Angkutan Multi Moda. Untuk melaksanakan tugas kepala bidang lalu lintas dan angkutan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen,
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- c. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan angkutan, angkutan orang dan barang di jalan, laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda;
- e. Pelaksanakan proses/mekanisme perizinan, pelayanan dan pengendalian batas maksimum muat serta penetapan angkutan jalan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
- g. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilingkup kerja bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi:

A. SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Lalu lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, manajemen alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

- c. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan kegiatan Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten;
- d. Penerbitan Rekomendasi Teknis / Standar Teknis izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten;
- e. Penerbitan Rekomendasi Teknis / Standar Teknis izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
- f. Penerbitan Rekomendasi Teknis / Standar Teknis izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- g. Penerbitan Rekomendasi Teknis / Standar Teknis izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten yang bersangkutan;
- h. Penerbitan Rekomendasi Teknis / Standar Teknis izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- i. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.
- j. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten; beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota;
- k. Penerbitan Rekomendasi Teknis / Standar Teknis izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- l. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- m. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau;
- n. Penerbitan Rekomendasi Teknis / Standar Teknis izin pembangunan dan pengoperasian sungai dan danau; Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota;
- o. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

- p. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

B. SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN MULTI MODA

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Multi Moda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan pada seksi lalu lintas dan angkutan multi moda.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Multi Moda mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan angkutan multimoda, serta kompetensi sumber daya manusia angkutan multimoda, harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat daerah bidang angkutan multimoda,;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan angkutan multimoda;
- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan angkutan multimoda, serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan multimoda, harmonisasi dan standarisasi regulasi daerah bidang angkutan multimoda; dan
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan Multi Moda;

5 BIDANG PEMBINAAN KESELAMATAN DAN PERPARKIRAN

Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan transportasi dan Perparkiran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, perparkiran audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan,
- b. pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi dan perparkiran;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan perparkiran;
- d. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan rekayasa angkutan jalan keselamatan perparkiran audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan dan perparkiran audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan dan perparkiran;

Bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran membawahi :

A. SEKSI MANAJEMEN, AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN

Kepala Seksi Manajemen, Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan transportasi dan perparkiran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Manajemen, Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penghimpunan bahan penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi keselamatan dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi dan perparkiran;
- b. Penghimpunan bahan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit, dan inspeksi penanganan keselamatan;
- c. Pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi;
- d. Penghimpunan bahan penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan;
- f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan dan perparkiran.

B. SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL PERPARKIRAN

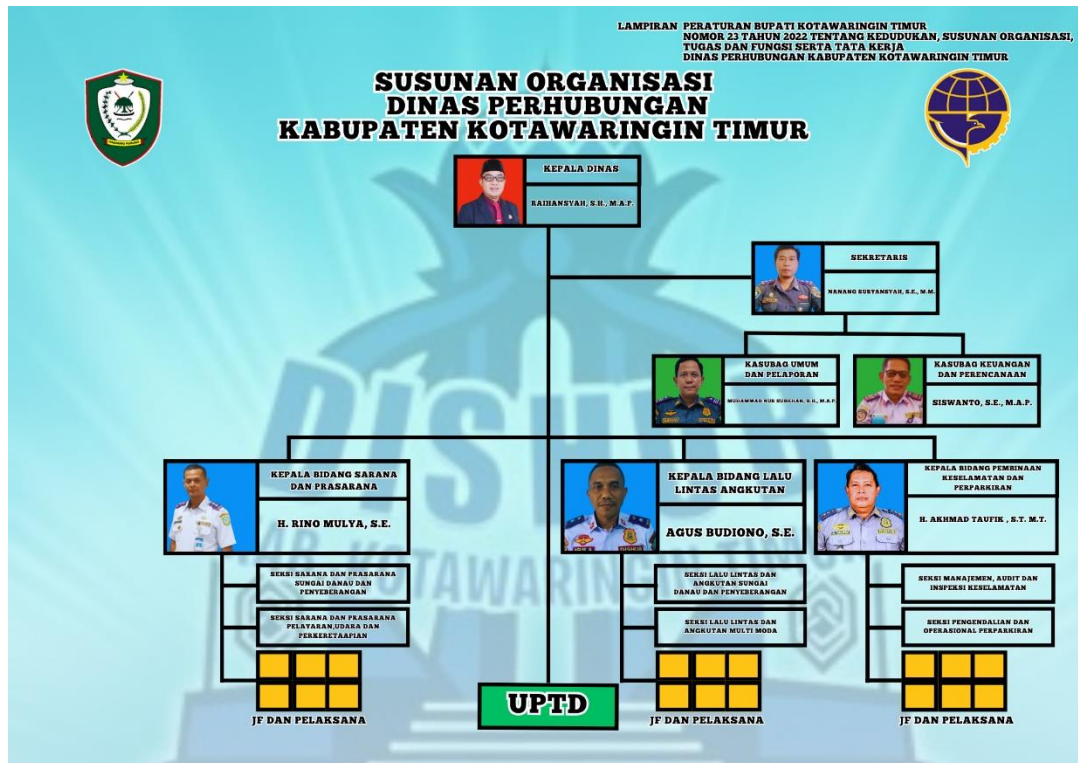
Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan transportasi dan Perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian dan Operasional Perparkiran mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen pengendalian parkir, audit inspeksi dan kemitraan keselamatan, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi dan perparkiran;
- b. Penyusunan rencana umum pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian perparkiran;

- c. Pengendalian operasional perparkiran serta kompetensi sumber daya manusia pada pembinaan keselamatan perparkiran;
- d. Pengoordinasian dengan seksi evaluasi potensi perparkiran dalam menetapkan potensi parkir umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi dan perparkiran;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan operasional perparkiran;
- f. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis tentang manajemen pengendalian operasional perparkiran dan kemitraannya; dan
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan tentang pengendalian dan operasional perparkiran.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai sasaran strategis sangat bergantung pada struktur organisasi yang efektif dan tata kerja yang sistematis. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun berjalan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur.



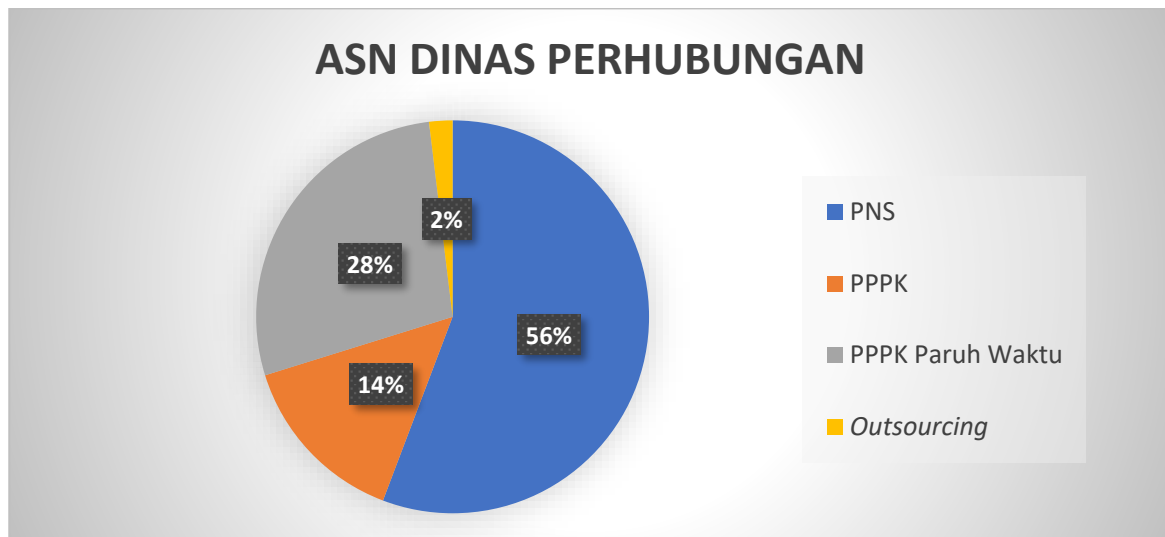
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

Rincian Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Multi Moda
 - b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Sungai, Danau dan Penyebrangan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Udara dan Perkeretaapian
6. Bidang Pembinaan Keselamatan dan Perparkiran membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Seksi Manajemen Audit dan Inspeksi Keselamatan
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional Perparkiran
7. UPTD
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

- b. UPTD Terminal
- c. UPTD Dermaga
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Perhubungan berjumlah 105 (seratus lima) orang ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut :

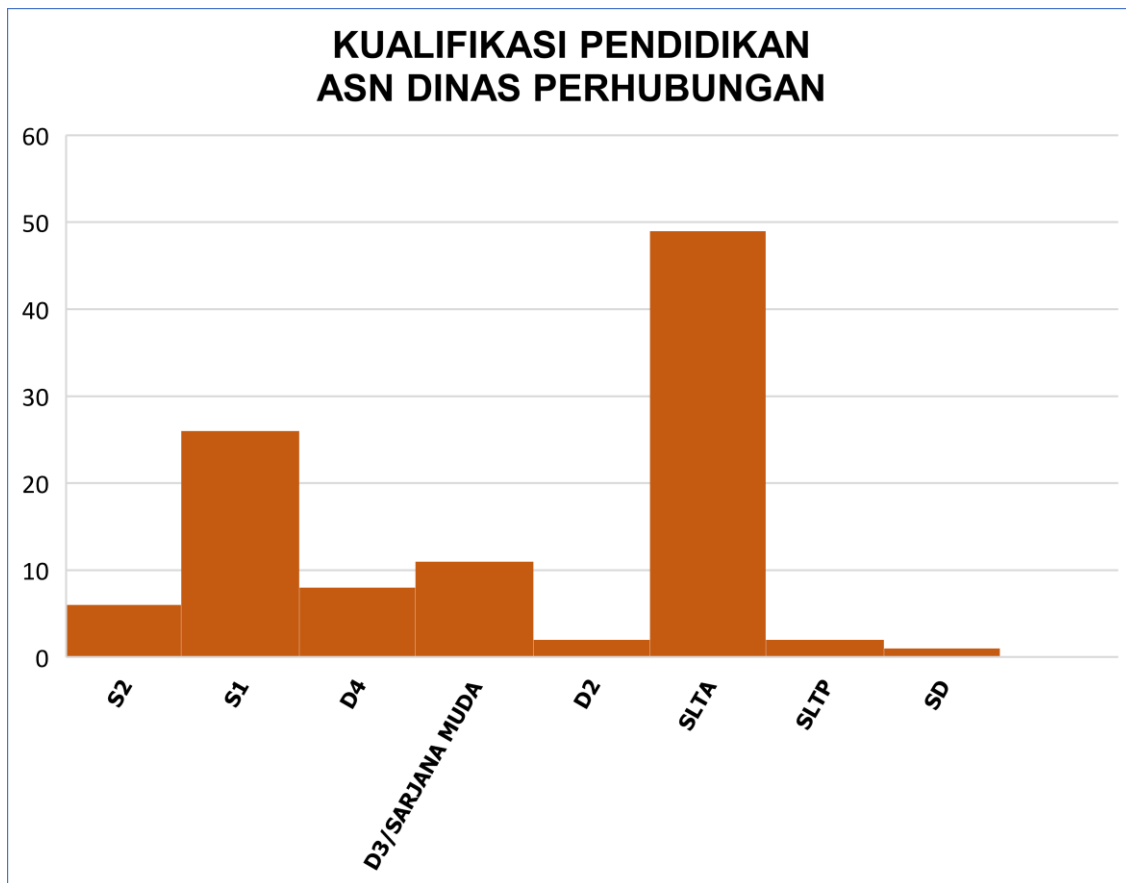


Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai ASN Dinas Perhubungan Tahun 2025
Sumber : Sub Bagian Umum dan Pelaporan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025

Dari bagan tersebut jumlah pegawai ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dirincikan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil berjumlah **58 Orang (56%)**
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah **15 Orang (14%)**
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berjumlah **30 orang (28%)**
- d. Tenaga *Outsourcing* berjumlah **2 orang (2%)**

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, berikut rincian yang disajikan dalam bentuk grafik :



Gambar 1. 3 Kualifikasi ASN Dinas Perhubungan Tahun 2025
*Sumber : Sub Bagian Umum dan Pelaporan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025*

Dari grafik tersebut jumlah pegawai ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dirincikan sebagai berikut:

- a. Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan S2 berjumlah 6 orang;
- b. Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan S1 berjumlah 26 orang;
- c. Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan D4/Sarjana Terapan berjumlah 8 orang;
- d. Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan D3/Sarjana Muda berjumlah 11 orang;
- e. Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan D2 berjumlah 2 orang;
- f. Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan SLTA berjumlah 49 orang;
- g. Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan SLTP berjumlah 2 orang; dan
- h. Pegawai dengan kualifikasi Pendidikan SD berjumlah 1 orang.

1.3 Isu Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi sejumlah isu strategis yang erat kaitannya dengan kondisi wilayah, dinamika pembangunan, serta tantangan global dan nasional dalam sektor transportasi. Salah satu isu utama adalah ketersediaan sarana perlengkapan jalan yang belum memadai, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan penerangan jalan umum. Keterbatasan ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko kecelakaan dan rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan, sehingga perlu segera ditangani melalui program penyediaan dan perbaikan fasilitas keselamatan lalu lintas secara menyeluruh. Selain itu, tingginya angka kecelakaan lalu lintas juga menjadi perhatian utama, sejalan dengan isu nasional mengenai penurunan angka kecelakaan dan upaya mewujudkan transportasi yang aman dan berkelanjutan. Edukasi keselamatan, pengawasan berkendara, serta rekayasa lalu lintas menjadi strategi penting dalam upaya peningkatan keselamatan jalan. Pada saat yang sama, pemanfaatan angkutan sungai yang belum optimal menjadi peluang yang belum tergarap maksimal, padahal wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dilintasi oleh sungai-sungai besar yang dapat menunjang konektivitas daerah dan mengurangi beban jalan darat.

Keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan dermaga juga menjadi isu penting, khususnya dalam mendukung efisiensi logistik dan distribusi barang antarwilayah. Pengembangan dermaga, termasuk dermaga rakyat dan pelabuhan penumpang, akan sangat membantu dalam mendukung tol laut dan memperkuat konektivitas regional. Di sisi lain, fasilitas terminal penumpang yang tidak berfungsi optimal serta minimnya angkutan umum yang terjadwal berdampak pada kurangnya layanan transportasi publik yang efisien, terutama di wilayah pedesaan. Modernisasi sistem angkutan umum dan revitalisasi terminal menjadi langkah strategis yang diperlukan. Terakhir, pengembangan Bandara H. Asan menjadi isu strategis dalam rangka memperluas konektivitas udara, mendukung sektor pariwisata, dan mempercepat akses ke wilayah terpencil. Dengan memperkuat seluruh sektor ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan mampu memberikan layanan transportasi yang lebih aman, efisien, dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

1.4.1 Strategi dan Kebijakan

Sebagai penjabaran dan implementasi dari Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, strategi dan kebijakan yang diambil sebagai berikut :

▪ **Sasaran 1: Ketersediaan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan Yang Memadai**

Strategi 1 : Penyediaan Perlengkapan Jalan Dengan Jumlah Memadai dengan Tata Kelola Data berbasis Teknologi Informasi

Kebijakan 1 :

- a. Pengadaan dan Pemasangan APJ/PJU Pada Ruas jalan yang belum terpasang
- b. Peremajaan APJ/PJU pada ruas jalan. yang sudah ditentukan
- c. Peremajaan Trafic Light (APILL) dan Penambahan Alat Pemantau Lalu Lintas
- d. Pengadaan dan pemasangan Rambu,Marka,dan papan Nama Jalan Pada Ruas Jalan yang Membutuhkan

Strategi 2 : Peningkatan Tertib berlalu lintas

Kebijakan 2 :

- a. Peningkatan tata kelola Perparkiran
- b. Peningkatan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. Penanganan Angkutan Barang Yang *Over load* dan Over Dimensi

▪ **Sasaran 2: Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan**

Yang Aman, Nyaman dan Mencukupi

Strategi 1 : Peningkatan Peran Angkutan Sungai

Kebijakan 1 :

- a. Optimalisasi peran Dermaga Sungai sebagai Pendukung Pelabuhan Laut dan Sumber PAD yang Potensial
- b. Pembangunan Dermaga Sungai Sebagai Pendukung Aktivitas Perekonomian Masyarakat

Strategi 2 : Pengembangan Angkutan Umum

Kebijakan 2 :

- a. Meningkatkan Konektifitas Angkutan Umum Antar Kecamatan
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum
- c. Integrasi Antar Moda Angkutan, baik Darat, Laut maupun Udara
- d. Penyediaan Angkutan Umum Perkotaan

Strategi 3 : Pengembangan Bandara H. Asan Sampit

Kebijakan 3 : Penyediaan Lahan Untuk Perpanjangan Runway dan Fasilitas Pendukung Lainnya

1.4.2 Hambatan dan Tantangan

Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan permasalahan untuk teratasi antara lain :

1. Angkutan Umum

Isu angkutan umum masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya, yakni :

- a. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum (belum adanya jadwal perjalanan angkutan umum);
- b. Masih minimnya jaringan trayek angkutan umum darat, udara dan laut;
- c. Belum terwujudnya angkutan umum kota;
- d. Minimnya layanan jaringan trayek angkutan umum bagi daerah - daerah di kecamatan;
- e. Dominasi kendaraan pribadi lebih tinggi dari pada pengguna angkutan umum.

2. Terminal dan Dermaga

Isu terminal dan dermaga masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya, yakni :

- a. Fasilitas utama dan fasilitas pendukung terminal angkutan umum yang telah tersedia belum memenuhi kualitas standar minimal
- b. Masih belum tersedianya lahan untuk pengembangan terminal angkutan barang dan untuk pengembangan pelabuhan pelangisan
- c. Belum tersedianya dermaga yang dapat mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat di beberapa wilayah

3. Terdapat Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Rusak dan Tidak berfungsi
 - a. Belum terpenuhinya semua kebutuhan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) pada beberapa ruas jalan.
 - b. Belum Semua persimpangan jalan yang bersinyal (Traffic Light) memiliki management Traffic yang optimal.
 - c. Belum tersedianya prasarana penyebrangan sungai yang melintas sungai Mentaya yang menghubungkan antar wilayah.
4. Pengujian kendaraan Bermotor
 - a. Rendahnya Persentase kendaraan Angkutan Penumpang umum dan barang yang melakukan uji berkala dibandingkan data jumlah angkutan umum
 - b. Balai Pengujian kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pehubungan Kabupaten Kotawaringin Timur hanya 1 (satu) yang berada di ibu kota kabupaten, sedangkan luas wilayah yang harus dilayani meliputi 17 kecamatan, sehingga perlu adanya sarana mobilitas yang bisa menunjang pelayanan pengujian seluruh wilayah kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Pengelolaan Perparkiran
 - a. Kurangnya keteraturan dan ketertiban dalam pengelola perparkiran
 - b. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di lokasi – lokasi parkir akibat kurang disiplin parkir antara lain : tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak diberikan karcis kepada pelanggan, pengguna karcis parkir berulang ulang dan menyelenggarakan parkir pada tempat dilarang parkir pada tempat yang dilarang parkir
 - c. Masih adanya parkir di tepi jalan sementara kondisi di ruas jalan tersebut sudah macet
 - d. Regulasi di bidang perparkiran perlu di lakukan penyesuaian dengan kondisi eksitis

- e. Belum tersedia lahan parkir yang memadai oleh pemerintah daerah di jalan protokol dan CBD (Pusat kegiatan), berdampak badan jalan digunakan parkir

6. Angkutan Laut dan Udara

- a. Jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal tidak tepat waktu
Runway bandara belum naik didarati pesawat berbadan lebar
- b. Masalah yang di hadapi oleh transportasi udara dan laut adalah ketersediaan lahan untuk pengembangan pelabuhan pelangisian sebagai pendukung pelayananan serta permasalahan di sekitar transportasi laut adalah alur pelayaran yang belum beroperasi selama 24 jam tanpa terhalang pasang dan surut sungai mentaya.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959, Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1920);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

1.5 Maksud dan Tujuan

1.6.1 Maksud

Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan gambaran pencapaian realisasi atas rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan. Melalui dokumen ini, dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor internal dan eksternal organisasi yang memengaruhi capaian kinerja, sekaligus berfungsi sebagai pedoman resmi dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan daerah. Selain itu, laporan ini disusun guna mempertanggungjawabkan perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengelola urusan perhubungan secara transparan dan akuntabel.

1.6.2 Tujuan

LKjIP disusun dengan tujuan untuk melaporkan hasil realisasi kinerja instansi dengan tujuan :

- a. Menilai efektivitas arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melaporkan realisasi instrumen dan komitmen kebijakan anggaran tahunan yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif.
- c. Menilai kinerja organisasi berdasarkan kerangka strategi, program, sasaran, output, serta outcome yang spesifik dan terukur.
- d. Mengevaluasi sinergi sumber daya dan potensi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.
- e. Menyajikan gambaran kinerja menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber dana.
- f. Menjadi bahan evaluasi koordinasi antar program untuk memastikan terciptanya sinergi pencapaian tujuan akhir.
- g. Mengintegrasikan laporan pencapaian berbagai kepentingan baik secara vertikal maupun horizontal.
- h. Mengidentifikasi kendala, hambatan, serta kelemahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.
- i. Memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di masa mendatang.

- j. Menyampaikan informasi kinerja secara transparan kepada seluruh elemen internal dan eksternal guna meningkatkan motivasi dan komitmen organisasi.

1.6 Sistem Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 melaporkan tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2025, capaian kinerja 2025 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Dinas Perhubungan Penetapan Kinerja (Tapkin) sendiri merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029

Adapun sistem penyajian LKJIP Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan : Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja : Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

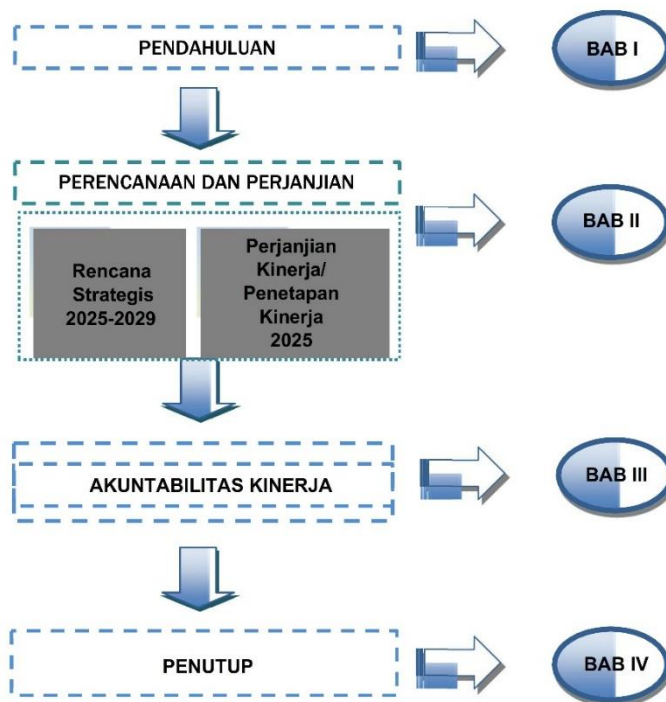
B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut :



Gambar 1. 4 Sistematika Penyajian LKJIP Dinas Perhubungan Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai berdasar kurun waktu 6 (enam) tahun, yaitu untuk Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021–2026 bertujuan untuk memberikan arah dan gambaran menyeluruh mengenai rencana tindakan serta kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, melalui analisis menyeluruh terhadap berbagai faktor internal maupun eksternal organisasi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintahan daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur selama lima tahun mendatang. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.2 Visi , Misi , Tujuan dan Sasaran Serta Program

A. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Bupati Kotawaringin Timur yang telah ditetapkan dengan rumusan yakni :

“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera.”

B. Misi

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mewujudkan visi diatas adalah :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance*); dan
5. Mewujudkan kotawaringin timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

C. Tujuan

Untuk menciptakan kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi menuju pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, maka dirumuskan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan. Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

NSPK dan Sasaran yang relevan dengan RPJMD Adalah **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan”** sehingga tujuan yang ditetapkan merupakan penjabaran dari misi, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai

dalam jangka waktu lima tahun oleh Dinas Perhubungan. Adapun Tujuan yang ditetapkan berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya keselamatan, Keamanan dan ketertiban berlalu lintas

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi dengan mendorong Peran Moda Transportasi Darat, Laut

Penetapan tujuan ini berfungsi sebagai arah strategis dan fokus kinerja organisasi dalam pengembangan sistem transportasi yang andal, aman, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang menggambarkan capaian konkret yang ingin diraih oleh Dinas Perhubungan dalam periode bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Sasaran ini menunjukkan hasil-hasil yang dapat diukur dari pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien demi pencapaian tujuan yang optimal. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan yang memadai
2. Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman, nyaman dan mencukupi

Berdasarkan kedua sasaran yang ditetapkan diatas, sasaran “Ketersediaan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan yang memadai” terdiri dari beberapa indikator sasaran antara lain :

- c. Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya
- d. Pemasangan rambu -rambu /fasilitas dan perlengkapan jalan

Sasaran “Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman, nyaman dan mencukupi” terdiri dari beberapa indikator sasaran antara lain :

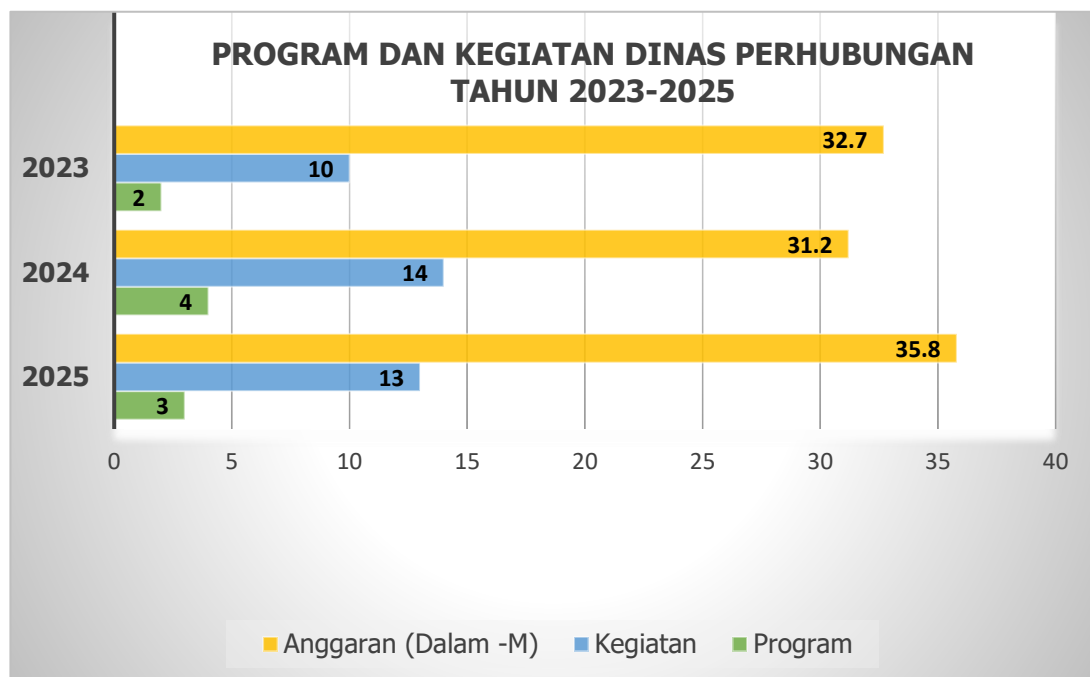
- a. Jumlah arus penumpang angkutan umum
- b. Rasio ijin Trayek
- c. Jumlah uji KIR angkutan Umum/kendaraan wajib uji
- d. Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus
- e. Persentase layanan angkutan darat

- f. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji
- g. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan
- h. Jumlah orang barang melalui Dermaga/bandara/terminal pertahun

E. Program

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan sejumlah program dan kegiatan sebagai instrumen operasional. Program-program ini merupakan penerjemahan dari strategi organisasi dalam mengalokasikan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran secara efektif dan efisien.

Sebagai gambaran perkembangan organisasi, berikut disajikan perbandingan jumlah program, kegiatan, dan alokasi anggaran Dinas Perhubungan dari tahun 2023 hingga 2025. Data ini menunjukkan bagaimana Dinas Perhubungan terus melakukan penyesuaian strategi dan efisiensi anggaran dalam menghadapi tantangan transportasi yang dinamis. Berikut disajikan grafik program, kegiatan dan anggaran Dinas Perhubungan mulai tahun 2023-2025:



Gambar 2. 1 Tren Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023-2025

Pada kegiatan tahun anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyusun rencana strategis yang diimplementasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan

dengan total anggaran 35,8 M. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 yang terdiri dari 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) dengan total anggaran 31,2 M dan tahun anggaran 2023 yang terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran 32,7 M, Dinas Perhubungan mengalami dinamika rencana kerja dan dukungan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur selama tiga tahun terakhir. Analisis grafik diatas diajabarkan dalam beberapa aspek berikut:

1. Aspek Program

Berdasarkan grafik, Jumlah program mengalami penambahan, dimulai dari **2 program** pada 2023, meningkat menjadi **4 program** pada 2024, dan berkurang menjadi **3 program** pada 2025. Penurunan jumlah program di tahun 2025 mengindikasikan adanya upaya penggabungan program agar lebih fokus pada sasaran strategis utama organisasi.

2. Aspek Kegiatan

Berdasarkan grafik, Jumlah kegiatan meningkat dari **10 kegiatan (2023)** menjadi **14 kegiatan (2024)**, lalu turun tipis menjadi **13 kegiatan pada tahun 2025**. Meskipun jumlah program berkurang pada tahun 2025, jumlah kegiatan tetap relatif stabil dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa operasionalisasi pelayanan perhubungan tetap terjaga untuk menjangkau target kinerja yang lebih spesifik.

3. Aspek Anggaran

Berdasarkan grafik, Alokasi anggaran menunjukkan pergerakan yang dinamis. Dari **Rp32,7 Miliar pada 2023**, sempat mengalami penurunan menjadi **Rp31,2 Miliar pada 2024**, namun melonjak signifikan sebesar 14,7% menjadi **Rp35,8 Miliar pada tahun 2025**. Kenaikan anggaran yang cukup tajam pada tahun 2025 mencerminkan adanya prioritas pembangunan atau kebutuhan mendesak di sektor perhubungan, seperti perbaikan infrastruktur keselamatan jalan atau pengadaan sarana transportasi, mengingat beban anggaran meningkat meskipun jumlah program dikurangi.

Tahun 2025 menjadi titik krusial di mana Dinas Perhubungan menjalankan prinsip "*less program, more result*". Dengan jumlah program yang lebih sedikit namun didukung oleh anggaran yang paling besar dibandingkan dua tahun sebelumnya, diharapkan pelaksanaan kinerja tahun

2025 dapat lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten;
- b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
- c. Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir;
- d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
- e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Kegiatan Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyebrangan Dalam Daerah Kabupaten Kota.

F. Anggaran

1. Program Anggaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu Anggaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025 untuk program Anggaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Adalah sebesar Rp. 13.681.474.800 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- e. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah Rp. 74.280.000;
- f. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat Daerah Anggaran Rp. 7.345.216.435;
- g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Anggaran Rp. 422.370.000;
- h. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Anggaran Rp. 2.185.049.691;
- i. Kegiatan pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Anggaran Rp. 197.870.000;
- j. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Anggaran Rp. 1.899.968.574; dan
- k. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran Rp. 1.556.720.100.

l.

2. Program Anggaran Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pagu Anggaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025 untuk program Anggaran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Adalah sebesar Rp. 22.098.015.635 dengan rincian kegiatan sebagai berikut

- a. Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten Anggaran Rp. 13.018.580.640;
- b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C anggaran Rp. 297.000.000
- c. Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir Anggaran Rp. 50.080.000;
- d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Anggaran Rp. 372.224.995; dan
- e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten Kota Anggaran Rp. 198.580.000.



3. Program Anggaran Pengelolaan Pelayaran

- a. Kegiatan penetapan lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoprasian untuk Kapal yang Melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten Kota Anggaran Rp 25.120.000.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dibuat sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat Program dan kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik - baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahunan yang ditetapkan sesuai dengan Renstra 2021-2026 disajikan dalam table berikut :

**Tabel 2. 1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahunan
Dinas Perhubungan Berdasarkan Renstra 2021-2026**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pemasangan rambu rambu / fasilitas perlengkapan jalan	600	650	700	750	800	850
2.	Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	125	119	110	102	92	83
3.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	57.000	59.700	61.700	63.800	65.200	67.000
4.	Rasio ijin Trayek	0,0000 329	0,0000 329	0,0000 329	0,0000 329	0,0000 329	0,0000 329
5.	Jumlah uji KIR	8.402	9.242	9.796	10.384	11.008	11.668

	angkutan Umum/kendaraan wajib uji						
6.	Jumlah pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	5	5	5	5	5	5
7.	Persentase layanan angkutan darat	40%	40%	43%	45%	48%	50%
8.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kndaraan wajib uji	17%	19%	21%	23%	25%	27%
9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	156	166	176	186	196	206
10.	Jumlah orang barang melalui Dermaga /Bandara/Terminal per tahun	465.000	470.000	475.000	480.000	485.000	490.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam Hal ini Dinas Perhubungan telah membuat dokumen Perjanjian Kinerja (terlampir) dengan tujuan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya.

3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
5. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
6. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
7. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur.
8. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	Rambu	800
2.	Meningkatkan pelayanan publik	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Penumpang	65.200
		Rasio ijin Trayek	Rasio	0,0000329
		Jumlah uji KIR angkutan Umum/kendaraan wajib uji	Kendaraan	11.008
		Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	buah	5
		Persentase layanan angkutan darat	persentase	48 %
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kndaraan wajib uji	persentase	25 %
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	Rasio	196
		Jumlah orang barang melalui Dermaga/bandara/terminal pertahun	Orang/barang	485.000

Tabel 2. 3 Program dan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp. 12.028.154.756	APBD Tahun Anggaran 2025
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 19.484.340.547	APBD Tahun Anggaran 2025
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 25.120.000	APBD Tahun Anggaran 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai wujud akuntabilitas, LKJIP Tahun 2025 fokus memaparkan capaian hasil pelaksanaan program kerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target indikator terhadap realisasinya guna mengidentifikasi celah kinerja (*performance gap*). Hasil evaluasi atas selisih kinerja tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja (*performance improvement*) di masa mendatang, demi memastikan tercapainya visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut. Adapun ringkasan nilai peringkat kinerja disajikan dalam tabel berikut :

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Gambar 3. 1 Predikat Perjanjian Kerja Organisasi

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Apabila realisasi semakin tinggi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, sebaliknya jika realisasi semakin rendah maka menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang maksimal. Adapun rumus yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Untuk Kinerja Bermakna Positif Jika semakin besar realisasinya maka semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin buruk kinerjanya, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Untuk Kinerja Bermakna Negatif Jika semakin besar realisasinya maka semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin baik kinerjanya, menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja merupakan tahapan penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dan sejalan dengan perjanjian kinerja instansi. Berdasarkan tren perencanaan periode 2023–2025, organisasi terus melakukan penyesuaian strategi dengan melakukan penyederhanaan jumlah program dan kegiatan namun didukung oleh alokasi anggaran yang lebih optimal. Guna mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan, berikut disajikan uraian capaian riil terhadap indikator kinerja individu maupun organisasi. Penjabaran ini mengacu sepenuhnya pada sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor perhubungan

Untuk menjaga objektivitas hasil pelaporan, setiap pencapaian indikator kinerja akan diukur dan dikelompokkan ke dalam kategori predikat tertentu berdasarkan interval nilai realisasinya. Standar penilaian ini dimulai dari kategori "Sangat Kurang" untuk capaian 0-20%, "Kurang" untuk capaian 21-60%, "Butuh

Perbaikan” untuk capaian 61-80%, “Baik” untuk capaian 81-100%, dan “Istimewa” untuk lebih dari 100%. Evaluasi menyeluruh terhadap hasil-hasil pencapaian dari setiap indikator tersebut dipaparkan dalam rincian analisis berikut ini:

A. Capaian Indikator Sasaran Ke-1

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Tujuan dan Sasaran 1 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran 1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Target
1.	Meningkatnya keselamatan, Keamanan dan ketertiban berlalu lintas	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	800

Sumber : Perjanjian Kerja Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025

Dalam upaya mewujudkan tujuan strategis yaitu **Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Berlalu Lintas**, Dinas Perhubungan menetapkan sasaran utama berupa penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang memadai. Keberhasilan sasaran tersebut diukur melalui indikator kerja **Pemasangan rambu-rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan**, dengan target sebanyak **800 unit** pada tahun 2025. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ”Meningkatnya keselamatan, Keamanan dan ketertiban berlalu lintas” diukur melalui indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Pemasangan Rambu – Rambu / Fasilitas dan Perlengkapan Jalan Tahun 2025

NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian	Kategori
1	Pemasangan rambu ~ rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	Unit	800	4.279	534,87%	Baik

Capaian sasaran

96%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Pelaporan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan laporan bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, angka realisasi data yang tercantum pada tabel target dan realisasi kinerja, indikator Pemasangan Rambu-rambu / Fasilitas dan Perlengkapan Jalan menunjukkan pencapaian yang baik. Dengan target yang ditetapkan sebanyak 800 unit, Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2025 berhasil merealisasikan pemasangan sebanyak 4.279 unit.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman Km 6 Sampit, Kalimantan Tengah Kode Pos 74322
Telepon (0531) 21200 Faksimile (0531) 2035585
Laman <https://dishub.kotimkab.go.id>, Pos-el dishub@kotimkab.go.id

LAPORAN JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA

LAPORAN TAHUNAN : Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025

No.	JENIS PERLENGKAPAN JALAN	SATUAN	RINCIAN JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN			KET
			Existing Awal	Jumlah Pemasangan Baru	Total	
1.	Rambu	Unit	591	17	608	
2.	PJU	Unit	3,487	167	3,654	
3.	Traffic Light	Unit	17	-	17	
JUMLAH			4,095	184	4,279	
TOTAL KESELURUHAN JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN					4,279	

Sampit, 05 Januari 2026
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


NANANG SETIAWAN, S.E.
Penata (III/c)
NIP. 197911182006041017

Gambar 3. 2 Laporan Jumlah Perlengkapan Jalan Bidang Sarana dan Prasarana
Sumber data : Bidang Sarana dan Prasarana

Di tahun 2025 berhasil merealisasikan 17 pengadaan rambu di wilayah kota serta 164 tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai sarana perlengkapan jalan yang menunjang keselamatan berlalu lintas. Hasil ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 96%. Merujuk pada standar kriteria penilaian yang berlaku, capaian tersebut menempatkan indikator ini ke dalam kategori Baik, yang mencerminkan komitmen kuat dalam pemenuhan sarana keselamatan jalan bagi masyarakat. Adapun rincian realisasi pemasangan rambu yang terpasang di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Rincian Realisasi Pemasangan Rambu Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Lokasi	Keterangan
1.	Jalan A.Yani (Depan Sdn 6 MB.Hulu)	Larangan Putar Balik
2.	Jalan A.Yani (Depan Pos Lantas KTL)	Larangan Putar Balik
3.	Jalan Iskandar (Depan Ikon Jelawat SPT)	Larangan Truck Masuk
4.	Jalan A.Yani(Depan Holand Boga Bakery)	Larangan Masuk
5.	Jalan A.Yani (Depan Soto Kuin)	Larangan Putar / Balik Arah
6.	Jalan A.Yani (Depan Perpustakaan Sampit)	Larangan Putar / Balik Arah
7.	Jalan A.Yani (Depan PMI Kotim)	Larangan Putar / Balik Arah
8.	Simpang Tiga Jalan Ahmad Yani – Jalan Seribu Dahan	Larangan Putar / Balik Arah
9.	Jalan Ahmad Yani (Depan Bank Indonesia)	Truck Dilarang Masuk
10.	Jalan Ahmad Yani (Depan Bank Indonesia)	Rambu Kelas Jalan Tiga
11.	Jalan A.Yani (Depan Hotel Borneo)	Truck Dilarang Masuk
12.	Jalan A.Yani (Depan Hotel Borneo)	Rambu Kelas Jalan Tiga
13.	Jalan A.Yani (SMP.Muhammadiyah)	Rambu Petunjuk Traffic Light
14.	Jalan A.Yani (Depan Perpustakaan)	Rambu Petunjuk Traffic Light
15.	Jalan A.Yani (Depan KNPI)	Rambu Petunjuk Traffic Light
16.	Jalan Jenderal Sudirman (Bundaran Belanga)	Dilarang Parkir
17.	Jalan Jenderal Sudirman (Bundaran Belanga)	Dilarang Parkir

Sumber : Data Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

Adapun rincian realisasi pemasangan tiang PJU yang terpasang di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Rincian Realisasi Pemasangan Tiang PJU Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Lokasi	Jumlah
1.	Sepanjang Jalan Pramuka	83 unit
2.	Sepanjang Jalan Pemuda	81 unit
TOTAL		164 unit

Sumber : Data Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur



Gambar 3. 3 Rambu Larangan Putar Balik Simpang Tiga Jalan Ahmad Yani – Jalan Seribu Dahan yang baru terpasang Tahun 2025

Simpang Tiga Jalan A.Yani-Jalan Seribu Dahan menjadi titik lokasi rawan terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas karena terletak lokasinya tidak jauh dari bundaran pusat kota sehingga perlu rambu larangan bagi masyarakat untuk tidak sembarang putar balik di lokasi tersebut untuk menghindari kedua hal tersebut.



Gambar 3. 4 Tiang PJU yang baru terpasang di sepanjang Jl. Pemuda Tahun 2025

Kawasan Jl. Pemuda juga kerap mendapat perhatian dari masyarakat Kotawaringin Timur karena pada malam hari dinilai terlalu gelap, kurang

pencahayaannya, serta kondisi jalan yang tidak stabil sehingga rawan akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan berupaya untuk memenuhi saran dan masukan dari masyarakat serta meningkatkan strategi dalam menciptakan kenyamanan, keamanan dan keselamatan berkendara dan mengurangi angka kecelakaan.

Keberadaan sarana prasarana perhubungan, khususnya melalui **pemasangan rambu-rambu serta fasilitas perlengkapan jalan**, bukan sekadar pemenuhan infrastruktur fisik, melainkan instrumen krusial dalam mitigasi risiko fatalitas di jalan raya. Secara teknis, ketersediaan rambu yang memadai berfungsi memberikan panduan, peringatan, dan instruksi yang jelas bagi pengguna jalan guna meminimalisir kesalahan manusia (*human error*). Efektivitas pemenuhan realisasi 770 unit fasilitas jalan ini memiliki korelasi langsung terhadap upaya menekan **angka kecelakaan lalu lintas**, mengingat ketiadaan peringatan dini di titik-titik rawan seringkali menjadi pemicu utama terjadinya insiden yang merugikan jiwa maupun materi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai efektivitas pemenuhan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan indikator kerja tambahan terkait “Penurunan Angka Kecelakaan dari Tahun Sebelumnya”. Untuk mengetahui data terkait angka kecelakaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur berkoordinasi dengan Satlantas Polres Kotim sebagai penyedia data.

Indikator Kerja “Penurunan Angka Kecelakaan dari Tahun sebelumnya” di sajikan pada tabel yang memuat target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Darat

NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	orang	92	194	210,8%	Tidak Memenuhi
Capaian sasaran					210,8%	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Pelaporan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan tabel diatas, bahwa capaian Persentase Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hal tersebut menandakan bahwa Dinas Perhubungan masih belum berhasil mencapai target pada indikator “Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya” karena nilai capaian tersebut melebihi dari nilai target yang ditetapkan dimana seharusnya nilai capaian tersebut diharapkan mengalami penurunan dan hasil capaian tergolong dalam kategori Kurang.

Rincian data angka kecelakaan dan rincian korban yang terjadi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Rincian Laka Lantas di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	JUMLAH LAKA LANTAS	194 Kasus
2	JUMLAH KORBAN	320 Orang
	KORBAN MENINGGAL DUNIA	47 Orang
	KORBAN LUKA BERAT	6 Orang
	KORBAN LUKA RINGAN	267 Orang
3	KERUGIAN MATERIAL (Rp)	Rp. 1.146.300.000

Sumber : Data Satlantas Polres Kotim Tahun 2025

Berdasarkan koordinasi data dengan Satlantas Polres Kotim, performa keselamatan jalan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sepanjang tahun 2025 mencatat total **194 kasus kecelakaan lalu lintas**. Dari keseluruhan insiden tersebut, tercatat jumlah korban mencapai **320 orang**, dengan rincian tingkat fatalitas sebagai berikut: **47 orang** meninggal dunia, **6 orang** luka berat, dan **267 orang** luka ringan. Selain dampak pada jiwa manusia, rentetan peristiwa kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerugian material yang cukup signifikan, yakni sebesar **Rp1.146.300.000** yang menegaskan pentingnya penguatan kembali fungsi fasilitas perlengkapan jalan guna menekan angka-angka tersebut di masa mendatang. Walaupun jumlah rambu dan perlengkapan jalan yang telah terpasang berada di angka yang cukup optimal, namun kesadaran dari masyarakat akan keselamatan

berkendara juga harus ditingkatkan karena selain dari faktor eksternal, faktor internal juga berperan penting.

B. Capaian Indikator Sasaran Ke-2

Tujuan dan Sasaran ke-2 yang telah ditetapkan beserta target dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Tujuan dan Sasaran 2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Target
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi dengan mendorong Peran Moda Transportasi Darat, Laut maupun Udara sebagai sarana lalu lintas dan angkutan, baik orang maupun barang	Meningkatkan Pelayanan Publik	Jumlah arus penumpang angkutan umum	65.200
			Rasio izin trayek	0,0000329
			Jumlah uji KIR angkutan umum / kendaraan wajib uji	11.008
			Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	5
			Persentase layanan angkutan darat	48 %
			Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji	25%
			Rasio panjang jalan jumlah kendaraan	196
			Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan umum	485.000

Sumber : Perjanjian Kerja Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025

I. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Penyediaan layanan angkutan umum merupakan bentuk kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat akan aksesibilitas transportasi yang layak. Melalui penyelenggaraan angkutan umum yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, diharapkan tercipta sistem transportasi darat yang efisien dan berkelanjutan. Keberadaan angkutan umum yang dikelola dengan baik menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, yang pada akhirnya akan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh pelosok daerah. Selaras dengan pentingnya peran tersebut. Terminal Patih Rumbih adalah salah satu fasilitas layanan angkutan umum moda transportasi darat yang menjadi jaringan untuk menghubungkan daerah Sampit terhadap wilayah lainnya yang dikelola oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur secara konsisten melakukan pemantauan terhadap kinerja pelayanan angkutan umum, salah satunya melalui indikator jumlah arus penumpang yang terdata di Terminal Patih Rumbih Sampit.



Gambar 3. 5 Pelayanan UPTD Terminal Patih Rumbih Sampit

Guna mengukur ketersediaan sarana dan prasarana angkutan yang mencukupi, Dinas Perhubungan memantau indikator jumlah arus penumpang angkutan umum. Sebagai pintu gerbang utama transportasi darat di daerah, fluktuasi penumpang di terminal ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas layanan angkutan umum. Berdasarkan data realisasi angkutan penumpang umum dari UPTD Terminal 2025, baik yang transit, berangkat, maupun turun di Terminal Patih Rumbih Sampit sepanjang tahun 2025, data jumlah arus penumpang angkutan umum di UPTD Terminal Patih Rumbih adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN
UPTD TERMINAL PATIH RUMBIH

JL. MT. Haryono No. 17 SAMPIT, Kalimantan Tengah
Laman <https://dishub.kotimkab.go.id>, Pos-el dishub@kotimkab.go.id

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

LAPORAN TAHUNAN : Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025

JENIS TRAYEK : 1. Antar Kota dalam Provinsi (AKDP)

: 2. Pedesaan

No.	TRAYEK / TRANSIT	JENIS KENDARAAN	PERUSAHAAN PT / PO / PERUM	JUMLAH ARMADA	JUMLAH PENUMPANG			KET
					TURUN	NAIK	TRANSIT	
1.	Pangkalan Bun - Sampit - P. Raya PP	Bus	LOGOS	1,445	3,722	4038	30,358	
2.	Pangkalan Bun - Sampit - P. Raya PP	Bus	YESSOE	2,428	9,644	8,572	49,349	
3.	Pangkalan Bun - Sampit - P. Raya PP	Bus	AGUNG MULYA	828	1,302	1,672	18,806	
4.	Pangkalan Bun - Sampit - P. Raya PP	Bus	DAMRI	557	1,150	1,606	9,231	
5.	P. Raya - Sampit - Lamandau PP	Bus	DAMRI	708	1,119	1,376	13,576	
6.	Sampit - Ujung Pandaran PP	Bus	DAMRI	301	3,859	3,859	-	
6.	Sampit - Porenggean PP	Bus	DAMRI	192	2,424	2,424	-	
JUMLAH				6,456	24,217	24,544	121,318	
RATA - RATA PER BULAN				538	2,018	2,045	10,110	

Sampit, 05 Januari 2026
Kepala UPTD Terminal Patih Rumbih

JONNIE ERAFADIEYAN NOOR, S.E.
Penjabat (II/d)
NIP. 197208032006041017

Gambar 3. 6 Laporan Realisasi Angkutan Penumpang Umum Tahun 2025
UPTD Terminal Patih Rumbih

Berdasarkan laporan tersebut, diketahui jumlah penumpang yang turun di Terminal sejumlah 24.217 orang, jumlah penumpang yang naik dari terminal sejumlah 24.544 orang, dan jumlah penumpang yang transit di terminal sejumlah 121.318 orang. Adapun pencapaian indikator kinerja ini di sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Arus Penumpang Angkutan
Umum

NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian	Kategori
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	penumpang	65.200	170.079	260,8 %	Istimewa
Capaian sasaran					260,8 %	

Diketahui dari tabel diatas, nilai realisasi yang didapatkan berdasarkan laporan realisasi jumlah realisasi penumpang angkutan umum tahun 2025 untuk indikator jumlah arus penumpang angkutan umum adalah 170.079 orang yang terdiri dari 24.217 orang yang turun di Terminal, 24.544 orang naik dari terminal, dan 121.318 orang yang transit di terminal. Angka persentasi capaian menunjukkan sebesar 260,8% dengan kategori istimewa. Hal ini menandakan besarnya minat

masyarakat terhadap angkutan umum dan arus konektivitas transportasi umum di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur cukup memadai.

II. Rasio izin trayek

Pelayanan angkutan umum yang tertib dan terorganisir merupakan salah satu pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk memastikan seluruh angkutan umum beroperasi secara legal dan memenuhi standar keselamatan, Dinas Perhubungan melakukan pengawasan ketat melalui instrumen izin trayek. Rasio izin trayek menjadi indikator kunci untuk memotret sejauh mana tingkat kepatuhan operator angkutan terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus menjamin kepastian layanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi darat guna memastikan ketersediaan angkutan umum yang legal sebanding dengan tingginya mobilitas masyarakat.

Indikator Rasio Izin Trayek merefleksikan daya dukung angkutan umum resmi terhadap jumlah pengguna jasa transportasi darat di wilayah ini. Dengan memadukan data perizinan dan data statistik penumpang, Dinas Perhubungan dapat memetakan efektivitas penyebaran armada dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Pencapaian indikator ini didasarkan pada rumus perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun rumus tersebut dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Rasio izin trayek} = \frac{\text{Jumlah izin trayek}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Diketahui jumlah izin trayek angkutan darat sampai dengan tahun 2025 berjumlah 15 trayek. Jumlah 15 (lima belas) trayek terdiri dari **2 (dua) trayek angkutan umum angkutan darat** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Jumlah Trayek Angkutan Umum Dalam Kabupaten Kotawaringin Timur dan **13 (tiga belas) trayek angkutan sungai, danau, dan penyebrangan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Penetapan Jumlah Trayek Angkutan Penyeberangan Dan Angkutan Sungai Dan Danau Yang Berdomisili Dalam Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH UNIT ANGKUTAN UMUM DALAM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR															
KESATU	: Menetapkan jumlah unit angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.															
KEDUA	: Jumlah unit angkutan umum yang beroperasi adalah sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis Angkutan</th><th>Trayek</th><th>Jumlah Unit</th><th>Ket</th></tr><tr><td>1</td><td>Angkutan Bus</td><td>Sampit – Ujung Pandaran</td><td>1 Unit</td><td>Aktif</td></tr><tr><td>2</td><td>Angkutan Bus</td><td>Sampit – Parenggean</td><td>1 Unit</td><td>Aktif</td></tr></table>	No	Jenis Angkutan	Trayek	Jumlah Unit	Ket	1	Angkutan Bus	Sampit – Ujung Pandaran	1 Unit	Aktif	2	Angkutan Bus	Sampit – Parenggean	1 Unit	Aktif
No	Jenis Angkutan	Trayek	Jumlah Unit	Ket												
1	Angkutan Bus	Sampit – Ujung Pandaran	1 Unit	Aktif												
2	Angkutan Bus	Sampit – Parenggean	1 Unit	Aktif												
KETIGA	: Jumlah unit angkutan umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA digunakan sebagai: a. bahan perencanaan transportasi daerah; b. dasar evaluasi pelayanan angkutan umum; dan c. bahan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan.															
KEEMPAT	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.															

Gambar 3. 7 Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Jumlah Trayek Angkutan Umum Dalam Kabupaten Kotawaringin Timur

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH TRAYEK ANGKUTAN PENYEBERANGAN DAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU YANG BERDOMISILI DALAM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.																																										
KESATU	: Menetapkan jumlah trayek angkutan penyeberangan dan angkutan sungai dan danau yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;																																										
KEDUA	: Jumlah trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1.</td><td>Sampit – Pagatan</td><td>: 130 Km</td></tr><tr><td>2.</td><td>Sampit - Katingan I</td><td>: 80 Km</td></tr><tr><td>3.</td><td>Sampit - Katingan II</td><td>: 80 Km</td></tr><tr><td>4.</td><td>Sampit – Tewang</td><td>: 80 Km</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sampit – Seranau</td><td>: 600 M</td></tr><tr><td>6.</td><td>Sampit – Terantang</td><td>: 15 Km</td></tr><tr><td>7.</td><td>Sampit – Lamiring</td><td>: 15 Km</td></tr><tr><td>8.</td><td>Bagendang - Pulau Hanaut</td><td>: 4 Km</td></tr><tr><td>9.</td><td>Samuda – bapinang</td><td>: 1 Km</td></tr><tr><td>10.</td><td>Basirih - Pulau hanaut</td><td>: 1 Km</td></tr><tr><td>11.</td><td>Trans – Bebaung</td><td>: 1 Km</td></tr><tr><td>12.</td><td>Sebamban - Handil palak</td><td>: 1 Km</td></tr><tr><td>13.</td><td>Sungai ijum - Kelampayan</td><td>: 1 Km</td></tr><tr><td colspan="3">Total : Tiga Belas (13) Lintasan Trayek</td></tr></table>	1.	Sampit – Pagatan	: 130 Km	2.	Sampit - Katingan I	: 80 Km	3.	Sampit - Katingan II	: 80 Km	4.	Sampit – Tewang	: 80 Km	5.	Sampit – Seranau	: 600 M	6.	Sampit – Terantang	: 15 Km	7.	Sampit – Lamiring	: 15 Km	8.	Bagendang - Pulau Hanaut	: 4 Km	9.	Samuda – bapinang	: 1 Km	10.	Basirih - Pulau hanaut	: 1 Km	11.	Trans – Bebaung	: 1 Km	12.	Sebamban - Handil palak	: 1 Km	13.	Sungai ijum - Kelampayan	: 1 Km	Total : Tiga Belas (13) Lintasan Trayek		
1.	Sampit – Pagatan	: 130 Km																																									
2.	Sampit - Katingan I	: 80 Km																																									
3.	Sampit - Katingan II	: 80 Km																																									
4.	Sampit – Tewang	: 80 Km																																									
5.	Sampit – Seranau	: 600 M																																									
6.	Sampit – Terantang	: 15 Km																																									
7.	Sampit – Lamiring	: 15 Km																																									
8.	Bagendang - Pulau Hanaut	: 4 Km																																									
9.	Samuda – bapinang	: 1 Km																																									
10.	Basirih - Pulau hanaut	: 1 Km																																									
11.	Trans – Bebaung	: 1 Km																																									
12.	Sebamban - Handil palak	: 1 Km																																									
13.	Sungai ijum - Kelampayan	: 1 Km																																									
Total : Tiga Belas (13) Lintasan Trayek																																											
KETIGA	: Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA																																										

Gambar 3. 8 Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Penetapan Jumlah Trayek Angkutan Penyeberangan Dan Angkutan Sungai Dan Danau Yang Berdomisili Dalam Kabupaten Kotawaringin Timur

Adapun rincian angkutan trayek umum angkutan darat dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Jumlah izin trayek angkutan umum tahun 2025

No	Jenis Angkutan	Trayek	Keterangan
1.	Angkutan Bus	Sampit – Ujung Pandaran	Aktif
2.	Angkutan Bus	Sampit – Parenggean	Aktif
3.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Sampit – Pagatan	Aktif
4.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Sampit - Katingan I	Aktif
5.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Sampit - Katingan II	Aktif
6.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Sampit – Tewang	Aktif
7.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Sampit – Seranau	Aktif
8.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Sampit – Terantang	Aktif
9.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Sampit – Lamiring	Aktif
10.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Bagendang - Pulau Hanaut	Aktif
11.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Samuda – bapinang	Aktif
12.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Basirih - Pulau hanaut	Aktif
13.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Trans – Bebaung	Aktif
14.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Sebamban - Handil palak	Aktif
15.	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Sungai ijum - Kelampan	Aktif

Penyebut pada rumus indikator tersebut berupa “Jumlah penumpang angkutan darat” didapatkan dari data jumlah penduduk di Kotim sejumlah 460.064 orang berdasarkan sumber Buku Agregat Kependudukan Semester I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Laporan Perkembangan Kependudukan Semester I Tahun 2025

A.KUANTITAS PENDUDUK

1.Persebaran Penduduk

1.1.Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Jenis Kelamin

KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%
1-KOTA BESI	11,057	4.65	9,923	4.47	20,980	4.56
2-CEMPAGA	12,879	5.41	11,747	5.29	24,626	5.35
3-MENTAYA HULU	11,057	4.65	9,895	4.45	20,952	4.55
4-PARENGGEAN	15,531	6.53	14,543	6.55	30,074	6.54
5-BAAMANG	39,081	16.43	37,575	16.92	76,656	16.66
6-MENTAWA BARU KETAPANG	54,996	23.11	52,661	23.71	107,657	23.40
7-MENTAYA HILIR UTARA	9,541	4.01	8,932	4.02	18,473	4.02
8-MENTAYA HILIR SELATAN	12,581	5.29	12,033	5.42	24,614	5.35
9-PULAU HANAUI	9,150	3.85	8,463	3.81	17,613	3.83
10-ANTANG KALANG	7,490	3.15	6,788	3.06	14,278	3.10
11-TELUK SAMPIT	6,179	2.60	5,656	2.55	11,835	2.57
12-SERANAU	6,302	2.65	5,841	2.63	12,143	2.64
13-CEMPAGA HULU	11,499	4.83	10,404	4.68	21,903	4.76
14-TELAWANG	10,265	4.31	9,160	4.12	19,425	4.22
15-BUKIT SANTUAI	4,396	1.85	3,875	1.74	8,271	1.80
16-TUALAN HULU	4,649	1.95	4,184	1.88	8,833	1.92
17-TELAGA ANTANG	11,277	4.74	10,454	4.68	21,731	4.72
Grand Total	237,930	100	222,134	100	460,064	100

Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur, Sumber data : DKB PDAK PUSAT

1

Sumber data : Buku Agregat Kependudukan Semester I
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025

Berdasarkan angka yang telah didapatkan dan dituangkan dalam perhitungan maka di rincikan dalam perhitungan di bawah ini :

$$\text{Rasio izin trayek} = \frac{\text{Jumlah izin trayek}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} = \frac{15}{460.064} = 0,0000326$$

Pencapaian kinerja pada indikator ”rasio izin trayek” di sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Target dan Realisasi Indikator Rasio Izin Trayek

NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian	Kategori
1	Rasio izin trayek	rasio	0,0000329	0,0000326	99,08%	Baik
Capaian sasaran					99,08 %	

Diketahui dari perhitungan dan sumber data diatas, nilai realisasi yang didapatkan selama pengumpulan data tahun 2025 untuk indikator jumlah arus

penumpang angkutan umum adalah 0,0000329 yang menunjukkan realisasi telah mencapai target dengan persentasi capaian sebesar 100% (kategori Baik).

III. Jumlah uji KIR angkutan umum / kendaraan wajib uji

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau yang dikenal dengan KIR merupakan serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor untuk memastikan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam menjamin keselamatan lalu lintas, menekan risiko kecelakaan akibat kegagalan teknis, serta meminimalisir dampak polusi udara dari gas buang kendaraan yang tidak terstandarisasi. Dengan memastikan setiap komponen kendaraan berfungsi optimal sesuai standar keamanan nasional, pengujian ini berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan ekosistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan indikator kerja berupa “Jumlah uji KIR angkutan umum / kendaraan wajib uji” sebagai komitmen yang tertuang dalam perjanjian kerja. Indikator **Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dan Kendaraan Wajib Uji** merupakan parameter kunci dalam mengukur efektivitas pengawasan kelaikan kendaraan jalan. Capaian angka pada indikator ini mencerminkan sejauh mana UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur mampu menjangkau populasi kendaraan wajib uji terutama armada angkutan logistik dan transportasi publik serta truk-truk muatan untuk memastikan pemenuhan standar teknis nasional secara konsisten. Tingginya realisasi pada indikator ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan pelayanan pengujian, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjamin keselamatan pengguna jalan.



Gambar 3. 9 Pelaksanaan Uji KIR oleh UPTD PKB

Layanan yang tersedia di UPTD PKB meliputi Jenis Layanan: Pendaftaran Kendaraan Bermotor Uji Berkala, Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor, Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku, Numpang Uji Keluar, Numpang Uji Masuk, Mutasi Uji Keluar, Mutasi Uji Masuk, dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Wajib Uji.



Gambar 3. 10 Ruang Tunggu Pelayanan Uji KIR UPTD PKB

Indikator Jumlah Uji KIR Angkutan Umum/Kendaraan Wajib Uji mencatatkan realisasi sebesar 5.618 kendaraan dari target yang ditetapkan sebanyak 11.008 kendaraan. Hasil pencapaian berdasarkan Laporan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaporkan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Kepala Dinas Perhubungan selama satu tahun periode 2025, tercatat total **5.618 kendaraan** yang terdaftar dalam administrasi (Jumlah KBWU). Dari jumlah tersebut, sebanyak **5.035 kendaraan** (sekitar 89,6%) benar-benar melaksanakan uji kendaraan, sementara **583 kendaraan** tercatat tidak melakukan uji.

- Data merupakan kendaraan yang terdaftar dan wajib melakukan uji berkala;
- Data dapat berubah sesuai mutasi kendaraan dan kepatuhan wajib uji;
- Sumber data berasal dari sistem pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji berkala di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 sebanyak :
 Jumlah KBWU (Lulus + Tidak Lulus+ Tidak Di Uji) : 5618 Unit
 Jumlah Kendaraan Di Uji : 5035 Unit
 Lulus : 4985 Unit
 Tidak Lulus : 4985 Unit

4.2 Saran

1. Perlu peningkatan kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji berkala;
2. Perlu peningkatan fasilitas dan pelayanan uji KIR;
3. Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap kendaraan yang tidak melakukan uji berkala.

Dikeluarkan di : Sampit
 pada tanggal : 9 Januari 2026
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Kotawaringin Timur,



RAIHANSYAH, S.H., M.A.P.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 197504061999021001

Sumber data : Laporan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 3. 11 Laporan Hasil Uji KIR UPTD PKB Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah KBWU (Lulus + Tidak Lulus + Tidak Di Uji)	Jumlah Kendaraan Di Uji	Jenis Kendaraan (jumlah)								Hasil Uji		Kendaraan Tidak Di Uji	Numpang Uji		Mutasi Uji	
				Mobil Bus Kecil	Mobil Bus Sedang	Mobil Bus Besar	Mobil Barang Bak Terbuka	Mobil Barang Bak Tertutup	Mobil Tangki	Mobil Penarik	Kereta Tempelan Bak Terbuka	Lulus	Tidak Lulus		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
(a)	(b)	(c)	(d)	-3	-4	-5	-10	-11	-12	-13	-17	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31
1	Jan	431	386	5	16	0	248	46	71	0	0	383	3	45	40	42	1	3
2	Feb	506	455	3	14	1	281	41	111	2	2	454	1	51	96	48	3	3
3	Mar	467	426	3	13	0	308	45	57	0	0	425	1	41	56	39	3	2
4	Apr	300	276	0	10	0	202	38	26	0	0	274	2	24	34	23	0	1
5	Mei	482	433	1	10	0	338	29	55	0	0	431	2	49	24	46	1	3
6	Jun	561	485	1	13	1	343	35	92	0	0	468	17	76	76	72	2	4
7	Jul	553	505	1	23	1	359	57	64	0	0	500	5	48	51	45	2	3
8	Ags	509	431	4	20	1	256	41	107	1	1	429	2	78	77	75	0	3
9	Sep	424	387	1	10	0	248	48	78	1	1	385	2	37	58	35	1	2
10	Okt	408	358	0	9	0	271	41	37	0	0	352	6	50	45	49	1	1
11	Nop	538	498	2	16	0	386	35	59	0	0	493	5	50	41	27	3	13
12	Des	439	395	2	15	0	290	41	47	0	0	391	4	44	25	38	2	6
Jumlah		5618	5035	23	169	4	3530	497	804	4	4	4985	50	1176	623	539	19	44

Sumber data : Lampiran Laporan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur UPTD PKB

Berdasarkan lampiran data hasil laporan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala Tahun 2025 Kabupaten Kotawaringin Timur UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, total kendaraan yang diuji didominasi oleh kendaraan pengangkut barang dengan rincian :

- **Mobil Barang Bak Terbuka:** Merupakan jumlah terbanyak dengan total **3.530 unit**.
- **Mobil Tangki:** Berada di posisi kedua dengan **804 unit**.
- **Mobil Barang Bak Tertutup:** Sebanyak **497 unit**.
- **Mobil Bus:** Terbagi menjadi Bus Sedang (169 unit), Bus Kecil (23 unit), dan Bus Besar (4 unit).
- **Lain-lain:** Terdapat masing-masing 4 unit untuk Mobil Penarik dan Kereta Tempelan.

Berdasarkan rincian kendaraan yang telah diuji, kualitas kelayakan kendaraan yang diuji menunjukkan hasil yang sangat positif diantaranya :

- **Lulus Uji:** Sebanyak **4.985 kendaraan** dinyatakan laik jalan.
- **Tidak Lulus Uji:** Hanya **50 kendaraan** yang dinyatakan tidak lulus selama setahun.
- **Tren Bulanan:** Bulan Juni mencatatkan angka ketidaklulusan tertinggi, yaitu sebanyak 17 kendaraan.
- **Volume Tertinggi:** Aktivitas pengujian paling padat terjadi pada bulan **Juni** dengan 485 kendaraan diuji dari total 561 kendaraan yang terdaftar.
- **Volume Terendah:** Aktivitas paling sedikit terjadi pada bulan **April**, di mana hanya 276 kendaraan yang melakukan pengujian.

Dari data tabel tersebut juga menunjukkan tren jumlah numpang uji dan mutasi uji yang cukup populer. Numpang uji terjadi ketika sebuah kendaraan melakukan pengujian fisik di daerah yang **bukan tempat asal** kendaraan tersebut terdaftar, tanpa berpindah kepemilikan atau domisili permanen.

- **Numpang Uji Masuk (Total 623):** Ini adalah kendaraan dengan plat nomor **luar Kabupaten Kotawaringin Timur** yang melakukan uji berkala di UPTD PKB Kotawaringin Timur. Biasanya terjadi karena kendaraan tersebut sedang beroperasi di wilayah Sampit dan sekitarnya, sehingga lebih efisien jika menguji di sana dengan membawa surat rekomendasi dari daerah asal.
- **Numpang Uji Keluar (Total 539):** Ini adalah kendaraan dengan plat nomor **Kotawaringin Timur (KH)**, namun melakukan uji fisik di daerah lain. Hal ini biasanya dikarenakan kendaraan tersebut sedang berada di luar kota untuk keperluan operasional jangka panjang.

Berbeda dengan numpang uji yang bersifat sementara, Mutasi Uji berkaitan dengan **perpindahan domisili administrasi** kendaraan secara permanen.

- **Mutasi Uji Masuk (Total 19):** Ini adalah kendaraan yang sebelumnya terdaftar di luar Kabupaten Kotawaringin Timur, kemudian pindah alamat dan mendaftarkan diri secara permanen sebagai kendaraan wajib uji di **UPTD PKB Kotawaringin Timur**. Kendaraan ini kini menjadi bagian dari data tetap (KBWU) Kotim.
- **Mutasi Uji Keluar (Total 44):** Ini adalah kendaraan yang sebelumnya terdaftar di Kotawaringin Timur, namun pindah domisili atau dijual ke luar daerah, sehingga data administrasinya dicabut dari Dishub Kotim dan dipindahkan ke Dishub kota tujuan.

Berdasarkan sumber data diatas, pencapaian kinerja pada indikator "Jumlah uji KIR angkutan umum / kendaraan wajib uji" di sajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 12 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Uji KIR Angkutan Umum /
Kendaraan Wajib Uji**

NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian	Kategori
1	Jumlah uji KIR angkutan umum / kendaraan wajib uji	kendaraan	11.008	5.618	51 %	Kurang
Capaian sasaran					51 %	

Hasil capaian kinerja untuk indikator Jumlah uji KIR angkutan umum / kendaraan wajib uji tersebut hanya menyentuh angka 51%. Merujuk pada standar interval penilaian yang berlaku, pencapaian ini diklasifikasikan ke dalam kategori **Kurang**, mengingat nilainya berada pada rentang 51% hingga 65%. Walaupun belum dapat memenuhi target indikator yang ditetapkan, berdasarkan data numpang uji menunjukkan bahwa fasilitas UPTD PKB Kotawaringin Timur dipercaya dan lokasinya strategis bagi kendaraan dari luar daerah dan data Mutasi Uji membantu dinas memantau populasi riil kendaraan wajib uji yang ada di wilayahnya, yang nantinya akan menentukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beban kerja petugas penguji.

IV. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus

Simpul transportasi yang terdiri dari pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus merupakan infrastruktur strategis yang menentukan tingkat konektivitas suatu wilayah. Keberadaan fasilitas ini berperan vital sebagai titik temu moda transportasi yang memfasilitasi pergerakan orang dan distribusi barang secara efisien. Indikator ini difokuskan pada pendataan dan pemetaan jumlah infrastruktur simpul transportasi yang tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah. Keberadaan pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus dipandang sebagai aset strategis daerah yang menentukan tingkat aksesibilitas masyarakat, terlepas dari pembagian wewenang pengelolaannya.

Pencapaian kinerja pada indikator "Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus" di sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian	Kategori
1	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	buah	5	5	100%	Baik
Capaian sasaran					100 %	

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel target dan realisasi, indikator ini menetapkan target sebanyak 5 buah fasilitas dan berhasil direalisasikan secara tepat sebanyak 5 buah, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Merujuk pada standar interval nilai yang berlaku, pencapaian tersebut menempatkan indikator ini serta capaian sasarnya ke dalam kategori **Baik**. Realisasi sejumlah 5 unit simpul transportasi ini mencakup seluruh infrastruktur strategis yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Meskipun pengelolaan secara operasional terbagi berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dan badan usaha, Dinas Perhubungan tetap melakukan pendataan dan koordinasi teknis guna memastikan fungsi simpul tersebut selaras dengan arah kebijakan transportasi daerah. Adapun rincian infrastruktur simpul transportasi yang tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 14 Rincian Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus
Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur**

No	Simpul Transportasi	Lokasi	Urusan Kewenangan SOTK
1.	Bandara H. Asan	Jl. Muchran Ali Sampit	UPT Ditjeb Ubud (Kemenhub)
2.	Pelabuhan Sampit	Jl. Jl. Usman Harun No. 2 Sampit	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit (UPT Kemenhub)
3.	Terminal Peti Kemas Bumiharjo Bagendang	Jl. H.M. Arsyad No.Km. 23, Bagendang Hulu, Kec. Mentaya Hilir Selatan	PT Pelindo Multi Terminal, KSOP Kelas III Sampit
4.	Terminal Patih Rumbih Sampit	Jl. M.T. Haryono	Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Timur
5.	Terminal Samuda	Jl. H.M. Arsyad, Kec. Mentaya Hilir Selatan	Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Timur

Berdasarkan tabel 3.14 diatas, meskipun seluruh infrastruktur tersebut berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Timur, secara fungsional terdapat pembagian urusan kewenangan pengelola sesuai dengan ketentuan SOTK yang berlaku. Simpul transportasi udara dan laut secara administratif berada di bawah kewenangan instansi vertikal (Kemenhub) dan Badan Usaha (Pelindo). Sementara itu, fokus manajemen operasional yang berada langsung di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi pengelolaan simpul transportasi darat, yakni Terminal Patih Rumbih dan Terminal Samuda. Pendataan seluruh simpul ini penting dilakukan sebagai landasan koordinasi lintas sektor guna menjamin konektivitas transportasi yang terpadu di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan sumber *website* resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Bandara H. Asan adalah satu-satunya fasilitas umum untuk pelayanan angkutan transportasi udara yang ada di wilayah Kotawaringin Timur dan dikelola dan diawasi oleh UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Rute Penerbangan melalui Bandar Udara H. Asan Sampit di Kab.Kotim pada tahun 2025 hanya dilayani oleh 1 Armada yakni PT. NAM AIR dengan Rute Layanan Sampit – Jakarta PP (Layanan Penerbangan Terjadwal Setiap Hari), Sampit – Surabaya PP (Layanan Penerbangan 4 Kali dalam 1

Minggu), dan Sampit – Semarang PP (layanana Penerbangan 3 Kali dalam 1 Minggu).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Beranda Profil Informasi Publik Regulasi Aplikasi Layanan Online Perencanaan

Pengertian, Peran & Fungsi Hierarki & Klasifikasi Daftar Bandar Udara

Show 10 entries Search: kalimantan tengah

ICAO	IATA	Nama Bandar Udara	Provinsi	Kabupaten	Penggunaan	Kelas	Pengelola	TKBN	#
WAGI	PKN	ISKANDAR	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	Domestik	Kelas II	UPT Ditjen Hubud	Ya	Detail
WAGS	SMQ	H. ASAN	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	Domestik	Kelas II	UPT Ditjen Hubud	Ya	Detail

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Beranda Profil Informasi Publik Regulasi Aplikasi Layanan Online

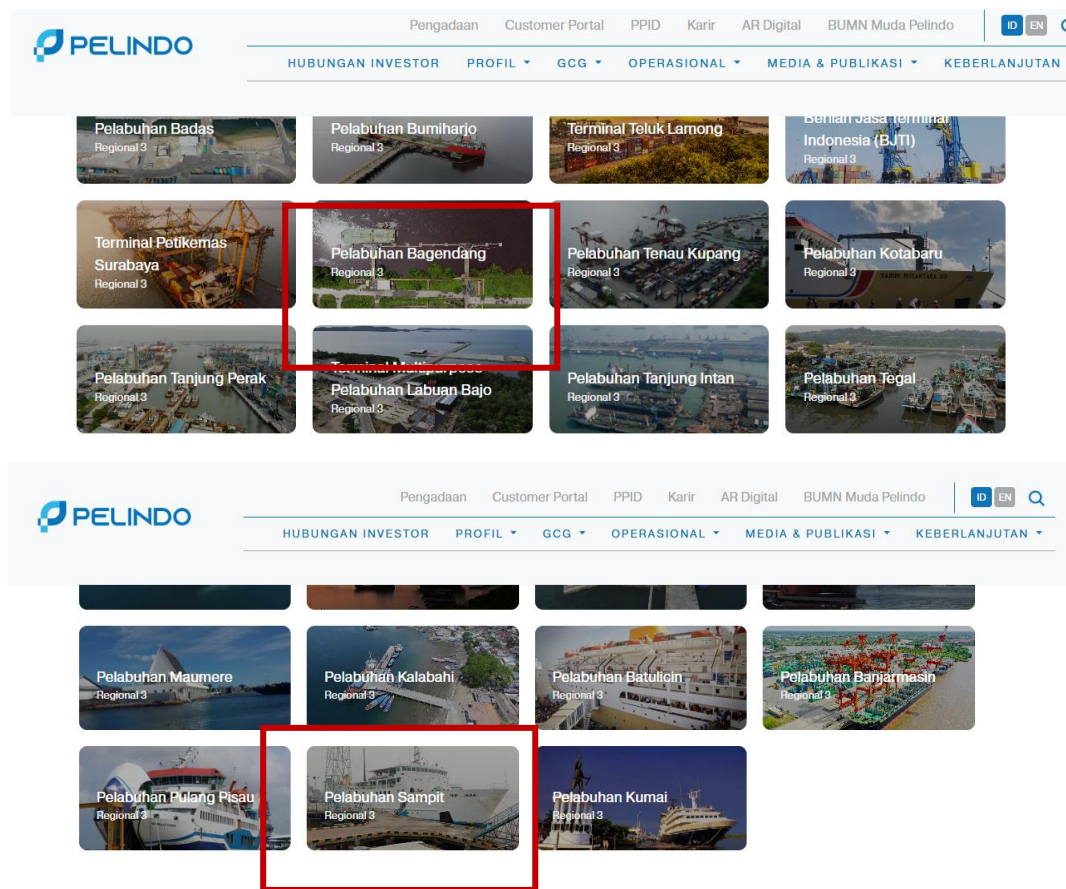
Rute Domestik

Keberangkatan	: H. ASAN
Kedatangan	: SOEKARNO HATTA
Maskapai	: Nam Air
Tipe Pesawat	: B735
Frekuensi Perminggu	: 7
Keberangkatan	: H. ASAN
Kedatangan	: JUANDA
Maskapai	: Nam Air
Tipe Pesawat	: B735
Frekuensi Perminggu	: 4
Keberangkatan	: H. ASAN
Kedatangan	: JENDERAL AHMAD YANI
Maskapai	: Nam Air
Tipe Pesawat	: B735
Frekuensi Perminggu	: 3

Sumber data : *Website Resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Keberadaan fasilitas untuk layanan angkutan transportasi laut didukung oleh adanya pelabuhan. Keberadaan pelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki peran strategis sebagai infrastruktur kunci dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan konektivitas secara ekonomi. Sebagai pintu gerbang utama arus barang, pelabuhan tidak hanya menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak industri daerah yang menghubungkan potensi lokal dengan jaringan perdagangan nasional. Di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 2 (dua) pelabuhan, yaitu pelabuhan Sampit dan pelabuhan Bagendang. Pelabuhan Sampit melayani kedatangan dan

keberangkatan khusus penumpang dari dan atau menuju rute yang ditetapkan, sedangkan pelabuhan bagendang melayani bongkar muat peti kemas, *general cargo*, dan curah kering untuk menunjang logistik serta mengurangi kepadatan di Pelabuhan Sampit. Sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, kewenangan pelabuhan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit dan dikelola secara operasional oleh badan usaha yaitu PT. Pelindo Sampit.



Gambar 3. 11 Pelabuhan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber data : *Website* Resmi Pelindo Wilayah Kerja Regional 3

V. Persentase layanan angkutan darat

Efektivitas pelayanan transportasi darat sangat bergantung pada proporsi antara sarana angkutan yang tersedia dengan volume penumpang yang dilayani. Melalui rumus perbandingan antara jumlah unit angkutan yang beroperasi dengan total jumlah penumpang, indikator ini memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kecukupan layanan transportasi di lapangan. Selain itu, sinergi antara jumlah unit angkutan dan arus penumpang menghasilkan nilai capaian kinerja yang menjadi standar pelayanan minimal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal

ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kepastian layanan tanpa harus mengalami penumpukan akibat keterbatasan armada sehingga efisiensi sebaran angkutan dalam melayani mobilitas warga akan terlihat.

Pencapaian indikator ini didasarkan pada rumus perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun rumus tersebut dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Persentase layanan angkutan darat} = \frac{\text{Jumlah unit armada/kendaraan}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah unit armada/kendaraan menjadi pembilang dan jumlah penumpang angkutan darat menjadi penyebut dalam rumus tersebut. Diperlukan data yang riil dan akurat untuk mengisi angka jumlah kendaraan dan panjang jalan tersebut.


PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD TERMINAL PATIH RUMBILH
JL. MT. Haryono No. 17 SAMPIT, Kalimantan Tengah
Laman <https://dishub.kotimkab.go.id>, Pos-el dishub@kotimkab.go.id

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

LAPORAN TAHUNAN : Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025
 JENIS TRAYEK : 1. Antar Kota dalam Provinsi (AKDP)
 : 2. Pedesaan

No.	TRAYEK / TRANSIT	JENIS KENDARAAN	PERUSAHAAN PT / PO / PERUM	JUMLAH ARMADA	JUMLAH PENUMPANG			KET
					TURUN	NAIK	TRANSIT	
1.	Pangkalan Bun - Sampit - P. Raya PP	Bus	LOGOS	1,445	3,722	4038	30,356	
2.	Pangkalan Bun - Sampit - P. Raya PP	Bus	YESSOE	2,428	9,644	8,572	49,349	
3.	Pangkalan Bun - Sampit - P. Raya PP	Bus	AGUNG MULYA	828	1,302	1,672	18,806	
4.	Pangkalan Bun - Sampit - P. Raya PP	Bus	DAMRI	557	1,150	1,606	9,231	
5.	P. Raya - Sampit - Lamandau PP	Bus	DAMRI	708	1,119	1,376	13,576	
6.	Sampit -Ujung Pandaran PP	Bus	DAMRI	301	3,859	3,859	-	
6.	Sampit - Parenggean PP	Bus	DAMRI	103	2,424	2,424	-	
JUMLAH				6,459	24,217	24,544	121,318	
RATA - RATA PER BULAN				538	2,018	2,045	10,110	

Sampit, 05 Januari 2026
 Kepala UPTD Terminal Patih Rumbilh

JOHNNIE EREFADIEYAN NOOR, S.E.
 Penata (III/d)
 NIP. 197206032006041017

Gambar 3. 12 Laporan Realisasi Angkutan Penumpang Umum Tahun 2025
UPTD Terminal Patih Rumbilh

Jumlah unit armada/kendaraan adalah jumlah unit angkutan umum yang berhenti atau berada di UPTD Terminal Patih Rumbilh untuk mengangkut penumpang. Menurut data UPTD Terminal Patih Rumbilh tahun 2025 yang telah dilaporkan, jumlah armada angkutan umum di terminal sebanyak 6.459 unit.

Adapun untuk data jumlah penumpang angkutan darat yang dilaporkan berdasarkan data UPTD Terminal Patih Rumbih, jumlah penumpang yang turun, naik, dan/atau transit di UPTD Terminal Patih Rumbih sejumlah 170.079 orang.

Berdasarkan angka yang sudah didapatkan dan dituangkan ke dalam rumus perhitungan, maka didapatkan :

$$\begin{aligned}\text{Persentase layanan angkutan darat} &= \frac{\text{Jumlah unit armada/kendaraan}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\% \\ &= \frac{6.459 \text{ kendaraan}}{170.079 \text{ orang}} \\ &= 3,79\%\end{aligned}$$

Pencapaian kinerja pada indikator "Persentase layanan angkutan darat" di sajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 15 Target dan Realisasi Indikator
Persentase Layanan Angkutan Darat**

NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian	Kategori
1	Persentase layanan angkutan darat	%	48	3,79%	7,89%	Sangat Kurang
Capaian sasaran					7,89%	

Sumber : Pelaporan IKU TW IV Sub Bagian Umum dan Pelaporan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan data laporan kinerja yang disajikan, indikator Persentase Layanan Angkutan Darat menunjukkan hasil belum memenuhi capaian dengan kategori sangat kurang. Terdapat jarak yang sangat signifikan dengan selisih 40,11% antara target yang direncanakan (48%) dengan kenyataan di lapangan (3,79%).

VI. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) merupakan kendaraan bermotor tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melalui proses uji berkala (uji KIR) demi memastikan keamanan dan kelayakan jalan. Pada indikator ini difokuskan untuk mengetahui tingkat kepemilikan KIR dari daftar KBWU yang aktif semua jenis kendaraan yang terdaftar. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan penumpang serta memastikan bahwa seluruh angkutan komersial yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki legalitas teknis yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Indikator Kepemilikan

KIR Angkutan Umum/Kendaraan Wajib Uji mencerminkan tingkat kepatuhan pemilik armada terhadap standar keselamatan transportasi darat dari Seluruh Kendaraan Wajib Uji yang aktif di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan uji KIR kendaraannya. Dengan memastikan setiap kendaraan memiliki izin KIR yang aktif, Dinas Perhubungan berupaya meminimalisir potensi kecelakaan akibat faktor teknis sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat ataupun pengguna jasa angkutan umum di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pencapaian indikator ini didasarkan pada rumus perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun rumus tersebut dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kepemilikan KIR angkutan umum} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum}}{\text{Jumlah angkutan umum tahun } n} \times 100\%$$

Adapun angka dalam pembilang rumus tersebut adalah jumlah kepemilikan KIR angkutan umum dan penyebutnya adalah jumlah angkutan umum tahun-n. Adapun laporan realisasi IKU Jumlah Uji KIR Kendaraan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jalan Jenderal Sudirman Km 6 Sampit, Kalimantan Tengah Kode Pos 74322
Telepon (0531) 21200 Faksimile (0531) 2035565
Laman <https://dishub.kotimkab.go.id> Pos-el dishub@kotimkab.go.id

LAPORAN REALISASI IKU JUMLAH UJI KIR KENDARAAN WAJIB UJI
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2025

LAPORAN TAHUNAN : Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025

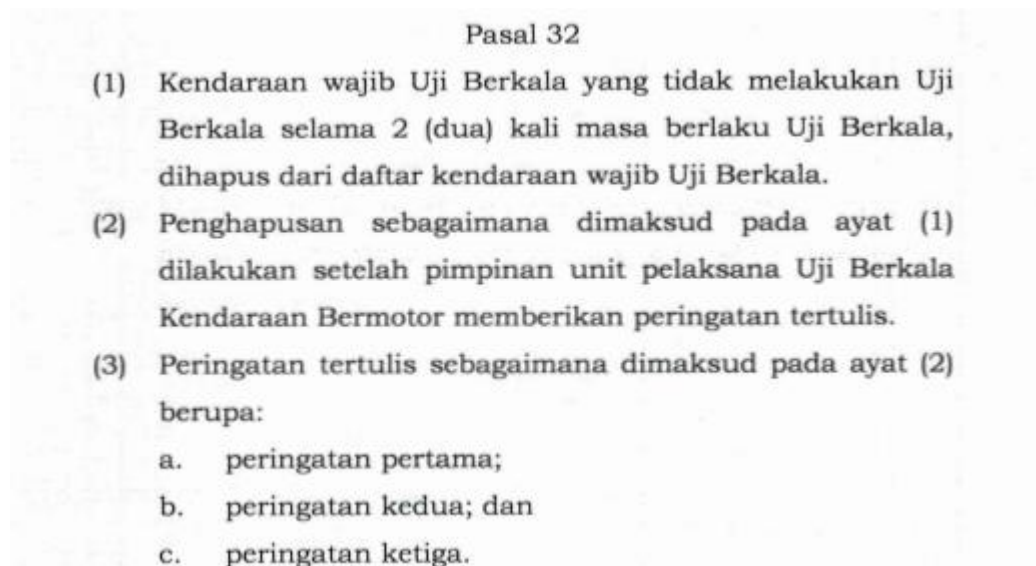
No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JUMLAH ANGKUTAN UMUM / KEPEMILIKAN KIR	REALISASI KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM / KENDARAAN WAJIB UJI TAHUN 2025				KET
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman, nyaman, dan mencukupi	Kepemilikan KIR Angkutan Umum / Kendaraan Wajib Uji	25%	5.692	1.404	1.343	1.486	1.385	Data Acuan Jumlah Angkutan Umum/Kepemilikan KIR diambil berdasarkan Jumlah KBWU aktif tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021
		JUMLAH		5.692	1.404	1.343	1.486	1.385	
		TOTAL KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM/KENDARAAN WAJIB UJI TW I-IV 2025			5.618				
		Total Angkutan Umum / Kendaraan Wajib Uji Yang Tidak Memiliki KIR 2025			74				
		% Kepatuhan Kepemilikan KIR Angkutan Umum / Kendaraan Wajib Uji Tahun 2025			98,70 %				
		% Ketidaktepatan Kepemilikan KIR Angkutan Umum / Kendaraan Wajib Uji Tahun 2025			1,30 %				

Sampit, 05 Januari 2026
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

MUSTAKIM, S.H., M.A.P.
Penata (III/c)
NIP. 198712142010011002

Gambar 3. 13 Laporan Realisasi IKU Jumlah Uji KIR Kendaraan Wajib Uji UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2025

Berdasarkan sumber laporan realisasi dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, indikator pembilang diambil dari data jumlah kendaraan yang melaksanakan uji KIR Tahun 2025 yaitu 5.618 kendaraan. Untuk indikator penyebut didapatkan dari angka jumlah angkutan umum/kepemilikan KIR tahun-n yang mana angka ini diambil dari daftar KBWU aktif di tahun 2024 karena sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 apabila terdapat kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala kendaraannya, maka akan dilaksanakan penghapusan dari daftar kendaraan wajib uji berkala. Oleh karena itu, Daftar Kendaraan Wajib Uji diambil dari data Kendaraan yang telah melaksanakan Uji KIR 1 tahun terakhir.



Gambar 3. 14 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan angka yang sudah didapatkan dan dituangkan ke dalam rumus perhitungan, maka didapatkan :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum} &= \frac{\text{Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum}}{\text{Jumlah angkutan umum tahun 2025}} \times 100\% \\ &= \frac{5618}{5692} \times 100\% \\ &= 98,70\%\end{aligned}$$

Pencapaian kinerja pada indikator "Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji" di sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Target dan Realisasi Indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum/Kendaraan Wajib Uji

NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian	Kategori
1	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji	%	25	98,70%	394,8%	Istimewa
Capaian sasaran					394,8%	

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel pencapaian kinerja, indikator Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dari Kendaraan Wajib Uji menunjukkan hasil yang memuaskan. Dengan target yang ditetapkan sebesar 25% dari target jumlah uji KIR wajib uji, realisasi di lapangan mampu mencapai angka 98,70% yang menunjukkan bahwa tingginya kepatuhan pemilik Angkutan umum/kendaraan wajib untuk melaksanakan uji KIR di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

VII. Rasio panjang jalan jumlah kendaraan

Dalam upaya mewujudkan arus lalu lintas yang lancar dan tertib, diperlukan keselarasan antara daya tampung jalan dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan indikator penting untuk mengukur keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dengan beban arus lalu lintas yang ada. Indikator ini menggambarkan seberapa memadai kapasitas jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menampung volume kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya dan memprediksi risiko kemacetan di titik-titik strategis.

Untuk mengetahui nilai rasio panjang jalan, terdapat rumus yang ditetapkan. Adapun rumus tersebut dijabarkan sebagai berikut:

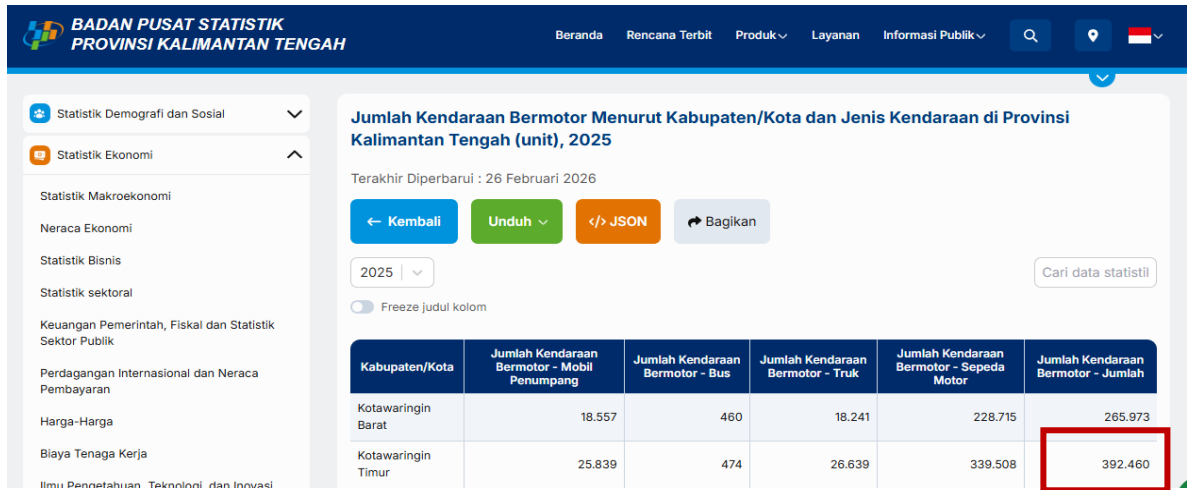
Rasio panjang jalan jumlah kendaraan

$$= \frac{\text{Jumlah kendaraan tahun 2025}}{\text{Panjang jalan Kabupaten /Kota}}$$

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah kendaraan menjadi pembilang dan panjang jalan kabupaten/kota menjadi penyebut dalam rumus tersebut. Diperlukan

data yang riil dan akurat untuk mengisi angka jumlah kendaraan dan panjang jalan tersebut.

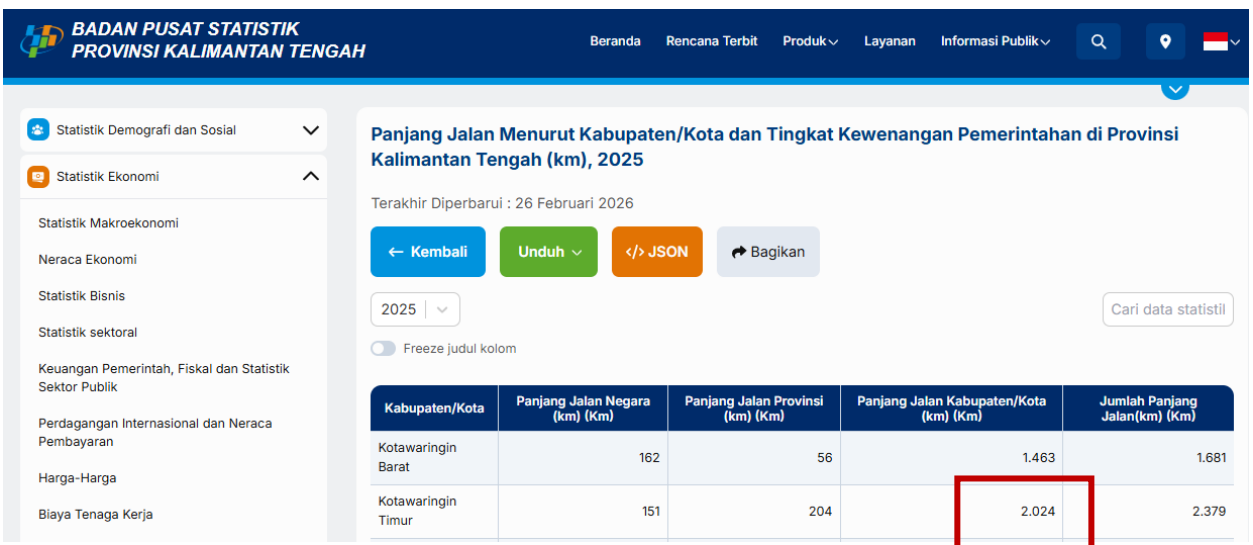
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebanyak **392.460 kendaraan** yang terdiri dari 25.839 mobil penumpang, 474 bus, dan 339.508 sepeda motor.



Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus	Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk	Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah
Kotawaringin Barat	18.557	460	18.241	228.715	265.973
Kotawaringin Timur	25.839	474	26.639	339.508	392.460

Gambar 3. 15 Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber data : *Website* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

Adapun untuk penyebut “panjang jalan kabupaten/kota” menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur, Panjang jalan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sepanjang **2.024 km**.



Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Negara (km) (Km)	Panjang Jalan Provinsi (km) (Km)	Panjang Jalan Kabupaten/Kota (km) (Km)	Jumlah Panjang Jalan (km) (Km)
Kotawaringin Barat	162	56	1.463	1.681
Kotawaringin Timur	151	204	2.024	2.379

Gambar 3. 16 Data panjang jalan kabupaten/kota
Sumber data : *Website* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2025

NO.	NO. KAB/ KOTA	NOMOR RUAS	NAMA RUAS JALAN	STATUS JALAN	TITIK PENGENAL PANGKAL	TITIK PENGENAL UJUNG	PANJANG RUAS KM	KETERANGAN (LOKASI) (KECAMATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	62	772	DESA TUMBANG BATU - JALAN POROS BCT	LOKAL PRIMER	SUNGAI TUMBANG BATU	POROS BCT	1,000	BUKIT SANTIAI
773	62	773	TUMBANG. SAPTA - TUMBANG. BATU	LOKAL PRIMER	KANTOR DESA	KANTOR DESA	1,300	BUKIT SANTIAI
774	62	774	TUMBANG. SAPTA - TUMBANG. PANYAHUAN	LOKAL PRIMER	DERMAGA	SIMP. TEG. PANYAHUAN-KANIA	1,000	BUKIT SANTIAI
775	62	775	TUMBANG BATU - TUMBANG PANYAHUAN	LOKAL PRIMER	KANTOR DESA	JEMBATAN PANYAHUAN	15,000	BUKIT SANTIAI
776	62	776	TUMBANG PANYAHUAN - TUMBANG KANIA (EKS. SARPATIM)	LOKAL PRIMER	JEMBATAN SEKUTU	KANTOR DESA	22,000	BUKIT SANTIAI
JUMLAH PANJANG JALAN							2.024,000	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

tttd

SUPIAN HADI

Gambar 3. 17 Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/541/Huk-DPU/2014 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan di Desa/Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan angka yang sudah didapatkan dan dituangkan ke dalam rumus perhitungan, maka didapatkan :

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio panjang jalan jumlah kendaraan} &= \frac{\text{Jumlah kendaraan tahun 2025}}{\text{Panjang jalan Kabupaten /Kota}} \\
 &= \frac{392.460 \text{ kendaraan}}{2.024 \text{ km}} \\
 &= 194
 \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja pada indikator “Rasio panjang jalan jumlah kendaraan” disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Target dan Realisasi Indikator Rasio Panjang Jalan Jumlah Kendaraan

NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian	Kategori
1	Rasio panjang jalan jumlah kendaraan	rasio	196	194	98,97%	Baik
Capaian sasaran					98,97%	

Sumber : Pelaporan IKU TW IV Sub Bagian Umum dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel target dan realisasi kinerja, indikator Rasio Panjang Jalan Jumlah Kendaraan menunjukkan hasil pencapaian yang optimal dan hampir mencapai target 100%. Indikator ini menetapkan target rasio sebesar 196 dan berhasil direalisasikan pada angka 194. Sesuai dengan standar

kriteria penilaian yang ditetapkan, pencapaian sempurna ini menempatkan indikator tersebut dalam kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur jalan dengan volume kendaraan di wilayah tersebut masih terpenuhi sesuai dengan target perencanaan dan tidak mengindikasikan adanya kepadatan volume kendaraan.

VIII. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

Dalam upaya mewujudkan sistem transportasi yang andal dan mencukupi, monitoring terhadap volume muatan orang dan barang menjadi sangat krusial. Indikator **Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum** merupakan parameter dalam mengukur tingkat produktivitas dan pemanfaatan moda transportasi publik di Kabupaten Kotawaringin Timur baik moda darat, laut dan udara. Melalui indikator ini, Dinas Perhubungan memantau efektivitas layanan angkutan dalam memfasilitasi penumpang antar wilayah. Angka capaian yang dihasilkan mencerminkan sejauh mana sektor transportasi darat mampu memenuhi permintaan pasar dan mendukung konektivitas ekonomi daerah.

Pencapaian kinerja pada indikator "Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan umum" di sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Target dan Realisasi Indikator Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum

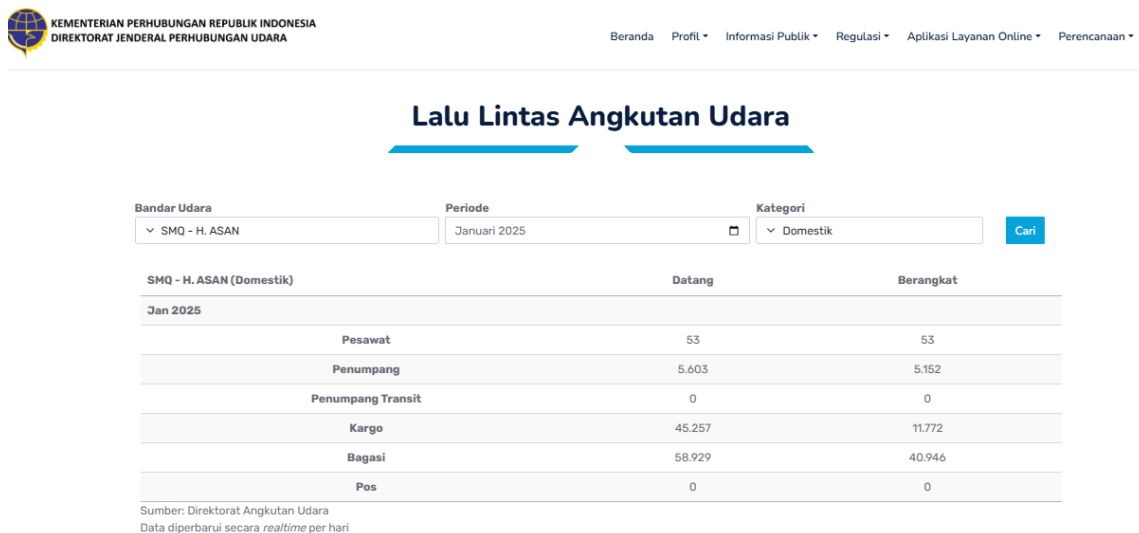
NO	Indikator kinerja	Satuan	target	Realisasi	capaian	Kategori
1	Jumlah orang /barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ barang	485.000	708.504	146,15%	Istimewa
Capaian sasaran					146,15%	

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel target dan realisasi kinerja, indikator Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum mencatatkan realisasi sebesar 708.504 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 485.000 orang/barang. Adapun rincian jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi darat, laut dan udara selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Rincian Data Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum

No	Moda Transportasi Angkutan Umum	Jumlah Penumpang	Sumber Data
1.	Udara (Pesawat)	133.136	Direktorat Angkutan Udara
2.	Sungai, Danau, dan Penyebrangan (kapal, ferry)	405.289	UPTD Dermaga
3.	Darat (Angkutan Bus)	170.079	UPTD Terminal Patih Rumbih
Total Orang yang terangkut Angkutan Umum		708.504	

Data jumlah penumpang pesawat udara diambil dari *website* resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang dipublikasikan secara realtime sehingga data yang diberikan akurat dan terbaru.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Beranda Profil Informasi Publik Regulasi Aplikasi Layanan Online Perencanaan

Lalu Lintas Angkutan Udara

Bandar Udara: SMQ - H. ASAN
Periode: Januari 2025
Kategori: Domestik
Cari

SMQ - H. ASAN (Domestik)	Datang	Berangkat
Jan 2025		
Pesawat	53	53
Penumpang	5.603	5.152
Penumpang Transit	0	0
Kargo	45.257	11.772
Bagasi	58.929	40.946
Pos	0	0

Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari

Gambar 3. 18 Tampilan Data Statistik Jumlah Penumpang Bulan Januari 2025 di *Website* Direktorat Jenderal Perhubungan Kemenhub RI

Perhitungan jumlah penumpang melalui bandar udara H. Asan Sampit adalah jumlah penumpang datang ditambah dengan jumlah penumpang berangkat.

Adapun rincian jumlah penumpang pesawat yang datang dan berangkat dari dan menuju sampit adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 20 Rincian Jumlah Penumpang Pesawat Udara Melalui Bandara H. Asan
Sampit Tahun 2025**

No	Bulan Laporan	Jumlah penumpang datang	Jumlah Penumpang berangkat	Total
1.	Januari	5.603	5.152	10.755
2.	Februari	5.015	4.712	9.727
3.	Maret	4.501	5.940	10.441
4.	April	7.119	5.632	12.751
5.	Mei	5.014	4.471	9.485
6.	Juni	6.023	6.831	12.854
7.	Juli	6.294	5.634	11.928
8.	Agustus	5.037	5.400	10.437
9.	September	5.542	5.183	10.725
10.	Oktober	5.553	5.572	11.125
11.	November	5.447	5.045	10.492
12.	Desember	5.931	6.485	12.416
Total				133.136

Sumber data : *Website* Lalu Lintas Angkutan Udara
Direktorat Jenderal Perhubungan Kemenhub RI, 2025

Berdasarkan tabel diatas, data Jumlah penumpang pesawat Tahun 2025 yang melewati Bandara H. Asan adalah 133.136 orang.

Adapun untuk data jumlah penumpang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan sebanyak 405.289 orang yang tercatat berdasarkan Laporan Kepala UPTD Dermaga tentang Kepadatan Lalu Lintas Angkutan Barang dan Penumpang dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD DERMAGA

Jl. J. Usman Harun No.1, Sampit, Kalimantan Tengah
Laman <https://dishub.kotimkab.go.id>, Pos-el dishub@kotimkab.go.id

LAPORAN KEPADATAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANG
UPTD DERMAGA TAHUN 2025

JENIS ARUS : KEBERANGKATAN
PERIODE LAPORAN : JANUARI S.D. DESEMBER 2025

NO	BULAN	D. HABARING HURUNG		AGEN	DERMAGA EXIS IN-HUTANI						D. HABARING HURUNG		AGEN	KETERANGAN / TOTAL KESELURUHAN
		Kapal		Kapal	FERRY PENYEBERANGAN						Penumpang (Brig (Ton))		AGEN	
		Taxi Terantang	Kapal Barang	Taxi Pegatan	LCT. DIAN MANDIRI I			KM AKBAR II			Taxi Terantang	Kapal Barang	Taxi Pegatan	
					ferry	Orang	Roda 2	Ferry	Orang	Roda 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	JANUARI	92	10	215	403	7.684	5.498	403	7.579	5.414	290	40	2.014	Jumlah Kapal : 13.180
2	PEBRUARI	82	10	185	345	6.894	4.791	371	7.291	5.289	253	70	1.298	Jumlah Penumpang : 204.851
3	MARET	108	10	353	393	7.735	5.578	393	7.622	5.476	389	63	3.903	Jumlah R 2 : 128.841
4	APRIL	76	10	170	393	7.653	5.516	393	7.592	5.462	272	60	1.405	Jumlah Barang : 734
5	MEI	89	10	165	404	7.656	5.480	404	7.721	5.503	300	65	1.298	
6	JUNI	91	9	184	384	7.300	5.200	395	7.440	5.330	314	65	1.730	
7	JULI	88	10	242	408	7.945	5.731	381	7.232	5.156	287	56	2.243	
8	AGUSTUS	85	9	173	398	7.683	5.593	406	7.807	5.606	321	66	1.323	
9	SEPTEMBER	92	9	239	390	7.441	5.333	390	7.425	5.310	298	63	2.076	
10	OKTOBER	93	10	232	279	5.522	3.999	433	6.906	6.687	310	49	2.030	
11	NOVEMBER	84	8	197	399	8.434	6.347	274	5.345	3.898	301	66	1.605	
12	DESEMBER	98	9	260	346	7.698	5.760	307	6.520	4.886	328	65	2.381	
	Jumlah	1.078	114	2.596	4.542	69.404	64.824	4.550	88.480	64.017	3.681	734	23.306	



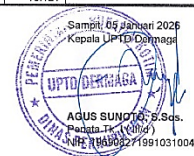
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD DERMAGA

Jl. J. Usman Harun No.1, Sampit, Kalimantan Tengah
Laman <https://dishub.kotimkab.go.id>, Pos-el dishub@kotimkab.go.id

LAPORAN KEPADATAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANG
UPTD DERMAGA TAHUN 2025

JENIS ARUS : KEDATANGAN
PERIODE LAPORAN : JANUARI S.D. DESEMBER 2025

NO	BULAN	D. HABARING HURUNG		AGEN	DERMAGA SERANAU						D. HABARING HURUNG		AGEN	KETERANGAN / TOTAL KESELURUHAN
		Kapal			FERRY PENYEBERANGAN						Penumpang (Brg / Ton)			
		Taxi Terantang	Kapal Barang		Taxi Pegatan	LCT DIAN MANDIRI I		KM. AKBAR II		Taxi Terantang	Kapal Barang			
						ferry	Orang	Roda 2	Ferry			Orang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	JANUARI	92	10	198	403	7.685	5.508	403	7.585	5.453	303	40	1.430	Jumlah Kapal : 13.101
2	PEBRUARI	82	10	169	344	6.717	4.345	371	7.302	5.309	270	45	1.094	Jumlah Penumpang : 200.438
3	MARET	108	10	289	393	7.651	5.499	393	7.615	5.505	402	33	2.161	Jumlah R 2 : 129.263
4	APRIL	76	10	227	393	7.669	5.517	393	7.668	5.519	276	44	2.002	Jumlah Barang : 436
5	MEI	89	10	163	404	7.741	5.545	404	7.766	5.499	305	36	1.094	
6	JUNI	91	9	178	384	7.261	5.179	395	7.395	5.298	315	22	1.336	
7	JULI	89	10	237	408	8.055	5.817	381	7.308	5.218	303	32	1.719	
8	AGUSTUS	87	9	162	398	7.732	5.532	406	7.869	5.647	333	41	1.048	
9	SEPTEMBER	92	9	226	390	7.459	5.333	390	7.418	5.305	290	30	1.525	
10	OKTOBER	93	10	222	278	5.478	3.973	433	6.939	6.728	318	36	1.585	
11	NOPEMBER	84	8	194	397	8.364	6.313	278	5.518	3.993	322	34	1.307	
12	DESEMBER	98	9	246	347	7.898	5.935	306	6.439	4.793	347	43	1.820	
	TOTAL	1.081	114	2.511	4.539	88.710	64.966	4.551	88.823	64.287	3.784	436	18.121	



Gambar 3. 19 Laporan Kepadatan Lalu Lintas Angkutan Barang dan Penumpang
UPTD Dermaga Tahun 2025

Adapun rincian arus keberangkatan dari sampit dan arus kedatangan menuju sampit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Rincian Jumlah Penumpang Melalui Angkutan Sungai, Danau, dan
Penyebrangan

No.	Jenis Arus	Jumlah Penumpang (orang)
1.	Keberangkatan	204.851

2.	Kedatangan	200.438
Total Jumlah Penumpang Kapal		405.289

Data jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyebrangan Tahun 2025 yang melewati Dermaga Sampit adalah 405.289 orang.

Hasil ini menunjukkan persentase capaian kinerja sebesar 146,15% Merujuk pada standar interval nilai realisasi kerja, pencapaian tersebut menempatkan indikator ini ke dalam kategori Istimewa, karena berada telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

C. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian

Analisis perbandingan antara target, realisasi, dan capaian kinerja tahun ini terhadap tahun sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika fluktuasi kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Hal ini bertujuan sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi adanya peningkatan atau penurunan produktivitas (tren kinerja), serta memetakan keberhasilan strategi yang telah diimplementasikan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur secara berkelanjutan. Sebagai rincian atas analisis tersebut, berikut disajikan tabel yang memuat perbandingan data Target, Realisasi, dan Capaian dibandingkan dengan capaian tahun lalu:

Tabel 3. 22 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024~2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	750	652	86%	800	4.279	534,87 %
		Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	102	213,7%	46,7%	92	194	210,8%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	63.800	62.320	98%	65.200	170.079	260,8 %
		Rasio ijin Trayek	0,0000329	0,0000329	100%	0,0000329	0,0000326	99,08%
		Jumlah uji KIR angkutan	10.384	5.692	54,8%	11.008	5.618	51%

		Umum/kendaraan wajib uji						
		Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	5	5	100%	5	5	100%
		Persentase layanan angkutan darat	45%	43%	95%	48%	3,79%	7,89%
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji	23%	54%	234%	25%	98,70%	394,8 %
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	186	186	100%	196	194	98,97 %
		Jumlah orang barang melalui Dermaga/bandara/terminal pertahun	480.000	468.944	98%	485.000	708.504	146,15%

Berdasarkan data pada tabel perbandingan kinerja tahun 2024 dan 2025, berikut adalah analisis singkat untuk masing-masing indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur:

- Pemasangan Rambu-Rambu dan Perlengkapan Jalan: Indikator ini menunjukkan tren positif dengan kenaikan persentase capaian dari 86% di tahun 2024 menjadi 534,87% di tahun 2025.
- Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas : Indikator ini menunjukkan bahwa instansi dinas perhubungan kab. Kotawaringin Timur masih belum bisa mencapai target baik dari tahun 2024 maupun tahun 2025. Namun persentase capaian mengalami penurunan dari 213,7% di tahun 2024 menjadi 210,8% di tahun 2025.
- Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum: Indikator ini mencatatkan jumlah arus penumpang angkutan umum yang tinggi (**kategori Istimewa**). Pada tahun 2024, capaian berada di angka 98%. Sedangkan pada tahun 2025, terjadi

lonjakan arus penumpang hingga mencapai **170.079** orang dari target 65.200, sehingga persentase capaian menjadi **260,8%**.

- Rasio Izin Trayek: menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi dalam menjaga legalitas izin armada. Pada tahun 2024, indikator ini mencapai target sempurna **100%**. Sementara pada tahun 2025, realisasi tetap terjaga dengan sangat baik di angka **99,08%** (0,0000326 dari target 0,0000329). Kestabilan rasio ini membuktikan bahwa pelayanan perizinan trayek berjalan efektif dan seimbang dengan jumlah penumpang yang dilayani.
- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus: Fasilitas infrastruktur utama ini berhasil dipertahankan secara optimal dengan realisasi 5 unit dari target 5 unit (100%) pada tahun 2024 maupun 2025.
- Persentase Layanan Angkutan Darat: Terdapat penurunan persentase capaian layanan angkutan darat dari angka 43% menjadi 7,89% di tahun 2025.
- Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum: Terdapat peningkatan persentase realisasi kepemilikan KIR angkutan umum **di tahun 2025 sebesar 98,07%** dari tahun 2024 sebesar 54%. Hal ini menandakan terdapat peningkatan capaian sebesar 160,8%.
- Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan: Terdapat peningkatan kapasitas pada tahun 2025. Pada tahun 2024, rasio ini tercapai 100% dengan angka 186. Pada tahun 2025, target ditingkatkan menjadi 196 dan berhasil direalisasikan di angka **194 (98,97%)**. Capaian yang mendekati 100% ini menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur masih sangat memadai untuk menampung volume kendaraan yang ada.
- Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal: Indikator ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari capaian 98% di tahun 2024 menjadi 146,15% di tahun 2025. Peningkatan realisasi dari 468.944 menjadi **708.504 orang** ini menempatkan indikator tersebut dalam kategori Istimewa dan yang menandakan tingginya minat masyarakat terhadap transportasi umum.

D. Tingkat Kemajuan Capaian Realisasi dan Capaian Terhadap Sasaran Strategis (Renstra 2021-2026)

Analisis pada bagian ini berfokus pada perbandingan antara realisasi kinerja yang telah dicapai hingga tahun berjalan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Maksud dari perbandingan ini adalah untuk mengukur sejauh mana kemajuan atau progres

capaian Dinas Perhubungan dalam memenuhi janji kinerja jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Dengan mengevaluasi perbandingan ini, organisasi dapat mengidentifikasi sisa target yang harus diselesaikan di masa mendatang serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap berada di jalur yang benar demi mewujudkan visi dan misi yang telah direncanakan secara berkelanjutan. Uraian data tingkat kemajuan capaian realisasi dan capaian terhadap sasaran strategis (renstra 2021-2026) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 23 Tingkat Kemajuan Capaian Realisasi Dan Capaian Terhadap Sasaran Strategis (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = $\frac{4}{5} \times 100\%$)
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	4.279	850	503,4%
		Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	194	83	233,7%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	170.079	67.000	253,8%
		Rasio ijin Trayek	0,0000326	0,0000329	99,08%
		Jumlah uji KIR angkutan Umum/kendaraan wajib uji	5.618	11.668	48%
		Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	5	5	100%
		Persentase layanan angkutan darat	3,79%%	50%	7,58%
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kndaraan wajib uji	98,70%%	27%	365,5%
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	194	206	94,17%
		Jumlah orang barang melalui	708.504	490.000	144,5%

		Dermaga/bandara/terminal pertahun			
--	--	--------------------------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan penjabaran sebagai berikut :

- Indikator Pemasangan rambu-rambu dan perlengkapan jalan telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, yakni mencapai 533% dari target Renstra. Dengan realisasi 4.279 unit dari target akhir 850 unit, sasaran ini telah tercapai sepenuhnya pada target 2026.
- Indikator penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya masih cukup jauh dari target yang ditetapkan yaitu masih di progres angka 233,7%. Jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tinggi dari target yang diharapkan mengalami penurunan.
- Progres Jumlah arus penumpang angkutan umum sudah menyentuh angka 90,6% (170.079 dari target 67.000 penumpang sampai di target akhir tahun 2026).
- Persentase kepemilikan KIR menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan dengan tingkat kemajuan mencapai 365,5%, yang berarti telah melampaui target akhir 2026 sebesar 27%. Namun, untuk Jumlah uji KIR secara fisik, tingkat kemajuannya baru mencapai 48% dari target akhir 11.668 kendaraan. Ini menjadi area yang memerlukan percepatan di sisa periode perencanaan.
- Indikator dan Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal telah mencatatkan tingkat kemajuan sempurna sebesar 100% terhadap target Renstra. Artinya, target penyediaan infrastruktur pokok ini sudah terpenuhi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan.
- Indikator rasio izin trayek telah mencatatkan tingkat kemajuan sebesar 99,08% terhadap target Renstra. Hal ini menandakan masih terdapat 0,92% capaian kemajuan yang harus dicapai untuk memnuhi target renstra sampai dengan tahun 2026.
- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan telah mencapai kemajuan 94,17%. Sementara itu, untuk arus logistik pada indikator Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal, tingkat kemajuan saat ini berada di angka 144,5% dari target akhir 490.000 orang/barang yang menandakan capaian telah mencapai target akhir renstra 2021-2026.

Berdasarkan tabel Tingkat Kemajuan Capaian Realisasi Renstra 2021-2026, secara keseluruhan capaian kinerja hingga tahun 2025 menunjukkan progres yang sangat signifikan, di mana sebagian besar indikator telah melampaui target akhir tahun 2026. Keberhasilan mencolok terlihat pada aspek fasilitas keselamatan jalan yang mencapai tingkat kemajuan 503,4% dan jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 253,8%. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan pada indikator persentase layanan angkutan darat yang baru mencapai 7,58% dan jumlah uji KIR sebesar 48%, yang mengindikasikan perlunya akselerasi fokus pada kedua area tersebut agar target akhir dapat terpenuhi sepenuhnya di tahun 2026.

E. Perbandingan Capaian Indikator Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Standar Nasional Yang Ditetapkan

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Standar Nasional
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	4.279	534,87%	Sesuai Spesifikasi Teknis
		Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	194	210,8%	1,4% - 19%
	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	170.079	260,8%	~
		Rasio ijin Trayek	0,0000326	99,08%	100%
		Jumlah uji KIR angkutan Umum/kendaraan wajib uji	5.618	51%	100% (Setiap 6 Bulan)
		Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	5	100%	~
		Persentase layanan angkutan darat	3,79%	96%	100% sesuai SPM
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji	98,7%	132%	100% sesuai SPM

		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	194	100%	100%
		Jumlah orang barang melalui Dermaga/bandara/terminal pertahun	708.504	146,15%	~

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut :

1. Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan

- Indikator: Pemasangan rambu-rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan.
- Standar Nasional: Penempatan dan spesifikasi teknis harus memenuhi PM Nomor 13 Tahun 2014 (tentang Rambu Lalu Lintas) dan PM Nomor 67 Tahun 2018 (tentang Marka Jalan).
- Sumber Data: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengenai perlengkapan jalan.

2. Penurunan Angka Kecelakaan

- Indikator: Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya.
- Standar Nasional: Target penurunan angka fatalitas kecelakaan nasional mengikuti Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan. Sebagai referensi, target nasional tahun 2025 sering kali menargetkan penurunan fatalitas di atas 1,4% hingga 19% secara bertahap.
- Sumber Data: Data Korlantas Polri dan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK LLAJ).

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum

- Indikator: Jumlah arus penumpang dan persentase layanan angkutan darat.
- Standar Nasional: Target pencapaian kinerja minimal merujuk pada PM Nomor 98 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi PM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dalam Trayek. SPM ini mewajibkan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan layanan.
- Sumber Data: Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Uji KIR)

- Indikator: Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji.

- Standar Nasional: 100% (Seluruh kendaraan wajib uji harus melakukan pengujian berkala setiap 6 bulan sekali).
- Sumber Data: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PM Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

5. Rasio Izin Trayek

- Indikator: Rasio izin trayek yang dikeluarkan.
- Standar Nasional: Rasio ideal biasanya ditetapkan dalam Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) nasional atau daerah yang membandingkan jumlah izin dengan jumlah penduduk.
- Sumber Data: Peraturan Daerah tentang Trayek dan Analisis Kebutuhan Kendaraan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan.

F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Terhadap Capaian Indikator Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Bagian ini menyajikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja Dinas Perhubungan selama tahun berjalan. Penjelasan ini bertujuan untuk memetakan akar penyebab dari setiap indikator, baik yang telah berhasil melampaui target maupun yang masih menghadapi kendala atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Melalui analisis ini, organisasi tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga mengidentifikasi solusi taktis dan langkah perbaikan yang telah maupun akan diambil guna mengatasi hambatan di lapangan. Dengan demikian, evaluasi ini menjadi landasan penting untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Penjabaran dari masing-masing poin indikator tersebut diuraikan dalam table berikut :

Tabel 3.15 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	92	194	210,8%	Tidak Tercapai	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas memengaruhi angka kecelakaan yang masih belum bisa menurun	Pemasangan rambu peringatan di daerah rawan kecelakaan (<i>blackspot</i>), dan penerangan jalan yang memadai. memetakan titik kecelakaan dan melakukan rekayasa lalu lintas khusus di titik tersebut (misal: pemasangan pembatas beton atau pembuatan jalur penyelamat).
		Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	800	4.279	534,87%	Tercapai	Keberhasilan ini didukung oleh strategi memastikan titik koordinat pemasangan yang sesuai dengan kajian arus lalu lintas. Hal ini berarti penambahan fasilitas bukan sekadar kuantitas, melainkan tepat sasaran untuk meningkatkan keselamatan jalan. Selain itu, dengan langkah	- Melakukan pengecekan kondisi PJU secara berkala atau segera memperbaiki PJU apabila terdapat kerusakan sehingga meminimalisir kerusakan <i>major</i> - Meningkatkan inovasi berupa penggunaan <i>tagging</i>

							modernisasi melalui digitalisasi inventaris aset menggunakan <i>tagging</i> lokasi (GPS) memudahkan pemantauan berkala dan pemeliharaan aset yang jumlahnya kini telah meningkat lima kali lipat dari target awal.	lokasi (GPS) yang telah dilakukan untuk membangun dasbor pemantauan <i>real-time</i> .
	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	65.200	170.079	260,8%	Tercapai	Tingginya minat masyarakat terhadap transportasi umum	Peningkatan Layanan: Menyediakan fasilitas AC, <i>Wi-Fi</i> , kebersihan armada, serta standar keamanan yang tinggi di dalam kendaraan.
		Rasio ijin Trayek	0,0000329	0,0000326	99,08%	Belum Tercapai	Capaian Realisasi sudah berada di kategori baik, namun belum mencapai target yang ditetapkan. Namun, sistem administrasi perizinan yang sudah tertata dengan baik dan adanya kesadaran dari operator angkutan untuk melegalkan operasional kendaraannya sesuai rute yang ditetapkan	Mempertahankan kemudahan layanan perizinan dan melakukan pengawasan rutin di lapangan agar tidak ada angkutan yang beroperasi di luar trayek resmi.

		Jumlah uji KIR angkutan Umum/kendaraan wajib uji	11.008	5.618	51%	Tidak tercapai	- Kurangnya kesadaran individu/sopir angkutan umum untuk melaksanakan uji KIR dan memastikan bahwa kendaraan yang dikendarai laik jalan. - Tingginya target capaian yang tidak sebanding dengan <i>baseline</i> capaian data tahun sebelumnya	- Terdapat Petugas dari UPTD PKB yang <i>stay</i> di Kantor Samsat agar apabila terdapat masyarakat yang membayar pajak kendaraannya agar diarahkan untuk uji KIR dan menahan salah satu bukti administratif bayar pajak terlebih dahulu sebagai bahan jaminan.
		Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	5	5	100%	Tercapai	Konsistensi dalam pemeliharaan sarana infrastruktur statis sehingga 5 unit fasilitas utama tetap beroperasi secara optimal sesuai fungsi teknisnya.	Melakukan audit fasilitas secara berkala untuk memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap simpul transportasi tetap terpenuhi bagi kenyamanan pengguna.
		Persentase layanan angkutan darat	48%	3,78%	7,89%	Tidak tercapai	Layanan angkutan transportasi yang kurang memadai karena keterbatasan jumlah armada dan kurangnya minat swasta dalam	Memberikan kemudahan bagi penyedia jasa angkutan untuk meremajakan armada dan memperluas jangkauan layanan ke

							pengadaan angkutan umum di rute tertentu.	area yang belum terlayani maksimal.
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji	25%	98,7%	132%	Tercapai	Pemilik KIR dalam daftar KBWU yang aktif patuh untuk melaksanakan uji kelayakan kendaraannya	Untuk yang belum memiliki KIR agar setiap pemilik angkutan umum yang sedang mengurus dokumen kendaraan di Satlantas harus diarahkan oleh petugas untuk segera melakukan pendaftaran uji KIR.
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	196	194	98,97%	Tercapai	Pertumbuhan volume kendaraan masih berada dalam batas kapasitas daya tampung infrastruktur jalan yang tersedia di wilayah tersebut.	Koordinasi lintas sektor dengan instansi pekerjaan umum untuk perencanaan pengembangan jaringan jalan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan di masa depan.
		Jumlah orang barang melalui Dermaga / bandara / terminal pertahun	485.000	708.504	146,15%	Tercapai	Minat masyarakat terhadap angkutan umum baik angkutan udara, sungai danau dan penyebrangan, serta darat masih tinggi.	Meningkatkan pelayanan dan merawat unit kerja secara berkelanjutan guna memastikan kelancaran arus barang dan penumpang dan menambah rute



								transportasi untuk menjangkau wilayah yang lebih terpencil.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Berdasarkan analisis terhadap seluruh capaian indikator kinerja tahun 2025, secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menunjukkan performa yang sangat positif dengan mayoritas indikator masuk dalam kategori **Baik**. Keberhasilan signifikan terlihat pada indikator yang didukung oleh tingginya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum yang terlihat di indikator jumlah arus penumpang angkutan umum dan indikator jumlah orang yang terangkut, kepemilikan KIR yang melampaui target berkat kepatuhan pemilik KIR yang terdaftar di KBWU aktif, serta konsistensi dalam pemeliharaan sarana prasarana perhubungan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan pada indikator yang realisasinya belum optimal, terutama yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat, persaingan moda transportasi dengan layanan daring, serta kendala teknis pada peralatan uji mekanis. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun target administratif dan fisik sebagian besar tercapai, diperlukan penguatan strategi pada aspek digitalisasi layanan, pemutakhiran alat uji, dan rekayasa lalu lintas yang lebih spesifik untuk mengatasi hambatan yang bersifat struktural maupun perilaku di masa mendatang.

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja

Analisis pada bagian ini bertujuan untuk menghubungkan antara capaian indikator kinerja yang telah dipaparkan sebelumnya dengan implementasi program serta kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program kerja dalam mendukung tercapainya target-target strategis organisasi. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 25 Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Kerja Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator Kerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	47,4%	Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kegiatan : penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota
		Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	96%	Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kegiatan : penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	93%	Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
		Rasio ijin Trayek	100%	Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Jumlah uji KIR angkutan Umum/kendaraan wajib uji	51%	Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	100%	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
		Persentase layanan angkutan darat	96%	Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kegiatan : Pengelola pelayaran
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji	132%	Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

				Kegiatan : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	100%	Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kegiatan : Penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
		Jumlah orang barang melalui Dermaga/bandara/terminal pertahun	68%	Program : Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

3.3 Realisasi Anggaran

Analisis realisasi anggaran merupakan bagian penting dalam penilaian kinerja organisasi untuk mengukur sejauh mana penggunaan sumber daya finansial telah mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Bagian ini akan menguraikan rincian alokasi anggaran dibandingkan dengan realisasi penggunaannya pada setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang transparan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas belanja organisasi, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan telah memberikan nilai tambah dalam menghasilkan *output* pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 26 Realisasi Penyerapan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Presentasi Penyerapan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 13.681.474.800	Rp. 11.603.857.385	84,81%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	Rp. 74.280.000	Rp. 73.614.085	99,10%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	Rp. 7.345.216.435	Rp. 5.764.062.127	78,47%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;	Rp. 422.370.000	Rp. 389.106.071	92,12%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;	Rp. 2.185.049.691	Rp. 1.856.734.875	84,97%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	Rp. 197.870.000	Rp. 192.307.500	97,19%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan	Rp. 1.899.968.574	Rp. 1.796.718.441	94,57%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Rp. 1.556.720.100	Rp. 1.531.314.286	98,37%
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rp. 22.098.015.635	Rp. 20.923.822.679	94,69%

	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten;	Rp. 21.180.130.640	Rp. 20.017.129.297	94,51%
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;	Rp. 297.000.000	Rp. 294.952.660	99,31%
	Kegiatan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir;	Rp. 50.080.000	Rp. 48.790.186	97,42%
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan	Rp. 372.224.995	Rp. 365.950.436	98,31%
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 198.580.000	Rp. 197.000.100	99,20%
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 25.120.000	Rp. 22.067.000	87,85%
	Kegiatan Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoprasi-an Untuk Kapal Yang Melayani Penyebrangan Dalam Daerah Kabupaten Kota.	Rp. 25.120.000	Rp. 22.067.000	87,85%
Total		Rp. 35.804.610.435	Rp. 32.549.747.064	90,91%
Sisa anggaran		Rp. 3.254.863.371		9,09%

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Sub Bagian Keuangan Dan Perencanaan Dinas
Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dengan total realisasi anggaran mencapai Rp32.549.747.064 dari pagu sebesar Rp35.804.610.435, yang mencerminkan tingkat penyerapan sebesar **90,91%**. Capaian ini didorong oleh prioritas tinggi pada pelayanan publik melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyerap dana sebesar 94,69%, di mana kegiatan strategis

seperti pengelolaan terminal dan rekayasa lalu lintas realisasinya hampir menyentuh 100%. Selain itu, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Pengelolaan Pelayaran juga memberikan kontribusi signifikan dengan masing-masing penyerapan sebesar 84,81% dan 87,85%. Secara menyeluruh, distribusi anggaran ini menunjukkan adanya keseimbangan fiskal dan efisiensi yang tinggi, di mana sebagian besar sumber daya dialokasikan secara produktif untuk meningkatkan fasilitas keselamatan serta kualitas layanan transportasi bagi masyarakat. Dengan total penyerapan 90,91%, organisasi dinilai mampu mengelola anggaran dengan produktif meskipun terdapat sisa anggaran (Silpa) sekitar 9,09%. Penyebab

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap capaian indikator kinerja selama tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja

Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Perjanjian Kinerja Instansi				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Berdasarkan Kegiatan)	Realisasi	Capaian Penyerapan Anggaran (%)	
	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	92	194	47,4%	Rp. 21.180.130.640	Rp. 20.017.129.297	94,51%	Belum Efisien
		Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	800	4.279	534,87%	Rp. 21.180.130.640	Rp. 20.017.129.297	94,51%	Efisien
	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	65.200	170.079	260,8%	Rp. 297.000.000	Rp. 294.952.660	99,31%	Efisien

		Rasio ijin Trayek	0,00003 29	0,0000 326	99,08%	Rp. 198.580.000	Rp. 197.000.100	99,20%	Efisien
		Jumlah uji KIR angkutan Umum/kendaraan wajib uji	11.008	5.618	51%	Rp. 372.224.995	Rp.365.950.436	98,31%	Efisien
		Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	5	5	100%	Rp. 1.556.720.100	Rp. 1.531.314.286	98,36%	Efisien
		Persentase layanan angkutan darat	48%	3,78%	7,89%	Rp. 25.120.000	Rp. 22.067.000	87,85%	Efisien
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji	25%	98,7%	394,8%	Rp. 372.224.995	Rp.365.950.436	98,31%	Efisien
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	196	194	98,97%	Rp. 50.080.000	Rp. 48.790.186	97,42%	Efisien
		Jumlah orang barang melalui Dermaga / bandara / terminal pertahun	485.000	708.504	146,15%	Rp. 297.000.000	Rp. 294.952.660	99,31%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, penjabaran lebih lanjut mengenai efesiensi penggunaan sumber daya terhadap hasil capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. **Penurunan Angka Kecelakaan:** Penggunaan anggaran pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan terserap sebesar **94,51%**. Namun, capaian indikator ini hanya mencapai **47,4%**. Hal ini menunjukkan efesiensi yang rendah dari sisi *outcome*, di mana besarnya anggaran infrastruktur keselamatan belum mampu menekan angka kecelakaan secara signifikan karena faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat.
- b. **Pemasangan Rambu-rambu dan Perlengkapan Jalan:** Dengan penyerapan anggaran yang sama sebesar **94,51%**, indikator ini berhasil mencapai target sebesar **96%**. Penggunaan sumber daya pada indikator ini dinilai **sangat efisien** karena penyerapan dana berbanding lurus dengan hasil fisik yang dicapai.
- c. **Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum:** Anggaran kegiatan pengelolaan terminal terserap hampir maksimal sebesar **99,31%**. Capaian indikator ini berada pada angka **93%**. Penggunaan sumber daya dinilai **efisien**, mengingat output layanan penumpang tetap terjaga stabil mendekati target meskipun menghadapi persaingan dari transportasi daring.
- d. **Rasio Izin Trayek:** Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas menyerap anggaran sebesar **99,20%**. Capaian indikator ini sangat optimal di angka **100%**. Hal ini menunjukkan efesiensi sumber daya yang **sangat tinggi** dalam mendukung legalitas operasional angkutan.
- e. **Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Fisik):** Anggaran pengujian berkala terserap tinggi sebesar **98,31%**. Namun, realisasi fisik kendaraan yang diuji hanya mencapai **51%**. Penggunaan sumber daya pada bagian ini dinilai **kurang efisien** karena serapan dana yang besar tidak diikuti dengan jumlah kendaraan yang melakukan uji fisik secara maksimal, salah satunya karena kendala alat uji mekanis.
- f. **Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus:** Indikator ini mencapai target **100%**. Dengan penyerapan anggaran yang mencapai **98,36%**, keberhasilan mempertahankan fungsi 5 unit fasilitas ini menunjukkan manajemen aset yang **efisien**.

- g. **Persentase Layanan Angkutan Darat:** Anggaran kegiatan pengelolaan pelayaran/angkutan terserap sebesar **87,85%**. Indikator ini mencapai hasil **96%** dari target yang ditetapkan. Penggunaan sumber daya ini dinilai **sangat efisien** karena mampu menghasilkan capaian tinggi dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan program lainnya.
- h. **Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum:** Dengan serapan anggaran operasional pengujian sebesar **98,31%**, capaian indikator ini melampaui target hingga **132%**. Ini merupakan indikator dengan **efisiensi tertinggi**, di mana koordinasi strategis dengan pihak Satlantas mampu memberikan hasil yang melebihi ekspektasi anggaran yang dikeluarkan.
- i. **Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan:** Anggaran kegiatan perizinan/fasilitas parkir terserap sebesar **97,42%**. Capaian indikator mencapai **100%**. Penggunaan sumber daya dinilai **efisien** dalam menjaga rasio keseimbangan infrastruktur jalan.
- j. **Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Terminal:** Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar **99,31%**. Namun, realisasi arus barang dan orang hanya mencapai **68%**. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang **sedang**, karena serapan anggaran yang maksimal belum mampu mendorong volume aktivitas logistik sesuai target akibat pengaruh penurunan aktivitas ekonomi daerah.

Secara akumulatif, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur mencatatkan rata-rata penyerapan anggaran sebesar **90,91%**. Mayoritas indikator kinerja mencapai angka di atas **90%**, sehingga secara keseluruhan penggunaan sumber daya organisasi tahun 2025 dikategorikan **Efisien**. Tantangan efisiensi ke depan terletak pada indikator dengan serapan anggaran tinggi namun hasil fisik rendah (seperti uji KIR fisik dan arus logistik dermaga) yang memerlukan optimalisasi strategi operasional.

Berdasarkan data yang telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, pencapaian suatu indikator kinerja pastinya tidak lepas dari dukungan pendanaan program ataupun kegiatan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai program dan kegiatan yang menjadi faktor pendorong keberhasilan maupun penghambat (kegagalan) dalam pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025:

1. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama didukung oleh efektivitas pelaksanaan program serta sinergi operasional yang tepat sasaran:

A. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten:

- Indikator **Pemasangan Rambu-rambu** mencapai **534,87%** (Kategori Istimewa). Keberhasilan ini ditunjang oleh Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten dimana anggaran kegiatan telah terserap tinggi (**94,51%**) berbanding lurus dengan realisasi capaian kinerja. Hal ini menunjukkan komitmen dinas perhubungan untuk mewujudkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan Jalan yang memadai.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kegiatan Pengujian Berkala

Indikator Persentase Kepemilikan KIR melampaui target secara signifikan (394,8%). Keberhasilan ini ditunjang oleh Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang menyerap anggaran sebesar 98,31%. Faktor kunci keberhasilannya adalah upaya UPTD PKB untuk mendorong kepatuhan pemilik KIR yang masuk dalam daftar KBWU aktif untuk menguji kelayakan kendaraannya secara berkala.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kegiatan Manajemen dan Rekayasa

Indikator Rasio Izin Trayek mencapai target sempurna (99,08%). Hal ini ditunjang oleh Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas dengan penyerapan anggaran mencapai 99,20%. Keberhasilan ini didorong oleh sistem administrasi yang tertib dan pengawasan rute angkutan yang konsisten.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Jumlah Pelabuhan/Terminal Bus mencapai target 100%. Keberhasilan ini didukung oleh Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terealisasi sebesar 98,37%. Konsistensi dalam pemeliharaan sarana statis memastikan fasilitas tetap beroperasi sesuai fungsinya.

D. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kegiatan Penerbitan Izin dan Fasilitas Parkir

Indikator Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan tercapai 98,97%. Capaian ini selaras dengan realisasi anggaran kegiatan sebesar 97,42%, menunjukkan pengaturan kapasitas ruang jalan dan fasilitas pendukung yang seimbang dengan pertumbuhan volume kendaraan.

E. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Indikator **Jumlah Arus Penumpang** mencapai 260,8% dan berhasil menyerap anggaran sebesar penyerapan anggaran sangat tinggi (99,31%). Hal ini menandakan anggaran kegiatan telah efisien untuk mendukung tercapainya kinerja dan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Kegagalan/Hambatan

Beberapa indikator belum mencapai target maksimal dikarenakan adanya kendala operasional pada kegiatan terkait maupun pengaruh faktor eksternal:

A. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten:

- Indikator **Penurunan Angka Kecelakaan** hanya tercapai 47,4%. Meskipun anggaran kegiatan telah terserap tinggi (94,51%) , kegagalan ini disebabkan oleh faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas yang tidak sebanding dengan penambahan fasilitas fisik di jalan.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator **Jumlah Uji KIR Secara Fisik** hanya mencapai 51% dari target. Meskipun penyerapan anggaran kegiatan mencapai 98,31%, terdapat ketimpangan antara ketersediaan dana operasional dengan realisasi fisik, yang disebabkan oleh kendala teknis pada peralatan uji mekanis dan menurunnya jumlah kendaraan yang datang melakukan uji fisik secara sukarela.

C. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Persentase Layanan Angkutan Darat mencapai **7,89%**. Meskipun penyerapan anggaran sangat tinggi (**99,31%**) , kegagalan mencapai target 100% disebabkan oleh Layanan angkutan transportasi yang kurang memadai karena keterbatasan jumlah armada dan kurangnya minat swasta dalam pengadaan angkutan umum di rute tertentu.

D. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, penyerapan anggaran masih **belum optimal** dengan Persentase penyerapan di angka 84,97% dan sisa anggaran mencapai Rp. 328.314.816. Hal ini disebabkan oleh Penganggaran tagihan listrik PJU tidak terserap untuk bulan desember dikarenakan penagihan dan pembayarannya di bulan januari 2026. Dari sisi capaian target dari indikator terpenuhi.

Analisis ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran yang tinggi pada suatu kegiatan tidak selalu menjamin keberhasilan target jika terdapat hambatan perilaku masyarakat (pada angka kecelakaan) atau kendala alat teknis (pada uji KIR fisik).

3.4 Tindak Lanjut dan Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta capaian kinerja organisasi. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diterbitkan menjadi instrumen penting bagi Dinas untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen terhadap transparansi, Dinas Perhubungan menyampaikan poin-poin rekomendasi strategis dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur beserta langkah-langkah tindak lanjut yang telah diambil untuk memastikan sasaran organisasi tercapai secara optimal. Adapun Aksi Tindak lanjut Hasil Evaluasi Sakip Internal Tahun 2025 instansi Dinas Perhubungan ditunjukkan dalam matriks sebagai berikut :

MATRIKS AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP INTERNALTAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	Rekomendasi/Temuan Evaluasi (LHE Internal 2025)	Rencana Aksi Tindak Lanjut Perbaikan	Satuan Target (%)	Status Progres Capaian/ Penyelesaian				Output (Keluaran/ Hasil)	Outcome (Manfaat/ Dampak)	Bukti Dukung	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Agar penyajian laporan kinerja lebih menjelaskan secara spesifik, jelas, dan mendalam terkait hal-hal yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerjanya bukan hanya sebatas informasi terkait pelaksanaan Program, aktivitas/kegiatan, dan program serta penyerapan anggaran	Menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) dengan menyajikan analisis mendalam mengenai faktor keberhasilan dan hambatan (kegagalan) dalam mencapai target, serta menguraikan secara spesifik korelasi antara pelaksanaan program/kegiatan terhadap peningkatan nilai indikator kinerja.	100%	✓	✓	✓	✓	LKjIP Dishub Tahun 2025	Terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang lebih transparan dan informatif, di mana pencapaian tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran, tetapi dari efektivitas program terhadap target sasaran	Tercantumkan di lampiran LKjIP Dishub Tahun 2025	Telah disajikan di LKjIP Dishub Tahun 2025
2.	Target dalam setiap tahun terlalu rendah sehingga mudah dicapai	Melakukan peninjauan ulang penetapan target kinerja dengan menggunakan data capaian tahun sebelumnya sebagai dasar (<i>baseline</i>).	100%	✓	✓	✓	✓	Renstra, LKjIP	Terwujudnya analisis efektivitas program untuk memastikan target yang ditetapkan bersifat menantang dan memicu peningkatan performa organisasi.	Tercantumkan di lampiran LKjIP Dishub Tahun 2025	Telah menyajikan perbandingan data target maupun capaian dengan tahun-tahun sebelumnya, namun belum membahas

											lebih dalam terkait analisis historis penetapan besaran target yang ditetapkan.
3.	Agar menyusun penyesuaian target baru (renstra) untuk target yang telah tercapai sebelum masa renstra berakhir	Melaksanakan revisi dokumen perencanaan (Renstra) dengan menetapkan target baru yang lebih progresif, yang didasarkan pada hasil evaluasi program/kegiatan yang terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian indikator utama serta penyesuaian terhadap visi misi Kepala Daerah yang terbaru	100%	✓	✓	✓	✓	Renstra Dishub 2025-2029	Terwujudnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan Dinas Perhubungan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025–2029 melalui penetapan target kinerja yang lebih progresif, akuntabel, dan berbasis data evaluasi riil terhadap capaian indikator utama	Tercantumkan di lampiran LKjIP Dishub Tahun 2025	Telah disajikan di Renstra Dishub Tahun 2025-2029
4.	Memperbaiki dan meningkatkan dokumen laporan akuntabilitas kinerja, yaitu dengan memastikan bahwa laporan kinerja menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan rinci	Mengintegrasikan analisis efisiensi anggaran dalam laporan kinerja dengan merinci sejauh mana alokasi sumber daya pada setiap program/kegiatan mampu mengoptimalkan <i>output</i> (capaian) dan mendukung keberhasilan capaian kinerja dinas secara keseluruhan.	100%	✓	✓	✓	✓	LKjIP Dishub Tahun 2025	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran melalui matriks antara alokasi sumber daya dengan <i>output</i> (capaian) yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur	Tercantumkan di lampiran LKjIP Dishub Tahun 2025	Telah disajikan di LKjIP Dishub Tahun 2025



									sehingga program yang paling efisien dalam mendukung indikator kinerja utama akan teridentifikasi dan memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan dampak maksimal bagi organisasi secara keseluruhan.		
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja kedepan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja	Menyajikan laporan dengan menyuguhkan matriks Analisis perbandingan antara target, realisasi, dan capaian kinerja tahun ini terhadap tahun sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika fluktuasi kinerja organisasi dari tahun ke tahun.	100%	✓	✓	✓	✓	LKjIP Dishub Tahun 2025	Teridentifikasinya peningkatan atau penurunan produktivitas (tren kinerja), serta memetakan keberhasilan strategi yang telah diimplementasikan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur secara berkelanjutan	Tercantumkan di lampiran LKjIP Dishub Tahun 2025	Telah disajikan di LKjIP Dishub Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama mengenai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Capaian Kinerja Sasaran Strategis:** Secara umum, Dinas Perhubungan telah berhasil menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan mayoritas indikator sasaran mencapai kategori **Sangat Tinggi**. Keberhasilan paling signifikan terlihat pada indikator **Pemasangan rambu-rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan (534,87%)**, **jumlah arus penumpang umum (260,8%)**, **Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (394,8%)** dan **Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal (146,1%)**, yang membuktikan efektivitas sinergi lintas instansi dan tertib administrasi perhubungan.
2. **Realisasi Anggaran:** Kinerja keuangan organisasi menunjukkan tingkat penyerapan yang optimal, yakni mencapai **90,91%** (Realisasi sebesar Rp32.549.747.064 dari Pagu Rp35.804.610.435). Penyerapan tertinggi berada pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (94,69%), yang mencerminkan prioritas tinggi pada pelayanan keselamatan dan infrastruktur publik.
3. **Hambatan Kinerja:** Meskipun mencapai hasil yang baik secara umum, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target maksimal, yaitu **Penurunan Angka Kecelakaan (47,4%)** dan **Jumlah Uji KIR Fisik (51%)**. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat uji mekanis yang modern serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas.
4. **Efisiensi Sumber Daya:** Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dinilai **Efisien**. Penyerapan anggaran yang tinggi selaras dengan pencapaian output fisik pada sebagian besar program, meskipun efektivitas pada aspek keselamatan jalan masih perlu ditingkatkan agar sebanding dengan besarnya alokasi anggaran yang dikeluarkan.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi melalui

tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Internal yang mencakup Peningkatan Kualitas Pelaporan , Optimalisasi Perencanaan Strategis, Analisis Efisiensi Sumber Daya, dan Evaluasi Kinerja Berkelanjutan

4.2 Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik di tahun mendatang, adapun saran dan rekomendasi untuk tercapainya hal tersebut adalah:

1. Mengingat rendahnya capaian uji KIR fisik, disarankan agar terdapat Petugas dari UPTD PKB yang *stay* di Kantor Samsat agar apabila terdapat masyarakat yang membayar pajak kendaraannya agar diarahkan untuk uji KIR dan menahan salah satu bukti administratif bayar pajak terlebih dahulu sebagai bahan jaminan.
2. Perlu dilakukan rekayasa lalu lintas yang lebih spesifik pada titik rawan kecelakaan (*blackspot*), serta peningkatan frekuensi sosialisasi keselamatan berkendara bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk merubah perilaku pengguna jalan.
3. Mengakselerasi sistem pendaftaran dan notifikasi uji berkala berbasis aplikasi untuk mengingatkan pemilik kendaraan, serta menerapkan *tagging* lokasi (GPS) pada aset perlengkapan jalan guna mempermudah pemeliharaan berkala.
4. Perbaiki Perencanaan Anggaran Terhadap kegiatan yang memiliki sisa anggaran cukup besar (seperti administrasi umum), perlu dilakukan perencanaan yang lebih presisi, terutama terkait penjadwalan pembayaran tagihan rutin agar tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, baik monitoring mengontrol progress capaian kinerja setiap TW, serta evaluasi dari segi SAKIP ataupun evaluasi yang menunjang capaian hasil kinerja agar memperoleh hasil yang maksimal memenuhi target dan efektivitas penyerapan anggaran.

LAMPIRAN

I. Dokumentasi Kegiatan



Kunjungan Bupati Kotawaringin Timur dan Dishub Prov. Kalteng dalam rangka giat operasi ODOL di Dinas Perhubungan



Pemantauan pembangunan jembatan Sei Lenggana KM 21 bersama Satlantas Polres Kotim



Pemantauan progres pembangunan jembatan sei lenggana KM 21 oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur



Proses Pemasangan/perbaikan PJU di beberapa kawasan kabupaten kotawaringin Timur



Pemeliharaan rambu lalu lintas di beberapa wilayah kota sampit



Pengecatan ulang marka parkir UPTD
PKB



Pengawasan pekerjaan pembangunan Traffic Light di Simpang 4 Jl. A. Yani – Jl. Rahadi Usman



Kegiatan peningkatan kompetensi pegawai Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2025



II. Prestasi/Penghargaan Dinas Perhubungan Tahun 2025

NO	NAMA PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Ria Maharani Carolina	Pemenang Juara 1 Lomba Domino Dalam Rangka HUT KORPRI Ke-64
2.	Muhammad Rizky Raya Firdaus, S.Tr. Tra	Juara 2 Lomba Fashion Show Pesona Batik Kotim Dalam Rangka HUT DWP Kotim Ke-26
3.	- Dedy Rizaldi	Mendapatkan penghargaan inovator daerah untuk Instansi Dinas Perhubungan Tahun 2025 oleh Bapperida Kotawaringin Timur
4.	- Elvina Nur Istiqomah, A.Md. Tra - Susi Nurlianti	Mendapatkan Penghargaan PIC Inovasi Daerah Instansi Dinas Perhubungan Tahun 2025 oleh Bapperida Kotawaringin Timur



III. Perjanjian Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAIHANSYAH, S.H.,M.A.P.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin
Timur

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : H. HALIKINNOR, S.H.,M.M.

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut telah menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 07 Mei 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

H. HALIKINNOR, S.H.,M.M.

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RAIHANSYAH, S.H.,M.A.P.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19750406 199902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatkan pelayanan publik	Jumlah arus penumpang angkutan umum	65.200
		Rasio ijin trayek	0.0000329
		Jumlah Uji KIR Angkutan umum/Kendaraan Wajib Uji	11.008
		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus	5
		Prosentase layanan angkutan darat	48%
		Prosentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji	25%
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	196
		Jumlah orang/barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun	485.000
2.	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai	Pemasangan rambu-rambu/Fasilitas dan perlengkapan jalan	800

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp. 12.028.154.756	
2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 19.484.340.547	
3. Pengelolaan Pelayanan	Rp. 25.120.000	

Sampit, 07 Mei 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RAIHANSYAH, S.H., M.A.P.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19750406 199902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRIYARSIH, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Sub bagian Umum Dan Pelaporan Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : NANANG SURIANSYAH

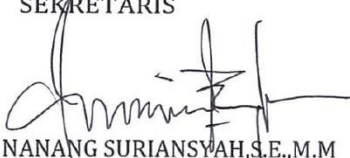
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


NANANG SURIANSYAH, S.E., M.M.
Pembina /IVa
NIP 19740126200801 1 010

Sampit, 3 Januari 2025

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN PELAPORAN


SRIYARSIH, S.E., M.M.
Pembina/IVa
NIP 19720126 199103 2 002



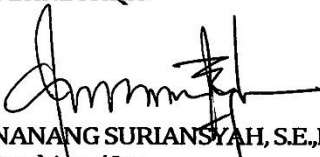
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SUB BAGIAN UMUM DAN PELAPORAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Peningkatan kualitas Pelayanan	Jumlah Pegawai Dinas Perhubungab Kab Kotim	98 ASN
		Jumlah SuratMasuk dan keluar	10.000
		Pegawai yang mengikuti Diklat Sumber Daya Manusia (SDM)	20 ASN
		Laporan dokomen LAKIP,LPPD,IKU,Anjab/ABK	12 bulan

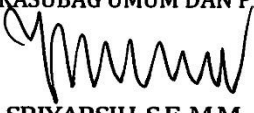
Sub Kegiatan	Anggaran
1.....	Rp.
2.....	Rp.
3. dst.	Rp.

Sampit, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


NANANG SURIANSYAH, S.E.,M.M.
Pembina / Iva
NIP 19740126 200801 1 010

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN PELAPORAN


SRIYARSIH, S.E.,M.M.
Pembina / Iva
NIP 19720126 199103 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELVINA NUR ISTIQOMAH, A.Md. Tra

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Hj. SRIYARSIH, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala SubBagian Umum Dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 03 Januari 2025

Pihak Kedua,
Atasan Langsung

Hj. SRIYARSIH, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19720126 19103 2 002

Pihak Pertama,

ELVINA NUR ISTIQOMAH, A.Md. Tra
Pengatur (II/c)
NIP. 20010128202403 2 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pengolah Data dan Informasi
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kantor	Mengelola surat masuk dan surat keluar	12 Bulan
		Mendistribusikan surat, dokumen yang telah didisposisi oleh pimpinan	12 Bulan
		Membuat laporan/dokumen Anjab/ABK, LAKIP, IKU	12 Bulan
		Mengolah data dan informasi	12 Bulan

Keterangan :

Sampit, 03 Januari 2025

Pihak Kedua,
Atasan Langsung

Hj. SRIYARSIH, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19720126 19103 2 002

Pihak Pertama,

ELVINA NUR ISTIQOMAH, A.Md. Tra
Pengatur (II/c)
NIP. 20010128202403 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUSTAKIM, SH.,MAP.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PKB

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : NANANG SETIAWAN, SE

Jabatan : Kepala UPTD PKB

Selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,
Atasan Langsung

NANANG SETIAWAN, SE
Penata /III/c
NIP.19791118 200604 1 017

Pihak Pertama,

MUSTAKIM, SH.,MAP.
Penata Muda TK.I/III/b
NIP.19871214 2010011002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT PENGAWAS/PEJABAT FUNGSIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Pelaksanaan administrasi Surat menyurat	Agenda Surat masuk dan Surat Keluar	1200 Surat
2	Pemeriksaan laporan pelayanan PKB	Laporan bulanan pelayanan PKB	12 Laporan
3			
dst.			

Sub Kegiatan	Anggaran
1	Rp.
2	Rp.
3. dst.	Rp.

Sampit, 08 Januari 2025

Pihak Kedua,

NANANG SETIAWAN, SE
Penata /III/c
NIP.19791118 200604 1 017

Pihak Pertama,

MUSTAKIM, SH.,MAP.
Penata Muda TK.I/III/b
NIP.19871214 2010011002

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

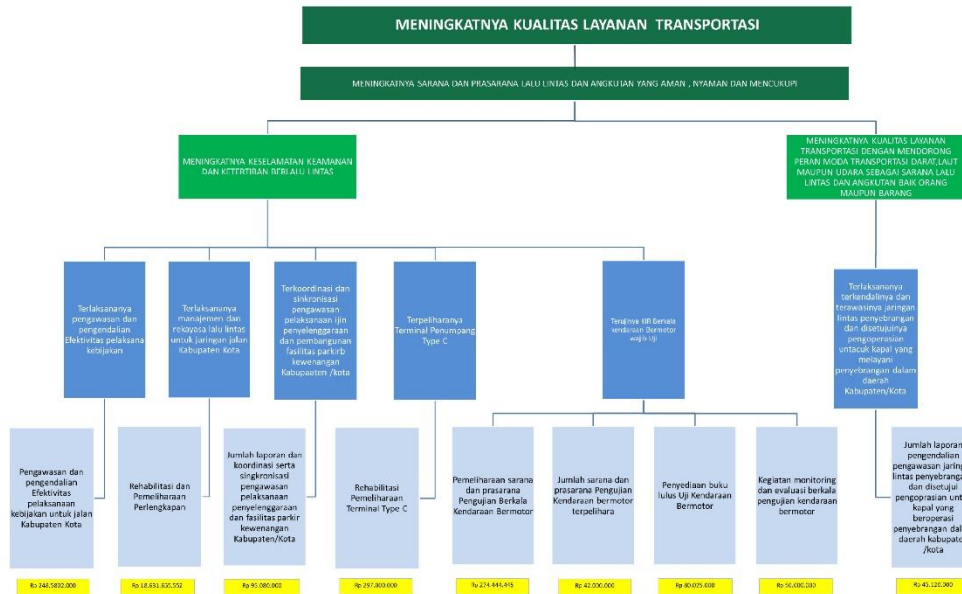
- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis perangkat daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja lain dari perangkat daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh perangkat daerah pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran yang dimaksud.



IV. Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025

POHON KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025

MISI KE 1	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
PRIORITAS PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Yang Handal
TUJUAN RPJMD	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Dengan Mendorong Peran Moda Transportasi Darat Laut Maupun Udara Sebagai Sarana Lalu Lintas Dan Angkutan, Baik Orang Maupun Barang Untuk Mendukung Perekonomian Daerah
SASARAN RPJMD	Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Yang Aman ,Nyaman Dan Mencukupi





V. LHE SAKIP Tahun 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman Km.6.3 Sampit 74322 Telp. (0531) 21082, Fax. 22044
Email : inspektorat@kotimkab.go.id <http://inspektorat.kotimkab.go.id>

Sampit, 1 Oktober 2025

Nomor : 700.1.2.7/ 352 /LHE-SAKIP/INSP-2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kotawaringin Timur
di Sampit

Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Perhubungan, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi SAKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Perhubungan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Evaluasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 telah dilaksanakan. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP ini memuat informasi tentang Implementasi SAKIP pada Dinas

1

Perhubungan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,80	7,20	12,00	24,00
Pengukuran Kinerja	30	4,20	6,30	10,50	21,00
Pelaporan Kinerja	15	2,40	3,60	6,00	12,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,00	5,25	8,75	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,40	22,35	37,25	75,00

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2024, nilai tersebut **75,00** termasuk dalam kategori **BB (Sangat Baik)**.

II. PENDAHULUAN

2.1. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0007/Huk-INSPEKTORAT/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;
5. Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 000.8.6.3/0786/SETDA.ORG/2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang permohonan Evaluasi dan implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
6. Surat Tugas Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor 700/298/SPT/INSP/2025 Tanggal 12 September 2025.

2.2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja dan berorientasi pada hasil (outcome).

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

2.3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

2.5. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini Evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang akan dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara mandiri.

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon dan chat.

2.6. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Daerah Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi serta peningkatan operasi, aksesibilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. Pelaksanaan penelitian dan Pengembangan di bidang transportasi;
- d. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia transportasi;

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh Sumber Daya Aparatur 96 (Sembilan Puluh Enam) orang yang terdiri dari PNS 49 Orang dan Tenaga Kontrak 47 Orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Sekolah Dasar sebanyak 2 (dua) orang;
- Sekolah Menengah Atas sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
- Diploma II sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- Diploma III sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Diploma IV sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Strata I sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Strata II sebanyak 6 (enam) orang.

2.7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan

Akuntabilitas kinerja memuat visi misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Perhubungan pada tahun anggaran 2024 telah melaksanakan 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai 2 (dua) sasaran yang ditetapkan yang diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama.

Hasil sasaran dan indikator, secara keseluruhan atas realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan adalah 85,10% termasuk dalam kategori "Tinggi". Gambaran capaian kinerja Dinas Perhubungan tersebut sebagai berikut :

No	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman dan nyaman dan mencukupi	82,23 %
2.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai	87,98 %
Rata-rata Capaian Kinerja		85,10 %

2.8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya (Tahun 2024) dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Evaluasi Tindak Lanjut
1.	Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dengan cara melibatkan seluruh unit pegawai (tidak hanya tim penyusun) dalam pembahasan dan penyusunan laporan kinerja dan di administrasikan lengkap.	Menyusun perjanjian kinerja seluruh ASN untuk kelengkapan laporan kinerja
2.	Agar dokumen laporan kinerja menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional atau minimal perbandingan dengan level provinsi (Benchmark Kinerja)	Akan segera menyusun dokumen laporan kinerja perbandingan realisasi kinerja provinsi
3.	Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP	Akan segera ditindaklanjuti pemebrian rekomendasi yang cukup mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP
4.	Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat daerah dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah	Akan menyusun rekomendasi hasil evaluasi AKIP secara berkala untuk perbaikan dan pengningktan AKIP
5.	Agar rekomendasi dari hasil evaluasi yang disampaikan ditindak lanjuti	-

Akan tetapi tindak lanjut penyelesaian rekomendasi tersebut masih belum sepenuhnya disertai dengan dokumen tindak lanjutnya dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Evaluator.

III. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Dinas Perhubungan telah berupaya untuk menindak lanjuti beberapa rekomendasi tahun sebelumnya, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindak lanjut dilakukan masih belum optimal. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **75,00** Kategori **"Sangat Baik"** dengan predikat **"BB"**, dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam

pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,80	7,20	12,00	24,00
Pengukuran Kinerja	30	4,20	6,30	10,50	21,00
Pelaporan Kinerja	15	2,40	3,60	6,00	12,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,00	5,25	8,75	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,40	22,35	37,25	75,00

Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur. Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya Tahun 2024 (hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Tahun 2023), mengalami peningkatan sebesar 1,50 yaitu dari 73,50 menjadi 75,00 pada Tahun 2025 (hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Tahun 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Rincian perbandingan hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot Komponen	Nilai	
		2024	2025
1. Perencanaan Kinerja	30	22,50	24,00
2. Pengukuran Kinerja	30	21,00	21,00
3. Pelaporan Kinerja	15	12,00	12,00
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	73,50	75,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

3.1. Hasil Evaluasi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja mencakup penilaian atas Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai 24,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 30,00.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran kinerja mencakup penilaian atas Pengukuran kinerja telah dilakukan, Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dan Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran kinerja menunjukkan nilai 21,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 30,00.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja mencakup penilaian atas Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai 12,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 15,00.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja sebagai berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai 18,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 25,00.

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, direkomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

1. Agar penyajian laporan kinerja lebih menjelaskan secara spesifik, jelas dan mendalam terkait hal-hal yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerjanya bukan hanya sebatas informasi terkait pelaksanaan Program, aktivitas/kegiatan dan program serta penyerapan anggaran.
2. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. Target dalam setiap tahun terlalu rendah sehingga mudah dicapai.
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional atau minimal level Provinsi (Benchmark Kinerja).

4. Agar Menyusun penyesuaian target baru (renstra) untuk target yang telah tercapai sebelum masa renstra berakhir.
5. Memperbaiki dan meningkatkan dokumen laporan akuntabilitas kinerja, yaitu dengan memastikan bahwa laporan kinerja menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan rinci.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja kedepan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.
7. Memastikan tindak lanjut yang dilakukan untuk menyelesaikan rekomendasi telah sesuai dengan yang diinginkan oleh Evaluator.

Rekomendasi dari hasil evaluasi yang di sampaikan segera ditindak lanjuti.

IV. PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin agar dapat memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

4.1. Simpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah 75,00 termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan predikat BB dan implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya. Interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Total nilai AKIP hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2024 ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya (75,00). Dimana nilai ini mengalami peningkatan sebesar 1,50 yaitu dari 73,50 menjadi 75,00 pada Tahun 2025 (hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Tahun 2024).

4.2. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja ini disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang implementasi SAKIP dan sebagai bahan perbaikan serta pengembangan lebih lanjut dari SAKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Inspektur Daerah,
IASRI, S.E., CGCAE.
Pemula Utama Muda
NIP. 19651022 199403 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah di Sampit (sebagai laporan).

VI. Bukti Dukung Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Dishub Tahun 2025

1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dishub Tahun 2025 dengan menyajikan analisis mendalam mengenai faktor keberhasilan dan hambatan (kegagalan) dalam mencapai target, serta menguraikan secara spesifik korelasi antara pelaksanaan program/kegiatan terhadap peningkatan nilai indikator kinerja.

**Tabel 3.15 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	92	194	210,8%	Tidak Tercapai	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas memengaruhi angka kecelakaan yang masih belum bisa menurun	Pemasangan rambu peringatan di daerah rawan kecelakaan (<i>blackspot</i>), dan penerangan jalan yang memadai. memetakan titik kecelakaan dan melakukan rekayasa lalu lintas khusus di titik tersebut (misal: pemasangan pembatas beton atau pembuatan jalur penyelamat).
		Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	800	4.279	534,87%	Tercapai	Keberhasilan ini didukung oleh strategi memastikan titik koordinat pemasangan yang sesuai dengan kajian arus lalu lintas. Hal ini berarti penambahan fasilitas bukan sekadar kuantitas, melainkan tepat sasaran untuk meningkatkan keselamatan jalan. Selain itu, dengan langkah	- Melakukan pengecekan kondisi PJU secara berkala atau segera memperbaiki PJU apabila terdapat kerusakan sehingga meminimalisir kerusakan <i>major</i> - Meningkatkan inovasi berupa penggunaan <i>tagging</i>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

92

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja

Analisis pada bagian ini bertujuan untuk menghubungkan antara capaian indikator kinerja yang telah dipaparkan sebelumnya dengan implementasi program serta kegiatan nyata yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program kerja dalam mendukung tercapainya target-target strategis organisasi. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2025 sebagai berikut :

2. Melaksanakan peninjauan ulang penetapan target kinerja dengan menggunakan data capaian tahun sebelumnya sebagai dasar (*baseline*).

RENCANA STRATEGIS (Renstra) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2025 - 2029 | 76

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui indikator utama dan indikator kinerja kunci yang berlaku dari tahun 2025 hingga 2030

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	86	87	87	88	89	89	90	
2.	Konektivitas Darat	Km	0	84	85	86	86	86	87	
3.	Konektivitas Laut	Unit	0	5	67	67	83	83	1	
4.	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	0	37,27 %	39,13 %	41,05 %	43,13 %	45,29 %	47,96 %	
5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Skor	0	71	71,26	71,83	71,79	72,05	72,05	

Renstra terbaru 2025-2029

3. Melaksanakan revisi dokumen perencanaan (Renstra) dengan menetapkan target baru yang lebih progresif, yang didasarkan pada hasil evaluasi program/kegiatan yang terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian indikator utama serta penyesuaian terhadap visi misi Kepala Daerah yang terbaru



4. Mengintegrasikan analisis efisiensi anggaran dalam laporan kinerja dengan merinci sejauh mana alokasi sumber daya pada setiap program/kegiatan mampu mengoptimalkan *output* (capaian) dan mendukung keberhasilan capaian kinerja dinas secara keseluruhan.

**Tabel 3. 27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian Indikator Kinerja
Tahun Anggaran 2025**

No	Sasaran	Perjanjian Kinerja Instansi				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Berdasarkan Kegiatan)	Realisasi	Capaian Penyerapan Anggaran (%)	
	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	92	194	47,4%	Rp. 21.180.130.640	Rp. 20.017.129.297	94,51%	Belum Efisien
		Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	800	770	96%	Rp. 21.180.130.640	Rp. 20.017.129.297	94,51%	Efisien
	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	65.200	60.744	93%	Rp. 297.000.000	Rp. 294.952.660	99,31%	Efisien
		Rasio ijin Trayek	0,0000329	0,0000329	100%	Rp. 198.580.000	Rp. 197.000.100	99,20%	Efisien

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

103

Berdasarkan tabel diatas, penjabaran lebih lanjut mengenai efesiensi penggunaan sumber daya terhadap hasil capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. **Penurunan Angka Kecelakaan:** Penggunaan anggaran pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan terserap sebesar **94,51%**. Namun, capaian indikator ini hanya mencapai **47,4%**. Hal ini menunjukkan efesiensi yang rendah dari sisi *outcome*, di mana besarnya anggaran infrastruktur keselamatan belum mampu menekan angka kecelakaan secara signifikan karena faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran masyarakat.
- b. **Pemasangan Rambu-rambu dan Perlengkapan Jalan:** Dengan penyerapan anggaran yang sama sebesar **94,51%**, indikator ini berhasil mencapai target sebesar **96%**. Penggunaan sumber daya pada indikator ini dinilai **sangat efisien** karena penyerapan dana berbanding lurus dengan hasil fisik yang dicapai.
- c. **Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum:** Anggaran kegiatan pengelolaan terminal terserap hampir maksimal sebesar **99,31%**. Capaian indikator ini berada pada angka **93%**. Penggunaan sumber daya dinilai **efisien**, mengingat output layanan penumpang tetap terjaga stabil mendekati target meskipun menghadapi persaingan dari transportasi daring.
- d. **Rasio Izin Trayek:** Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas menyerap anggaran sebesar **99,20%**. Capaian indikator ini sangat optimal di angka **100%**. Hal ini menunjukkan efesiensi sumber daya yang **sangat tinggi** dalam mendukung legalitas operasional angkutan.
- e. **Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Fisik):** Anggaran pengujian berkala terserap tinggi sebesar **98,31%**. Namun, realisasi fisik kendaraan yang diuji hanya mencapai **51%**. Penggunaan sumber daya pada bagian ini dinilai **kurang efisien** karena serapan dana yang besar tidak diikuti dengan jumlah kendaraan yang melakukan uji fisik secara maksimal, salah satunya karena kendala alat uji mekanis.
- f. **Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus:** Indikator ini mencapai target **100%**. Dengan penyerapan anggaran yang mencapai 98,36%, keberhasilan mempertahankan fungsi 5 unit fasilitas ini menunjukkan manajemen aset yang **efisien**.

5. Menyajikan laporan dengan menyuguhkan matriks Analisis perbandingan antara target, realisasi, dan capaian kinerja tahun ini terhadap tahun sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika fluktuasi kinerja organisasi dari tahun ke tahun.

C. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian

Analisis perbandingan antara target, realisasi, dan capaian kinerja tahun ini terhadap tahun sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika fluktuasi kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Hal ini bertujuan sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi adanya peningkatan atau penurunan produktivitas (tren kinerja), serta memetakan keberhasilan strategi yang telah diimplementasikan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur secara berkelanjutan. Sebagai rincian atas analisis tersebut, berikut disajikan tabel yang memuat perbandingan data Target, Realisasi, dan Capaian dibandingkan dengan capaian tahun lalu:

Tabel 3. 22 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	750	652	86%	800	4.279	534,87 %
		Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	102	213,7%	46,7%	92	194	210,8%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	63.800	62.320	98%	65.200	170.079	260,8 %
		Rasio ijin Trayek	0,0000329	0,0000329	100%	0,0000329	0,0000326	99,08%
		Jumlah uji KIR angkutan	10.384	5.692	54,8%	11.008	5.618	51%

capaian Dinas Perhubungan dalam memenuhi janji kinerja jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Dengan mengevaluasi perbandingan ini, organisasi dapat mengidentifikasi sisa target yang harus diselesaikan di masa mendatang serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap berada di jalur yang benar demi mewujudkan visi dan misi yang telah direncanakan secara berkelanjutan. Uraian data tingkat kemajuan capaian realisasi dan capaian terhadap sasaran strategis (renstra 2021-2026) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 23 Tingkat Kemajuan Capaian Realisasi Dan Capaian Terhadap Sasaran Strategis (Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = $\frac{4}{5} \times 100\%$)
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	4.279	850	503,4%
		Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	194	83	233,7%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	170.079	67.000	253,8%
		Rasio ijin Trayek	0,0000326	0,0000329	99,08%
		Jumlah uji KIR angkutan Umum/kendaraan wajib uji	5.618	11.668	48%
		Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	5	5	100%
		Persentase layanan angkutan darat	3,79%%	50%	7,58%
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kndaraan wajib uji	98,70%%	27%	365,5%
		Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	194	206	94,17%
		Jumlah orang barang melalui	708.504	490.000	144,5%

Berdasarkan tabel Tingkat Kemajuan Capaian Realisasi Renstra 2021-2026, secara keseluruhan capaian kinerja hingga tahun 2025 menunjukkan progres yang sangat signifikan, di mana sebagian besar indikator telah melampaui target akhir tahun 2026. Keberhasilan mencolok terlihat pada aspek fasilitas keselamatan jalan yang mencapai tingkat kemajuan 503,4% dan jumlah arus penumpang angkutan umum sebesar 253,8%. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan pada indikator persentase layanan angkutan darat yang baru mencapai 7,58% dan jumlah uji KIR sebesar 48%, yang mengindikasikan perlunya akselerasi fokus pada kedua area tersebut agar target akhir dapat terpenuhi sepenuhnya di tahun 2026.

E. Perbandingan Capaian Indikator Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Standar Nasional Yang Ditetapkan

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Standar Nasional
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan yang memadai.	Pemasangan rambu - rambu / fasilitas dan perlengkapan jalan	4.279	534,87%	Sesuai Spesifikasi Teknis
		Penurunan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya	194	210,8%	1,4% - 19%
	Meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan yang aman nyaman dan mencukupi.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	170.079	260,8%	-
		Rasio ijin Trayek	0,0000326	99,08%	100%
		Jumlah uji KIR angkutan Umum/kendaraan wajib uji	5.618	51%	100% (Setiap 6 Bulan)
		Jumlah Pelabuhan laut/Udara/terminal Bus	5	100%	-
		Persentase layanan angkutan darat	3,79%	96%	100% sesuai SPM
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum/kendaraan wajib uji	98,7%	132%	100% sesuai SPM



VII. Rencana aksi RB Dinas Perhubungan Tahun 2025

Matrik Rencana Aksi RB General Tahun 2025

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	RENCANA AKSI (RENCANA YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN 2025)	OUTPUT						ANGGARAN (Rp)	REALISASI								CATATAN (BERUPA STATUS/PROGRES PENYELESAIAN)	UNIT KERJA PELAKSANA	KOORDINATOR PELAKSANA	RINCIAN BUKTI DUKUNG	LINK BUKTI DUKUNG	
						SATUAN	INDIKATOR	TARGET					OUTPUT				ANGGARAN (Rp)									
								TW I	TW II	TW III	TW IV		Total	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III						TW IV
1	Belaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyeederhanaan Birokrasi	2 pegawai	40 pegawai	Menempatkan Pegawai Dishub sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan Oleh BKPSDM di lingkungan Dinas Perhubungan Kab kotim	Orang	Jumlah Orang	32	8	-	-	40		32	8	-	-	-	-	-	-	Penempatan Pegawai sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan Oleh BKPSDM di lingkungan Dinas Perhubungan Kab kotim	DISHUB	SEKRETARIAT	SK PENEMPATAN PEGAWAI	https://drive.google.com/file/d/1w0PoLNp_mI2aXKPPXgUub8HycyEzXiv/view?usp=drive_link
		1 dokumen	1 dokumen	Menyusun Peta Proses Bisnis menyesuaikan dengan Sistem kerja Baru	dokumen	jumlah dokumen	0	0	1	0	1		0	0	1	-	-	-	-	-	Penyusunan SOP untuk menyesuaikan dengan Struktur Organisasi pasca Penyeederhanaan Birokrasi	DISHUB	SEKRETARIAT	SOP Kegiatan pelayanan Dishub	https://drive.google.com/file/d/1Y8wKfoow/CcG8o4E8tT36fH4sy1998/view?usp=drive_link	
2	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1 dokumen	1 dokumen	Menyusun Peta Proses Bisnis dan Data Layanan	dokumen	jumlah dokumen	0	0	1	0	1		0	0	0	0	-	-	-	-	Sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran menteri PANRB 18 tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui penerapan arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE, maka dilakukan penyesdharhanaan proses bisnis dan pemetaan data layanan pada perangkat daerah.	DISHUB	SEKRETARIAT	1. Peta Proses Bisnis 2. Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Asistensi penyusunan peta proses bisnis dan data layanan	
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	1 kegiatan	1 kegiatan	Mengikuti Sosialisasi dan Asistensi penyusunan peta proses bisnis dan data layanan	kegiatan	jumlah kegiatan	0	0	0	1	1		0	0	-	-	-	-	-	-	Pembuatan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Dinas Perhubungan dengan identifikasi sebagai berikut: 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	DISHUB	SEKRETARIAT		
3	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Nilai SAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1. Menyusun Laporan Kinerja (LKIP)	Dokumen	presentase penyusunan laporan	25	50	75	100	100	0	25	50	-	-	-	-	-	-	Menyusun LKIP dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja untuk periode satu tahun	DISHUB	SEKRETARIAT	DOKUMEN SAKIP	https://drive.google.com/file/d/1krCwR7TCmNsqDElu3Q3n5S5w4eDI-/view?usp=drive_link
		1 Dokumen	1 Dokumen	2. Menyusun Renstra PD tahun 2024	Dokumen	presentase penyusunan dokumen	25	50	75	100	100		25	50	75	-	-	-	-	-	Menyusun Renstra sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah untuk periode lima tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja tahunan dan rencana kerja anggaran.	DISHUB	SEKRETARIAT	Dokumen Renstra	https://drive.google.com/file/d/1c1pqgIS2TEv6k2Ea4Msq0z5_nAvMFGQ/view?usp=drive_link	
		1 Dokumen	1 Dokumen	3. Menyusun Renja PD tahun 2024	Dokumen	presentase penyusunan dokumen	25	50	75	100	100		25	50	75	-	-	-	-	-	Menyusun Renja PD sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari	DISHUB	SEKRETARIAT	Dokumen Renja	https://drive.google.com/file/d/1oLmRdwkfp_7Au5dp8kOFQ36HUN4yqM/view?usp=drive_link	



				1 Dokumen	1 Dokumen	4. Menyusun Perjanjian Kinerja (Pimpinan sampai ke Staf/Pelaksana)	Dokumen	Jumlah Dokumen	1	0	0	0	1		1	-	-	-	-	-	-	-	Penyusunan Perjanjian Kinerja demi terwujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia	DISHUB	SEKRETARIAT	dokumen perjanjian kinerja	https://drive.google.com/file/d/1Q2PNmdy7b38vutxRfYxOGBy24etX/view?usp=drive_link
				4 Dokumen	4 Dokumen	5. Menyampaikan Capaian IKU setiap Triwulan (TW I s/d IV) kepada Sekretaris Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	4		1	2	3	-	-	-	-	-	Penyusunan IKU menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen renstra	DISHUB	SEKRETARIAT	Dokumen IKU	https://drive.google.com/file/d/2k3iRSBkM4-sbn045n464xt1W2n0/view?usp=drive_link
				1 Dokumen	1 Dokumen	6. Menyusun Penjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja (Tingkat PD)	Dokumen	Jumlah dokumen	-	1	-	-	1		1	-	1	-	-	-	-	-	menyusun penjenjangan kinerja guna mendukung pencapaian kinerja organisasi	DISHUB	SEKRETARIAT	Dokumen Pohon Kinerja	https://drive.google.com/file/d/1FRY8Secm_iGxYreGYNs4Eaw83P46/view?usp=drive_link
				1 Kegiatan	1 Kegiatan	7. Mengikuti Bimtek Implementasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja	Kegiatan	Jumlah kegiatan	1	-	-	-	1		1	-	-	-	-	-	-	-	Telah mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja	DISHUB	SEKRETARIAT	Dokumen LKIP 2024	https://drive.google.com/file/d/1c3UgCvqKSm4Kw54gQaVvqUR866jP/view?usp=drive_link
4	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas																									
5	Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Melakukan Penilaian Mandiri SPIP tahun 2024 melalui Sistem e-Integriti	Kegiatan	Jumlah kegiatan	-	-	1	-	1		-	-	1	-	-	-	-	-	-	kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	DISHUB	SEKRETARIAT	Penilaian SPIP Mandiri	https://drive.google.com/drive/folders/11cQk5w8h1yGz785OChZbn6d0Tyg?usp=drive_link
6	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	mensosialisasikan sistem pengaduan kepada masyarakat melalui sosial media (instagram) Dinas Perhubungan	Kegiatan	Jumlah kegiatan	1	1	-	-	1		1	1			-	-	-	-	-	rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik pemerintah daerah kab. kotin tahun 2025 bahwa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sesuai dengan tujuan, tugas, dan fungsi pengelolaan pengaduan publik.	DISHUB	SEKRETARIAT	Sosialisasi nomor pengaduan melalui sosial media dinas perubangan	https://www.instagram.com/p/DiplyxoTwtn7iqsh-dm9mNjanhyvngx
7	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Mengikuti sosialisasi hasil SPI tahun 2024	Kegiatan	Jumlah kegiatan	-	-	1	-	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	survei ini dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi	DISHUB	SEKRETARIAT	Laporan kegiatan sosialisasi hasil pelaksanaan SPI 2024	
			1 Dokumen	1 Dokumen	Menyampaikan LHKPN (Permintaan KPK RI)	Dokumen	Jumlah dokumen	-	-	1	-	1		-	-	1	-	-	-	-	-	-	Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, penyampaian LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang penyelenggara negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran negara	DISHUB	SEKRETARIAT	dokumen penyampaian LHKPN	https://drive.google.com/drive/folders/1Ee06wG-a7bb-24WEsa3iW0ayQz8qBq2Q
			1 Dokumen	1 Dokumen	Penyampaian Laporan SPT Tahunan	Dokumen	Jumlah dokumen	1	-	-	-	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyampaian SPT Tahunan merupakan pertanggungjawaban wajib pajak atas kewajiban pajaknya selama setahun yang sudah diatur	DISHUB	SEKRETARIAT	Dokumen penyampaian SPT tahunan	https://drive.google.com/drive/folders/1Ee06wG-a7bb-24WEsa3iW0ayQz8qBq2Q
8	Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan																									
9	Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum																									
10	Belaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	90%	90%	Melakukan Pengelolaan Surat masuk berbasis Elektronik melalui Aplikasi Elektronis	Persen	presentase pengelolaan surat	25	50	75	100	100		25	50	75	100	-	-	-	-	-	upaya meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam kearsipan dan memudahkan koordinasi	DISHUB	SEKRETARIAT	Akun Srikandi	https://drive.google.com/drive/folders/12utTW2MKBAfmP6flog5rsw4f8ja9?usp=drive_link
			-	30%	Menerapkan pemanfaatan aplikasi srikandi, optimalisasi penggunaan Tanda Elektronik Elektronik (TTE)	Persen	presentase pengelolaan surat	0	10	10	10	30		0	10	-	-	-	-	-	-	-	implementasi pemanfaatan pengelolaan kearsipan melalui srikandi	DISHUB	SEKRETARIAT	dokumen TTE	
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	4 Dokumen	4 Dokumen	Payampai data pelaksanaan statistik data sektoral	dokumen	Jumlah dokumen	1	1	1	1	4		1	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaporan data sektoral dinas perhubungan per triwulan kepada wali data	DISHUB	SEKRETARIAT	data sektoral	https://drive.google.com/drive/folders/1Fey9mqPA2iP-82w5Nhn25Y5XQ2mtHg7usp=drive_link
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90%	90%	Pemanfaatan penggunaan E-Katalog dan SIPEBEJE dalam pengadaan barang dan Jasa	persen	presentase penggunaan E-katalog dan SIPEBEJE	25	50	75	100	100		25	50	-	-	-	-	-	-	-	Aksi ini memberikan kemudahan bagi instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang/jasa	DISHUB	SEKRETARIAT	SK PPK dab PPTK	https://drive.google.com/drive/folders/1nCumkg2KHnUjK8i6PWQYQVQ9NNDY571?usp=drive_link
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Dokumen	Dokumen	1. Menyampaikan Laporan Keuangan PD	persen	presentase penyelesaian	25	50	75	100	100		25	50	75	100	-	-	-	-	-	Menyampaikan Laporan Keuangan PD tepat waktu	DISHUB	SEKRETARIAT	1. Laporan Keuangan	https://drive.google.com/drive/folders/1pw7TrwVRt6Q859ob2R7R1KTWami0x6?usp=drive_link
			1 Dokumen	1 Dokumen	2. Menyusun KIB A dan KIB B	Dokumen	Jumlah dokumen	-	1	-	-	1		-	1	-	-	-	-	-	-	-	Pelaporan KIB dilakukan untuk mencatat data BMN secara tersendiri atau kumpulan/kolektif diungkap data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.	DISHUB	SEKRETARIAT	2. Dokumen KIB A dan KIB B 3. Sertifikat hasil Bimtek	



			1 Kegiatan	1 Kegiatan	3. Mengikuti Bimtek Implementasi Pengelolaan Keuangan dll yang berkaitan dengan Penguatan Pengelolaan Aset	Kegiatan	jumlah kegiatan	-	1	-	-	1		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mengembangkan kompetensi dengan mengikuti bimtek implementasi pengelolaan keuangan atau yang berkaitan dengan pengelolaan aset	DISHUB			
			1 Dokumen	1 Dokumen	4. Mengikuti Pendampingan inventarisasi dan penginputan aset ke aplikasi SIMDA,	Kegiatan	jumlah kegiatan	-	1	-	-	1		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.	DISHUB			
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	1 laporan	1 laporan	menindalnjuti hasil temuan BPK terkait tunjangan anak (KP4)	laporan	jumlah laporan	-	1	-	-	1		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	menindak lanjuti hasil temuan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai ASN	DISHUB	SEKRETARIAT	bukti dukung tindak lanjut temuan	https://drive.google.com/file/d/1E5PJC-S3y7hV86PuPLEBGJOYECN8Jl/view?usp=drive_link
14	Penguatan Sistem Merit (Integrasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penataan Jabatan Fungsional)	Indeks Sistem Merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Implementasi Terkait Tugas dan Fungsi Pegawai Dinas Perhubungan	kegiatan	jumlah kegiatan	25	50	75	100	100		25	50	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Implementasi Terkait Tugas dan Fungsi Pegawai Dinas Perhubungan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing Masing Pegawai sesuai dengan Perbub No.23 Tahun 2022 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Perhubungan Kab kotim	DISHUB	SEKRETARIAT	Perbub No.23 Tahun 2022	Link
			1 Dokumen	1 Dokumen	Mengelola Kinerja pegawai melalui pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja	dokumen	jumlah dokumen	1	-	-	-	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penilaian E-Kinerja setiap bulannya mampu membantu perangkat daerah untuk pengelolaan kinerja pegawai ASN mulai dari penyusunan hingga penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sehingga tindak lanjutnya menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel.	DISHUB		Dokumen penilaian E-kinerja pegawai dishub	https://drive.google.com/drive/folders/1E+RkC-GCr0kwwB0rmpp6ZCqZHL0KQ6?usp=drive_link
15	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAkhlak	1 Dokumen	2 Dokumen	Menyusun laporan Pelaksanaan Implementasi Budaya Kerja Kabupaten Setiap Tahun yang disampaikan ke Bagian Organisasi setda Kab.Kotim	dokumen	jumlah dokumen	-	1	-	-	1	2		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaporan Pelaksanaan Implementasi Budaya Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Setiap semester	DISHUB	SEKRETARIAT	Laporan Budaya Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur	https://drive.google.com/drive/folders/1pQJyAcaYf9n9uualuCNHYAUsiW1DyfsZ?usp=drive_link
16	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat		1 Dokumen	Melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kab. Kotim	dokumen	jumlah dokumen	-	-	1	-	1		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	survei kepuasan masyarakat masih dalam tahap pengumpulan data untuk evaluasi pelayanan dinas perhubungan kedepannya	DISHUB		Dokumen survei kepuasan masyarakat	
		Indeks Pelayanan Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Mengikuti pelatihan Implementasi Budaya Pelayanan Prima (Service Excellen)	kegiatan	jumlah kegiatan	-	-	1	-	1		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima perlu meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan publik agar tercipta pelayanan optimal dan kepuasan masyarakat, yang menjadi salah satu parameter keberhasilan dalam pelayanan publik.	DISHUB		ST Penugasan	https://drive.google.com/file/d/11vn2b8-1qt3Dh1mytSZSVSV5MmDcwISM/view?usp=sharing



Matrik Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025

NO	TEMA	SASARAN TEMATIK ROADMAP	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR	TARGET	SATUAN TARGET	PERMASALAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET (PERMASALAHAN)	SATUAN (PERMASALAHAN)	RENCANA AKSI	OUTPUT						ANGGARAN (TOTAL)	FOKUS INTERVENSI	UNIT KERJA PELAKSANA	KOORDINATOR PELAKSANA	REALISASI						CATATAN (STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN)	RINCIAN BUKTI DUKUNG	LINK BUKTI DUKUNG	
													SATUAN	INDIKATOR	TARGET (DIISI MENGGUNAKAN ANGKA)								ANGGARAN (Rp)	OUTPUT								
															TW I	TW II	TW III	TW IV						TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV				TOTAL
	Reformasi Birokrasi mendorong hilirisasi	4. Pengembangan Riset dan Inovasi Teknologi Hilirisasi 5. Peningkatan Efisiensi Logistik dan Infrastruktur untuk mendorong pengembangan infrastruktur yang mendukung hilirisasi (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri)	1. BAPPERIDA Kab. Kotim 2. Dinas Perhubungan Kab. Kotim 3. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Kotim 4. Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Kotim 5. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotim	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota		Presentase	Banyaknya Kendaraan Bertonase Besar seperti Truk CPO, Tronton, truk Gandeng masuk kota yang menjadi penyebab Kemacetan serta dikawatirkan terjadi kecelakaan Lalu Lintas	Menurunnya Jumlah Kendaraan Besar tidak masuk kota	Pengawasan		Presentase	Melakukan Aksi Pengawasan Terhadap Kendaraan Besar untuk tidak masuk kota	Laporan	Presentase Database yang terverifikasi	25	50	75	100	100	Rp163,580,000.00	Pengawasan	Dinas Perhubungan		25	50	75				Laporan Pengawasan	https://drive.google.com/drive/folders/1mddbc7OxY3TvfGQx8YkP9aCubxQM0B2u5p?drive_link	
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota		Presentase	Banyaknya pelanggaran yang terjadi di lokasi – lokasi parkir akibat kurang disiplinnya jukir, serta pengelolaan perparkiran	Meningkatnya PAD dari Pengelolaan Parkir	Jalur		Presentase	Melakukan Sosialisasi kepada jukir dan Perbaikan Pengelolaan perparkiran	Kegiatan	Presentase Database yang terverifikasi	25	50	75	100	100	Rp50,080,000.00	Pengawasan	Dinas Perhubungan		25	50	75				Laporan Pengawasan	https://drive.google.com/drive/folders/1tv5KZU23y8wC9Ww07b6L7YK5P22u0?drive_link	
				Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia		unit	Tidak berfungsinya dengan normal Traffic light yang berada dalam kota yang dapat mengakibatkan kemacetan serta kecelakaan lalu lintas	Tidak Terjadinya Kemacetan di Persimpangan	Rehab		Presentase	Melakukan Rehab Terhadap 3 titik Traffic Light dan Pemabngunan PJU a. Traffic Light Simpang 3 A.Yani –H.M. Arsyad b. Traffic Light Simpang 4 JI. A.Yani –H.M. Arsyad	Kegiatan	Presentase Database yang terverifikasi	30	60	100		100	a. Rp 297.000.000 b. Rp 360.000.000 c. Rp 360.000.000	Pengawasan	Dinas Perhubungan		30	60	100		100	a. Rp 283.327.500 b. Rp 341.325.000 c. Rp 340.770.000	telah diselesaikan	Laporan Pengawasan	https://drive.google.com/drive/folders/1Ch8327ga4pwMVC6Rd0-5BMM6x344Lb7u5p?drive_link



PEMERINTAHAN KAB. KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

NERACA

TAHUN ANGGARAN 2025

1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	98.723.412.435,71	88.760.951.195,71
1.1	ASET LANCAR	138.221.894,00	209.284.024,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	334.553.980,00	334.553.980,00
1.1.04.01	Piutang Retribusi Jasa Umum	322.403.500,00	322.403.500,00
1.1.04.01.04	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	322.403.500,00	322.403.500,00
1.1.04.01.04.0001	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	322.403.500,00	322.403.500,00
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	12.150.480,00	12.150.480,00
1.1.04.02.01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.150.480,00	12.150.480,00
1.1.04.02.01.0005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	12.150.480,00	12.150.480,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(196.332.086,00)	(196.332.086,00)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(196.332.086,00)	(196.332.086,00)
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(196.332.086,00)	(196.332.086,00)
1.1.10.01.02.0010	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir	(187.826.750,00)	(187.826.750,00)
1.1.10.01.02.0037	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan	(8.505.336,00)	(8.505.336,00)
1.1.12	Persediaan	0,00	71.062.130,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	71.062.130,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00	71.062.130,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0,00	2.502.300,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	0,00	1.059.830,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0,00	67.500.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	138.221.894,00	209.284.024,00
1.3	ASET TETAP	97.516.665.041,71	87.483.141.671,71
1.3.01	Tanah	13.466.294.445,00	13.457.496.945,00
1.3.01.01	Tanah	13.466.294.445,00	13.457.496.945,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	13.388.138.468,00	13.379.340.968,00
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	9.730.700.968,00	9.730.700.968,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	3.648.640.000,00	3.648.640.000,00
1.3.01.01.01.0007	Tanah Persil Lainnya	8.797.500,00	0,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	22.287.000,00	22.287.000,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	22.287.000,00	22.287.000,00
1.3.01.01.03	Lapangan	55.868.977,00	55.868.977,00
1.3.01.01.03.0002	Tanah Lapangan Parkir	55.868.977,00	55.868.977,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	17.567.093.212,00	15.714.498.412,00
1.3.02.01	Alat Besar	725.518.450,00	725.518.450,00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	725.518.450,00	725.518.450,00
1.3.02.01.01.0010	Alat Pengangkat	725.518.450,00	725.518.450,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	5.842.712.476,00	5.842.712.476,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.285.095.333,00	3.285.095.333,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	562.400.000,00	562.400.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.590.280.000,00	1.590.280.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	697.430.000,00	697.430.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	434.985.333,00	434.985.333,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	2.557.617.143,00	2.557.617.143,00
1.3.02.02.03.0001	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	2.355.741.143,00	2.355.741.143,00
1.3.02.02.03.0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	201.876.000,00	201.876.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.641.205.001,00	1.641.205.001,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	3.773.556,00	3.773.556,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	3.773.556,00	3.773.556,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	1.637.431.445,00	1.637.431.445,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	1.637.431.445,00	1.637.431.445,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	12.987.000,00	12.987.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	12.987.000,00	12.987.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	12.987.000,00	12.987.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.196.311.010,00	2.822.789.460,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.311.006.850,00	1.170.536.900,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	34.650.000,00	34.650.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	115.681.500,00	77.220.000,00



1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.155.675.350,00	1.053.666.900,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.624.161.730,00	1.391.110.130,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	915.686.500,00	761.840.500,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	27.992.150,00	22.692.150,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	284.553.400,00	223.547.800,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	12.600.000,00	12.600.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	383.329.680,00	370.429.680,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	261.142.430,00	261.142.430,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	150.464.000,00	150.464.000,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	34.179.800,00	34.179.800,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	19.254.850,00	19.254.850,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.838.800,00	2.838.800,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	54.404.980,00	54.404.980,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	817.415.503,00	739.815.503,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	579.563.780,00	533.963.780,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	260.590.000,00	260.590.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	281.680.000,00	236.080.000,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	37.293.780,00	37.293.780,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	218.358.800,00	186.358.800,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	172.914.800,00	140.914.800,00
1.3.02.06.02.0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM	15.444.000,00	15.444.000,00
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Khusus	30.000.000,00	30.000.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	19.492.923,00	19.492.923,00
1.3.02.06.03.0008	Peralatan Antena VHF/FM	13.499.700,00	13.499.700,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	3.330.000,00	3.330.000,00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	2.663.223,00	2.663.223,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.000.000,00	0,00
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	10.000.000,00	0,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	10.000.000,00	0,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	198.846.000,00	198.846.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	197.660.000,00	197.660.000,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	197.660.000,00	197.660.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	1.186.000,00	1.186.000,00
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	1.186.000,00	1.186.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	27.633.500,00	27.633.500,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	27.633.500,00	27.633.500,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	27.633.500,00	27.633.500,00
1.3.02.10	Komputer	2.506.059.272,00	2.187.477.272,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.682.925.080,00	1.435.605.080,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	475.411.000,00	475.411.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.178.931.680,00	931.611.680,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	28.582.400,00	28.582.400,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	823.134.192,00	751.872.192,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	235.153.000,00	235.153.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	310.810.592,00	239.548.592,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	277.170.600,00	277.170.600,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	2.588.405.000,00	1.515.513.750,00
1.3.02.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2.588.405.000,00	1.515.513.750,00
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	2.170.520.250,00	1.156.597.750,00
1.3.02.18.01.0002	Rambu Tidak Bersuar	417.884.750,00	358.916.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	19.052.554.911,00	17.946.582.974,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	18.980.297.039,00	17.874.325.102,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.889.569.039,00	17.783.597.102,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.693.566.950,00	1.973.316.950,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	109.541.000,00	109.541.000,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	104.090.000,00	104.090.000,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	711.864.000,00	711.864.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	55.653.000,00	55.653.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	581.298.250,00	481.773.250,00
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	82.507.000,00	82.507.000,00
1.3.03.01.01.0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	9.268.311.813,00	8.982.114.876,00
1.3.03.01.01.0019	Bangunan Pengujian Kelaikan	4.747.294.026,00	4.747.294.026,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	490.468.000,00	490.468.000,00
1.3.03.01.01.0035	Bangunan Stasiun Bus	44.975.000,00	44.975.000,00
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	90.728.000,00	90.728.000,00
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	90.728.000,00	90.728.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	72.257.872,00	72.257.872,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	72.257.872,00	72.257.872,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	72.257.872,00	72.257.872,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.120.087.443,05	67.053.928.310,05



1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	20.040.303.520,00	19.832.797.797,00
1.3.04.01.01	Jalan	1.275.396.520,00	1.067.890.797,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	548.407.800,00	548.407.800,00
1.3.04.01.01.0010	Jalan Lainnya	726.988.720,00	519.482.997,00
1.3.04.01.02	Jembatan	18.764.907.000,00	18.764.907.000,00
1.3.04.01.02.0011	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	18.764.907.000,00	18.764.907.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	56.218.121,00	56.218.121,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan	35.368.121,00	35.368.121,00
1.3.04.02.04.0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	35.368.121,00	35.368.121,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	20.850.000,00	20.850.000,00
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	20.850.000,00	20.850.000,00
1.3.04.03	Instalasi	4.800.992.985,00	4.800.992.985,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	4.800.992.985,00	4.800.992.985,00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	3.322.564.985,00	3.322.564.985,00
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.478.428.000,00	1.478.428.000,00
1.3.04.04	Jaringan	49.222.572.817,05	42.363.919.407,05
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	49.222.572.817,05	42.363.919.407,05
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	540.647.472,05	540.647.472,05
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	4.448.155.220,00	4.448.155.220,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	44.233.770.125,00	37.375.116.715,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	2.433.736.500,00	2.433.736.500,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	2.433.736.500,00	2.433.736.500,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	376.994.000,00	376.994.000,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	22.410.000,00	22.410.000,00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	20.093.000,00	20.093.000,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	333.891.000,00	333.891.000,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	600.000,00	600.000,00
1.3.05.01.03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	2.056.742.500,00	2.056.742.500,00
1.3.05.01.03.0001	Bahan Kartografi	2.056.742.500,00	2.056.742.500,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.900.000,00	5.900.000,00
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	5.900.000,00	5.900.000,00
1.3.06.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	5.900.000,00	5.900.000,00
1.3.06.01.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangun	5.900.000,00	5.900.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(29.129.001.469,34)	(29.129.001.469,34)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.650.105.767,00)	(13.650.105.767,00)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(507.862.915,00)	(507.862.915,00)
1.3.07.01.01.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	(507.862.915,00)	(507.862.915,00)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(5.102.921.962,00)	(5.102.921.962,00)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke	(562.400.000,00)	(562.400.000,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke	(1.590.280.000,00)	(1.590.280.000,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke	(288.144.286,00)	(288.144.286,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Ke	(421.228.189,00)	(421.228.189,00)
1.3.07.01.02.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkut	(2.061.273.501,00)	(2.061.273.501,00)
1.3.07.01.02.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkut	(179.595.986,00)	(179.595.986,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.639.163.003,00)	(1.639.163.003,00)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkal	(2.264.136,00)	(2.264.136,00)
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(1.636.898.867,00)	(1.636.898.867,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(3.246.750,00)	(3.246.750,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan	(3.246.750,00)	(3.246.750,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.619.185.466,00)	(2.619.185.466,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Peng	(34.650.000,00)	(34.650.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perle	(77.220.000,00)	(77.220.000,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.013.774.900,00)	(1.013.774.900,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(683.447.860,00)	(683.447.860,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembers	(13.498.860,00)	(13.498.860,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingi	(193.937.300,00)	(193.937.300,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(12.600.000,00)	(12.600.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah T	(333.590.208,00)	(333.590.208,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejab	(150.464.000,00)	(150.464.000,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejab	(34.179.800,00)	(34.179.800,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejab	(12.916.750,00)	(12.916.750,00)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejab	(2.838.800,00)	(2.838.800,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejab	(51.066.988,00)	(51.066.988,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pem	(672.672.227,00)	(672.672.227,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audi	(260.590.000,00)	(260.590.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Vide	(236.080.000,00)	(236.080.000,00)
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pem	(22.376.268,00)	(22.376.268,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi	(104.434.800,00)	(104.434.800,00)
1.3.07.01.06.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi	(15.444.000,00)	(15.444.000,00)



1.3.07.01.06.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi	(18.000.000,00)	(18.000.000,00)
1.3.07.01.06.0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Ar	(13.499.700,00)	(13.499.700,00)
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Ar	(1.248.750,00)	(1.248.750,00)
1.3.07.01.06.0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tena	(998.709,00)	(998.709,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(132.959.332,00)	(132.959.332,00)
1.3.07.01.08.0064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat	(131.773.332,00)	(131.773.332,00)
1.3.07.01.08.0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat P	(1.186.000,00)	(1.186.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(27.633.500,00)	(27.633.500,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Ala	(27.633.500,00)	(27.633.500,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.910.363.312,00)	(1.910.363.312,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringa	(475.411.000,00)	(475.411.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Compute	(747.276.356,00)	(747.276.356,00)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit La	(28.582.400,00)	(28.582.400,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan M	(235.153.000,00)	(235.153.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Pe	(169.026.656,00)	(169.026.656,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jar	(254.913.900,00)	(254.913.900,00)
1.3.07.01.18	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(1.034.097.300,00)	(1.034.097.300,00)
1.3.07.01.18.0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-f	(675.181.300,00)	(675.181.300,00)
1.3.07.01.18.0002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-f	(358.916.000,00)	(358.916.000,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.830.289.175,34)	(5.830.289.175,34)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(5.826.676.281,34)	(5.826.676.281,34)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(486.340.727,34)	(486.340.727,34)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(29.210.933,33)	(29.210.933,33)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(30.070.444,44)	(30.070.444,44)
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(221.468.800,00)	(221.468.800,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(9.521.131,00)	(9.521.131,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(156.091.053,26)	(156.091.053,26)
1.3.07.02.01.0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(25.668.844,44)	(25.668.844,44)
1.3.07.02.01.0018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(2.820.750.629,75)	(2.820.750.629,75)
1.3.07.02.01.0019	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(1.863.732.608,67)	(1.863.732.608,67)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(130.539.353,55)	(130.539.353,55)
1.3.07.02.01.0035	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	(16.990.555,56)	(16.990.555,56)
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tingga	(36.291.200,00)	(36.291.200,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(3.612.894,00)	(3.612.894,00)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(3.612.894,00)	(3.612.894,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.648.606.527,00)	(9.648.606.527,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4.539.705.450,00)	(4.539.705.450,00)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(548.407.800,00)	(548.407.800,00)
1.3.07.03.01.0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	(238.316.250,00)	(238.316.250,00)
1.3.07.03.01.0021	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sanda	(3.752.981.400,00)	(3.752.981.400,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(44.229.371,00)	(44.229.371,00)
1.3.07.03.02.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pan	(35.368.121,00)	(35.368.121,00)
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bar	(8.861.250,00)	(8.861.250,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.831.551.450,00)	(1.831.551.450,00)
1.3.07.03.03.0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Ga	(1.240.180.250,00)	(1.240.180.250,00)
1.3.07.03.03.0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Ga	(591.371.200,00)	(591.371.200,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(3.233.120.256,00)	(3.233.120.256,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmis	(229.883.992,00)	(229.883.992,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribus	(744.688.007,00)	(744.688.007,00)
1.3.07.03.04.0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lai	(2.258.548.257,00)	(2.258.548.257,00)
	JUMLAH ASET TETAP	97.516.665.041,71	87.483.141.671,71
1.5	ASET LAINNYA	1.068.525.500,00	1.068.525.500,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	395.868.000,00	395.868.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	395.868.000,00	395.868.000,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	395.868.000,00	395.868.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	395.868.000,00	395.868.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	1.068.525.500,00	1.068.525.500,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.068.525.500,00	1.068.525.500,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.068.525.500,00	1.068.525.500,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.068.525.500,00	1.068.525.500,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(395.868.000,00)	(395.868.000,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(395.868.000,00)	(395.868.000,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(395.868.000,00)	(395.868.000,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(395.868.000,00)	(395.868.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.068.525.500,00	1.068.525.500,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	98.723.412.435,71	88.760.951.195,71



2	KEWAJIBAN	534.592.529,00	590.885.518,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	534.592.529,00	590.885.518,00
2.1.06	Utang Belanja	534.592.529,00	590.885.518,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	534.592.529,00	590.885.518,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	0,00	543.541,00
2.1.06.02.01.0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan	0,00	543.541,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	534.592.529,00	590.341.977,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	310.000,00	272.500,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	534.282.529,00	590.069.477,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	534.592.529,00	590.885.518,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	534.592.529,00	590.885.518,00
3	EKUITAS	98.188.819.906,71	88.170.065.677,71
3.1	EKUITAS	98.188.819.906,71	88.170.065.677,71
3.1.01	Ekuitas	68.160.213.505,71	65.302.029.539,71
3.1.01.01	Ekuitas	88.170.065.677,71	84.332.088.098,87
3.1.01.01.01	Ekuitas	88.170.065.677,71	84.332.088.098,87
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	88.170.065.677,71	84.332.088.098,87
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(20.009.852.172,00)	(19.030.058.559,16)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(20.009.852.172,00)	(19.030.058.559,16)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(20.009.852.172,00)	(19.030.058.559,16)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	30.028.606.401,00	22.868.036.138,00
3.1.03.01	RK PPKD	30.028.606.401,00	22.868.036.138,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	30.028.606.401,00	22.868.036.138,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	30.028.606.401,00	22.868.036.138,00
	JUMLAH EKUITAS	98.188.819.906,71	88.170.065.677,71
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	98.723.412.435,71	88.760.951.195,71

Kab. Kotawaringin Timur, 14 Januari 2026
PLT. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

RAIHANSYAH, SH., MAP
NIP.197504061999021001